

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
2005 - 2010**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
SUKADANA
2005**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2005**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2005 - 2010**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



SATONO
BUPATI LAMPUNG TIMUR 2005 - 2010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 07 TAHUN 2005**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2005-2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur 2005-2010.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
-

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2005-2010.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2010, yang selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah Kabupaten
-

Lampung Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005-2010.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Lampung Timur merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah Langsung Kabupaten Lampung Timur tahun 2005.
- (2) RPJMD Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Renstra-SKPD;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun RKPD;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Renja-SKPD.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melaksanakan program dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melaksanakan program Renstra-SKPD yang dituangkan dalam Renja-SKPD.

Pasal 5

RPJMD Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 27 Desember 2005

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd.

SATONO

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 27 Desember 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd.

I WAYAN SUTARJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2005,
NOMOR : 8**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan	2
1.3. Landasan Hukum Penyusunan	3
1.4 Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ...	3
1.5 Pola Pikir dan Proses Penyusunan	6
1.6 Sistematika Penyusunan	7
 BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH	 8
2.1. Konsep Geografis	8
2.1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah	8
2.1.2. Topografi	11
2.1.3. Hidrologi dan Klimatologi	12
2.1.4. Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya	12
2.1.5. Kawasan Lindung dan Kawasan Rawan Bencana	12
2.2. Perekonomian Daerah	13
2.2.1. PDRB	13
2.2.2. Pendapatan Perkapita	17
2.3. Bidang Sosial Budaya Daerah	18
2.3.1. Kependudukan	18
2.3.2. Kondisi Kesehatan	22
2.3.3. Pendidikan	28
2.3.4. Kesejahteraan Sosial	33
2.3.5. Agama	34
2.3.6. Kebudayaan	34
2.4. Bidang Prasarana dan Sarana Daerah	35
2.4.1. Bidang Sarana Prasarana	35
2.4.2. Bidang Perhubungan	41
2.5. Pemerintahan Umum	43

BAB III. ARAH DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	51
3.1. Pengelolaan Keuangan Daerah	51
3.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah	54
3.3. Kebijakan Umum Anggaran	60
3.4 Skenario Perekonomian Daerah 2005 – 2010	61
 BAB IV. ANALISIS ISU STRATEGIS KABUPATEN LAMPUNG TIMUR ...	 70
4.1. Isu Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk	70
4.2. Isu Daya Saing di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan IPTEK	71
4.3. Isu Kesehatan	72
4.4 Infrastruktur Pedesaan Sangat Rendah	72
4.5 Isu Ketertiban dan Ketenteraman	73
4.6 Isu Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan	74
 BAB V. VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	 76
5.1. Visi	76
5.2. Misi	76
5.3. Arah Kebijakan Umum	79
 BAB VI. MATRIKS INDIKASI RENCANA PROGRAM	 84
 BAB VII. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	 109
7.1. Pedoman Transisi	109
7.2. Kaidah Pelaksanaan	109
 BAB VIII. PENUTUP	 111

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Luas Wilayah Lampung Timur Menurut Kecamatan	10
2. PDRB Kabupaten Lampung Timur Tahun 2001—2004 Atas Harga Konstan 1993 – Tanpa Minyak Bumi Menurut Lapangan Usaha (Dalam Juta Rupiah)	13
3. PDRB Kabupaten Lampung Timur Tahun 2001—2004 Atas Harga Berlaku Tanpa Minyak Bumi Menurut Lapangan Usaha (Dalam Juta Rupiah)	14
4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002—2004 Atas Harga Konstan 1993 – Tanpa Minyak Bumi	16
5. Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Lampung Timur Tahun 1999—2003 Atas Harga Berlaku dan Harga Konstan 1993 Dengan dan Tanpa Minyak Bumi (Rupiah)	17
6. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2004 (Jiwa)	19
7. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Timur Menurut Jenis Kelamin danKelompok Umur Tahun 2004 (Jiwa)	20
8. Perbandingan Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004 (Jiwa)	21
9. Persentase Penduduk Menurut Jenis Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2003	22
10. Banyaknya Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya Kabupaten Lampung Timur Tahun 2001—2003	25
11. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat/Cara Berobat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002—2003	24
12. Proporsi Penduduk yang Mengobati Sendiri Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Obat yang Digunakan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2003	25

13. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir Kabupaten Lampung Timur Tahun 2003	27
14. Persentase Balita Usia 2—4 Tahun yang Pernah Disusui Menurut Lamanya Disusui Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002—2003	28
15. Banyaknya Sekolah, Kelas, Guru, dan Murid di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2003/2004	29
16. Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Lampung Timur Tahun 2001—2003	29
17. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Lampung Timur Tahun 2003	30
18. Persentase Penduduk yang Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Lampung Timur Tahun 2003	31
19. Banyaknya SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA Kabupaten Lampung Timur Tahun 2003	32
20. Jumlah KK, KPS, dan KSI di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000—2003	33
21. Penanganan Jalan Secara Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Lampung Timur Selama Tahun 2000 – 2004	37
22. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004	44
23. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Selama Tahun Anggaran 2001—2004	47
24. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004 (Dalam Ribu Rp)	52
25. Arah Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2006—2010 (Dalam Ribu Rp)	56

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.	Grafik PDRB Per Kapitan Tahun 2002—2003 (Rupiah)	18
2.	Distribusi Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Timur Menurut Kelompok Umur, Tahun 2004	21
3.	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat/Cara Berobat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002—2003	24
4.	Proporsi Penduduk yang Mengobati Sendiri Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Obat yang Digunakan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2003	25
5.	Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir Kabupaten Lampung Timur Tahun 2003	27
6.	Persentase Balita Usia 2—4 Taun yang Pernah Disusui Menurut Lamanya Disusui Kabupaten Lampung Timur Tahun 2002—2003	28
7.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Lampung Timur Tahun 2003	30
8.	Persentase Penduduk yang Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Lampung Timur Tahun 2003	31

26. Target dan Realisasi Pendapatan, Belanja, & Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2004	59
27. Proyeksi Skenario Pembangunan Kabupaten Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2004	64
28. Prediksi PDRB Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005- 2010 Atas Harga Konstan 2000 Tanpa Minyak Bumi Menurut Lapangan Usaha - Skenario Realistis	66
29. Prediksi PDRB Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005- 2010 Atas Harga Konstan 2000 Tanpa Minyak Bumi Menurut Lapangan Usaha - Skenario Optimis	67
30. Prediksi Sumbangan Sektor PDRB Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005- 2010 Atas Harga Konstan 2000 Tanpa Minyak Bumi Menurut Lapangan Usaha	69

DAFTAR BAGAN

	Halaman
1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah	5
2. Pola Pikir dan Proses Penyusunan RPJM Prop/Kab/Kota	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan

Salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah pasca Pemerintahan Orde Baru yaitu kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah digulirkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk memperbesar akses terhadap pengambilan keputusan dalam pemerintahan setempat, disamping juga mendekatkan pengambilan keputusan pada rakyat yang akan terkena keputusan tersebut. Esensi dari kebijakan otonomi daerah, adalah transformasi sosok penyelenggaraan pemerintahan. Semula penyelenggaraan pemerintahan sifatnya sangat sentralistik, ke depan sosok tersebut harus dibuat semakin desentralistik. Corak penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik diperlukan agar pemerintahan itu dilakukan dengan mengacu pada kondisi dan keperluan daerah.

Sebagai wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut, yaitu pemerintah mengeluarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut telah ditetapkan bahwa Daerah diberikan kewenangan yang besar untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan daerah. Pemerintah untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang bersifat terpadu menyeluruh, sistematis yang dianggap terhadap perkembangan zaman yang ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Dalam pasal 5 dinyatakan bahwa rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran visi dan program kepala daerah yang berpedoman

kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Program Umum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan rencana tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005 - 2010 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan kabupaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan

RPJM Daerah Kabupaten Lampung Timur disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Propinsi dan APBD Kab/Kota.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJM Daerah ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan Kab. Lamtim.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar

waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pusat.

3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kab. Lamtim.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kab Lamtim yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Menjaga kesinambungan pembangunan Kab. Lamtim yang dilaksanakan perlima tahunan.
6. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD setempat dan sumber pembiayaan APBN.
7. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap aturan kerja perangkat daerah.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan

RPJM Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2010 disusun berdasarkan:

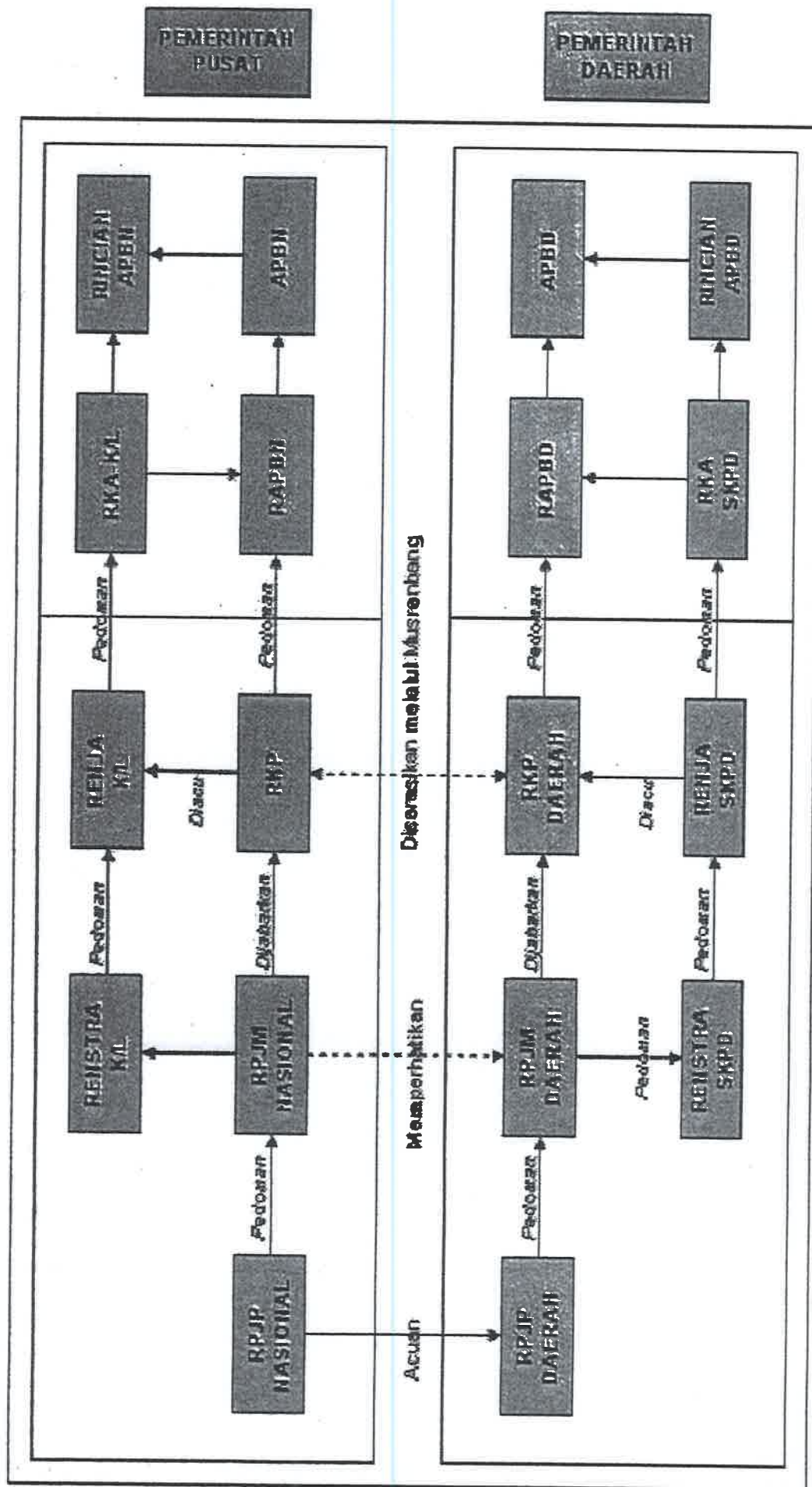
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.4 Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Bab ini menjelaskan keterkaitan antara RPJM dengan rangkaian dokumen perencanaan lainnya, mulai dari RPJP, RPJM, Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD dan APBD.

Selain itu, perujukan RPJM terhadap RPJP dan RPJM pemerintah (bagi propinsi) dan Pemerintah dan propinsi bagi kab/kota, juga perlu diperlihatkan melalui Bagan 1.

BAGAN 1
KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH



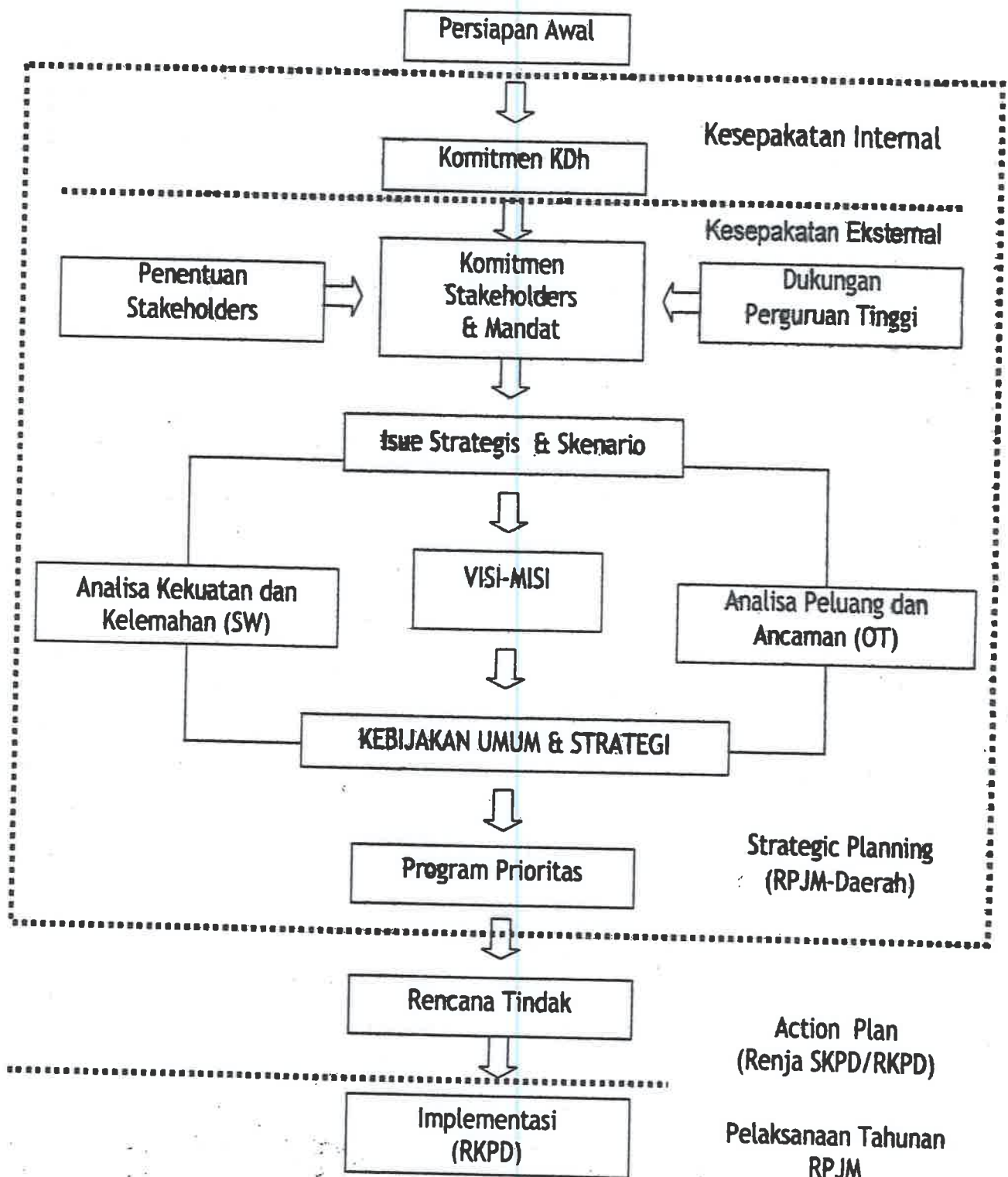
UU No. 17/2003
 MPR

UU No. 25/2004
 SPPN

1.5 Pola Pikir dan Proses Penyusunan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari RPJM Daerah ini serta arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka disusun pola pikir sebagaimana Bagan 2 berikut ini.

BAGAN 2
POLA PIKIR DAN PROSES PENYUSUNAN RPJM PROP/KAB/KOTA



1.6 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Timur 2005 – 2010 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini akan mendeskripsikan latar belakang penyusunan RPJM Lampung Timur, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, hubungan RPJM dengan dokumen perencanaan lainnya, dan pola pikir proses penyusunan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah Lampung Timur saat ini untuk mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang yaitu kondisi geografis, kondisi perekonomian daerah, sosial budaya, prasarana dan sarana daerah serta kondisi pemerintahan umum.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini akan menjelaskan kecenderungan kenaikan dan penurunan pendapatan asli daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan kebijakan umum anggaran yaitu informasi mengenai upaya pengembangan pendapatan daerah dan alokasi belanja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

BAB IV. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Bab ini akan menjelaskan analisis lingkungan strategis daerah baik internal maupun eksternal, dengan tujuan untuk merumuskan arah kebijakan, strategi, dan skala prioritas.

BAB V. VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bab ini akan menguraikan visi, misi dan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah untuk periode lima tahun kedepan/yang akan datang

BAB VI. MATRIKS INDIKASI RENCANA PROGRAM

Bab ini memuat matriks tentang indikasi rencana program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamtim, APBD Provinsi Lampung dan APBN

BAB VII. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJM Kabupaten Lampung Timur 2005-2025 merupakan acuan bagi Pemerintah

Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya. Bab ini menjelaskan pedoman transisi, serta proses, mekanisme dan metode pelaksanaan tahunan atas RPJM Kabupaten Lampung Timur

BAB VIII. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Geografis

2.1.1 Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah

Kabupaten Lampung Timur membentang pada posisi : 105° 15' BT - 106° 20' BT dan 4° 37' LS - 5° 37' LS. Kabupaten Lampung Timur memiliki luas wilayah kurang lebih 5.325,03 km² atau sekitar 15 % dari total wilayah Propinsi Lampung (35.376 km²). Wilayah Kabupaten Lampung Timur sebelumnya merupakan wilayah Pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Sukadana. Ibukota Kabupaten Lampung Timur berkedudukan di Sukadana.

Secara administratif Kabupaten Lampung Timur memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Propinsi banten dan DKI Jakarta.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Raya, Kabupaten Lampung Timur dan Kecamatan Punggur serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

TABEL 1.
LUAS WILAYAH LAMPUNG TIMUR MENURUT KECAMATAN

No	Kecamatan	Luas Area (Ha)	Persentase Terhadap Total
1.	Metro Kibang	7.677,83	1,44
2.	Batanghari	14.887,95	2,80
3.	Sekampung	14.834,39	2,79
4.	Marga Tiga	25.072,94	4,71
5.	Sekampung Udik	33.912,45	6,37
6.	Jabung *)	44.516,88	8,36
7.	Waway Karya	21.107,32	3,96
8.	Pasir sakti	19.393,83	3,64
9.	Labuhan Maringgai	19.498,73	3,66
10.	Gunung Pelindung	7.852,25	1,47
11.	Melinting	13.929,74	2,62
12.	Mataram Baru	7.956,11	1,49
13.	Bandar Sri Bhawono	18.570,67	3,49
14.	Way Jepara	22.926,92	4,31
15.	Braja Selehah	24.760,68	4,65
16.	Pelabuhan Ratu	48.551,22	9,12
17.	Sukadana	75.675,50	14,21
18.	Bumi Agung	7.317,47	1,37
19.	Batanghari Nuban	18.068,84	3,39
20.	Pekalongan	10.012,81	1,88
21.	Raman Utara	16.136,91	3,03
22.	Purbolinggo	22.203,37	4,17
23.	Way Bungur	37.638,19	7,07
Lampung Timur		532.503,00	100,00

Sumber : BPN Kabupaten Lampung Timur

*) Dimekarkan menjadi Kecamatan dan Jabung dan Kecamatan Marga Sekampung

Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 24 wilayah kecamatan, 233 desa dan 5 kelurahan. Rincian luas wilayah Kabupaten Lampung Timur menurut kecamatan tahun 2004 tertera pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kecamatan Sukadana memiliki wilayah yang terluas dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Lampung Timur.

2.1.2 Topografi

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Lampung Timur dapat dibagi ke dalam 5 (lima) satuan ruang, yaitu: (a) daerah topografi berbukit sampai bergunung; (b) berombak sampai bergelombang; (c) dataran alluvial; (d) dataran rawa pasang surut; (e) daerah aliran sungai (river basin).

Daerah topografi berbukit sampai bergunung terdiri dari lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25% dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut (dpl). Daerah ini terdapat di Kecamatan Jabung, Sukadana, Sekampung Udik, dan Labuhan Maringgai.

Daerah topografi berombak sampai bergelombang memiliki ciri-ciri khusus, terdiri dari bukit-bukit sempit dengan kemiringan antara 8-15% dan ketinggian antara 50 meter -200 meter dpl.

Daerah dataran alluvial merupakan daerah yang cukup luas meliputi kawasan pantai pada bagian timur Kabupaten Lampung Timur dan daerah-daerah pada sepanjang sungai juga merupakan sebagian hilir dari Way Seputih dan Way Pengubuan. Ketinggian rata-rata daerah ini berkisar antara 25—75 m dpl dengan kemiringan 0—3%.

Daerah dataran rawa pasang surut terletak di sepanjang Pantai Timur dengan ketinggian 0,5—1,0 meter dpl yang pengendapan airnya menurut perubahan pasang surut air laut. Daerah aliran sungai meliputi Way Seputih, Way Sekampung, dan Way Jepara.

Selain itu, terdapat 6 buah pulau-pulau besar dan kecil, yaitu Pulau Segama Besar, Pulau Segama Kecil, Pulau Basa, Pulau Gosong Serdang, Pulau Gosong Layang – Layang, dan Pulau Karang Pematang.

2.1.3 Hidrologi dan Klimatologi

Iklim Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Smith dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim B, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan yaitu pada bulan Desember-Juni dengan temperatur rata-rata 24-34°C. Curah hujan rata-rata tahunan sebesar 2000-2500 mm. Jenis tanah di Kabupaten Lampung Timur umumnya didominasi oleh tanah jenis podsolik merah kuning, podsolik kekuning-kuningan, latosol coklat kemerahan, latosol merah, hidromorf kelabu, alluvial hidromorf, regosol coklat kekuningan, latosol merah kekuningan, alluvial coklat kelabu dan latosol merah.

2.1.4 Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya

Lampung Timur memiliki luas wilayah 5.325,03 km². Berdasarkan data LTDA Tahun 2004 dari luas wilayah Kabupaten Lampung Timur sebesar 5.325,03 km² penggunaan lahannya terdiri dari lahan sawah seluas 52.601 ha atau 9,88 %, perkebunan seluas 51.481,36 ha atau 9,67 %, kawasan hutan lindung seluas 22.292,5 ha atau 4,19 %, kawasan hutan suaka margasatwa seluas 125.621,3 ha atau 23,59 %, kawasan hutan produksi seluas 14.663,36 ha atau 2,75 % dan penggunaan lainnya seluas 260.518,33 ha atau 49,92%.

2.1.5 Kawasan Lindung dan Kawasan Rawan Bencana

Luas kawasan hutan di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan data LTDA Tahun 2004 Kabupaten Lampung Timur tercatat seluas 162577,16 ha atau 30,53% dari total luas Wilayah Kabupaten Lampung Timur. Menu-rut statusnya, luas areal kawasan hutan ini terdiri atas: Hutan Lindung seluas 22.292,5 (4,19 %), Hutan Suaka Margasatwa seluas 125.621,3 ha (23,59%), dan Hutan Produksi seluas 260.518,33 ha (2,75 %).

Daerah rawan bencana, termasuk bencana alam dan konflik sosial, tersebar cukup potensial di Kabupaten Lampung Timur. Daerah yang berpotensi mengalami bencana banjir di wilayah Kabupaten Lampung Timur berada di lokasi sekitar Kecamatan Labuhan Maringgai. Potensi bencana kebakaran berada di wilayah Taman Nasional Way Kambas, Potensi bencana tsunami dan angin ribut terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Jabung (Lampung Timur).

Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 24 wilayah kecamatan, 233 desa dan 5 kelurahan. Rincian luas wilayah Kabupaten Lampung Timur menurut kecamatan tahun 2004 tertera pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kecamatan Sukadana memiliki wilayah yang terluas dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Lampung Timur.

2.1.2 Topografi

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Lampung Timur dapat dibagi ke dalam 5 (lima) satuan ruang, yaitu: (a) daerah topografi berbukit sampai bergunung; (b) berombak sampai bergelombang; (c) dataran alluvial; (d) dataran rawa pasang surut; (e) daerah aliran sungai (river basin).

Daerah topografi berbukit sampai bergunung terdiri dari lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25% dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut (dpl). Daerah ini terdapat di Kecamatan Jabung, Sukadana, Sekampung Udik, dan Labuhan Maringgai.

Daerah topografi berombak sampai bergelombang memiliki ciri-ciri khusus, terdiri dari bukit-bukit sempit dengan kemiringan antara 8-15% dan ketinggian antara 50 meter -200 meter dpl.

Daerah dataran alluvial merupakan daerah yang cukup luas meliputi kawasan pantai pada bagian timur Kabupaten Lampung Timur dan daerah-daerah pada sepanjang sungai juga merupakan sebagian hilir dari Way Seputih dan Way Pengubuan. Ketinggian rata-rata daerah ini berkisar antara 25—75 m dpl dengan kemiringan 0—3%.

Daerah dataran rawa pasang surut terletak di sepanjang Pantai Timur dengan ketinggian 0,5—1,0 meter dpl yang pengendapan airnya menurut perubahan pasang surut air laut. Daerah aliran sungai meliputi Way Seputih, Way Sekampung, dan Way Jepara.

Selain itu, terdapat 6 buah pulau-pulau besar dan kecil, yaitu Pulau Segama Besar, Pulau Segama Kecil, Pulau Basa, Pulau Gosong Serdang, Pulau Gosong Layang – Layang, dan Pulau Karang Pematang.

2.1.3 Hidrologi dan Klimatologi

Iklim Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Smith dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim B, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan yaitu pada bulan Desember-Juni dengan temperatur rata-rata 24-34°C. Curah hujan rata-rata tahunan sebesar 2000-2500 mm. Jenis tanah di Kabupaten Lampung Timur umumnya didominasi oleh tanah jenis podsolik merah kuning, podsolik kekuning-kuningan, latosol coklat kemerahan, latosol merah, hidromorf kelabu, alluvial hidromorf, regosol coklat kekuningan, latosol merah kekuningan, alluvial coklat kelabu dan latosol merah.

2.1.4 Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya

Lampung Timur memiliki luas wilayah 5.325,03 km². Berdasarkan data LTDA Tahun 2004 dari luas wilayah Kabupaten Lampung Timur sebesar 5.325,03 km² penggunaan lahannya terdiri dari lahan sawah seluas 52.601 ha atau 9,88 %, perkebunan seluas 51.481,36 ha atau 9,67 %, kawasan hutan lindung seluas 22.292,5 ha atau 4,19 %, kawasan hutan suaka margasatwa seluas 125.621,3 ha atau 23,59 %, kawasan hutan produksi seluas 14.663,36 ha atau 2,75 % dan penggunaan lainnya seluas 260.518,33 ha atau 49,92%.

2.1.5 Kawasan Lindung dan Kawasan Rawan Bencana

Luas kawasan hutan di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan data LTDA Tahun 2004 Kabupaten Lampung Timur tercatat seluas 162577,16 ha atau 30,53% dari total luas Wilayah Kabupaten Lampung Timur. Menu-rut statusnya, luas areal kawasan hutan ini terdiri atas: Hutan Lindung seluas 22.292,5 (4,19 %), Hutan Suaka Margasatwa seluas 125.621,3 ha (23,59%), dan Hutan Produksi seluas 260.518,33 ha (2,75 %).

Daerah rawan bencana, termasuk bencana alam dan konflik sosial, tersebar cukup potensial di Kabupaten Lampung Timur. Daerah yang berpotensi mengalami bencana banjir di wilayah Kabupaten Lampung Timur berada di lokasi sekitar Kecamatan Labuhan Maringgai. Potensi bencana kebakaran berada di wilayah Taman Nasional Way Kambas, Potensi bencana tsunami dan angin ribut terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Jabung (Lampung Timur).

Sejak tahun 2001 sampai 2004 Sektor Pertanian memberikan sumbangan yang dominan pada PDRB tanpa minyak bumi yakni sebesar 40,91 % tahun 2004 walaupun semakin menurun dari 49,72% tahun 2001 yang berarti bahwa Sektor Pertanian merupakan sektor dominan dan memiliki peranan terbesar dalam menyumbangkan Nilai Tambah Bruto (NTB). Transformasi ekonomi terus berproses yang ditunjukkan oleh semakin menurunnya pangsa pertanian sementara itu pangsa industri dan jasa-jasa terus meningkat sejak tahun 2001 hingga 2004.

Kecenderungan transformasi ekonomi ini perlu dijaga agar arahnya tepat dan benar yakni perkembangan aktivitas ekonomi diarahkan pada pengembangan industri dan jasa yang mampu meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian (pangan dan hortikultura, kebun, kehutanan, peternakan dan perikanan), sehingga nilai tambah yang tercipta dapat dinikmati oleh petani yang merupakan kelompok terbesar dari penduduk Kabupaten Lampung Timur. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga diikuti dengan pemerataan pendapatan masyarakat.

Sektor lainnya yang memberikan sumbangan NTB yang cukup besar setelah sektor pertanian adalah sektor Perdagangan Hotel dan Restoran. Sektor ini menyumbang sebesar antara 17 - 18 % dalam pembentukan PDRB Lampung Timur. Sektor-sektor lainnya belum memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam perekonomian Kabupaten Lampung Timur.

Pertumbuhan masing-masing sektor di Kabupaten Lampung Timur tahun 2001 – 2004 dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut.

TABEL 4.
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2002 – 2004 ATAS HARGA KONSTAN 2000
TANPA MINYAK BUMI

No	LAPANGAN USAHA	2001	2002	(%)	2003	(%)	2004	(%)
1	Pertanian	1.442.490	1.486.468	3,05	1.563.839	5,21	1.611.890	3,0
2	Pertambangan & Penggalian	29.704	31.055	4,55	32.555	4,83	33.814	3,8
3	Industri	173.325	179.602	3,62	187.807	4,57	199.054	5,9
4	Listrik, Gas & Air Minum	5.254	5.848	11,31	5.972	2,12	5.880	-1,5
5	Konstruksi	136.345	139.195	2,09	143.385	3,01	149.063	3,9
6	Perdagangan, Hotel & Rest.	439.739	467.543	6,32	483.102	3,33	513.594	6,3
7	Pengangkutan & Komunikasi	59.575	62.840	5,48	64.317	2,35	66.314	3,10
8	Keu., Sewa & Jasa Persh.	89.288	92.914	4,06	97.519	4,96	104.525	7,18
9	Jasa – Jasa	133.316	138.277	3,72	142.834	3,30	150.557	5,41
	PDRB =	2.509.036	2.603.742	3,77	2.721.330	4,52	2.834.691	4,17

Sumber : 1. PDRB Kabupaten Lampung Timur 1999 - 2004, BPS Kab. Lampung Timur
2. Data diolah.

Tabel 4 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur tahun 2001 sampai 2004 cenderung meningkat dari 3,77 % tahun 2002 menjadi 4,17 % tahun 2004. Sektor yang tergolong tumbuh cepat adalah Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan memiliki laju pertumbuhan tertinggi yakni meningkat dari 4,06 % tahun 2002 menjadi 7,18 % tahun 2004 sedangkan sektor dominan yakni Sektor Pertanian memiliki pertumbuhan yang relatif rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini wajar mengingat aktivitas sektor ini sangat tergantung kepada faktor alam dan karena rendahnya tingkat penanaman modal di sektor ini. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur ini akan berpengaruh kepada tingkat pendapatan per kapita penduduk. Jika laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk berarti bahwa pembangunan di Lampung Timur secara makro-regional telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

2.2.2 Pendapatan Perkapita

Naiknya PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan jika disertai dengan pengendalian jumlah penduduk, maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita. PDRB perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Kondisi pendapatan perkapita penduduk Lampung Timur tahun 1999 sampai 2003 menurut harga berlaku dan harga konstan baik dengan maupun tanpa minyak bumi tertera pada Tabel 5.

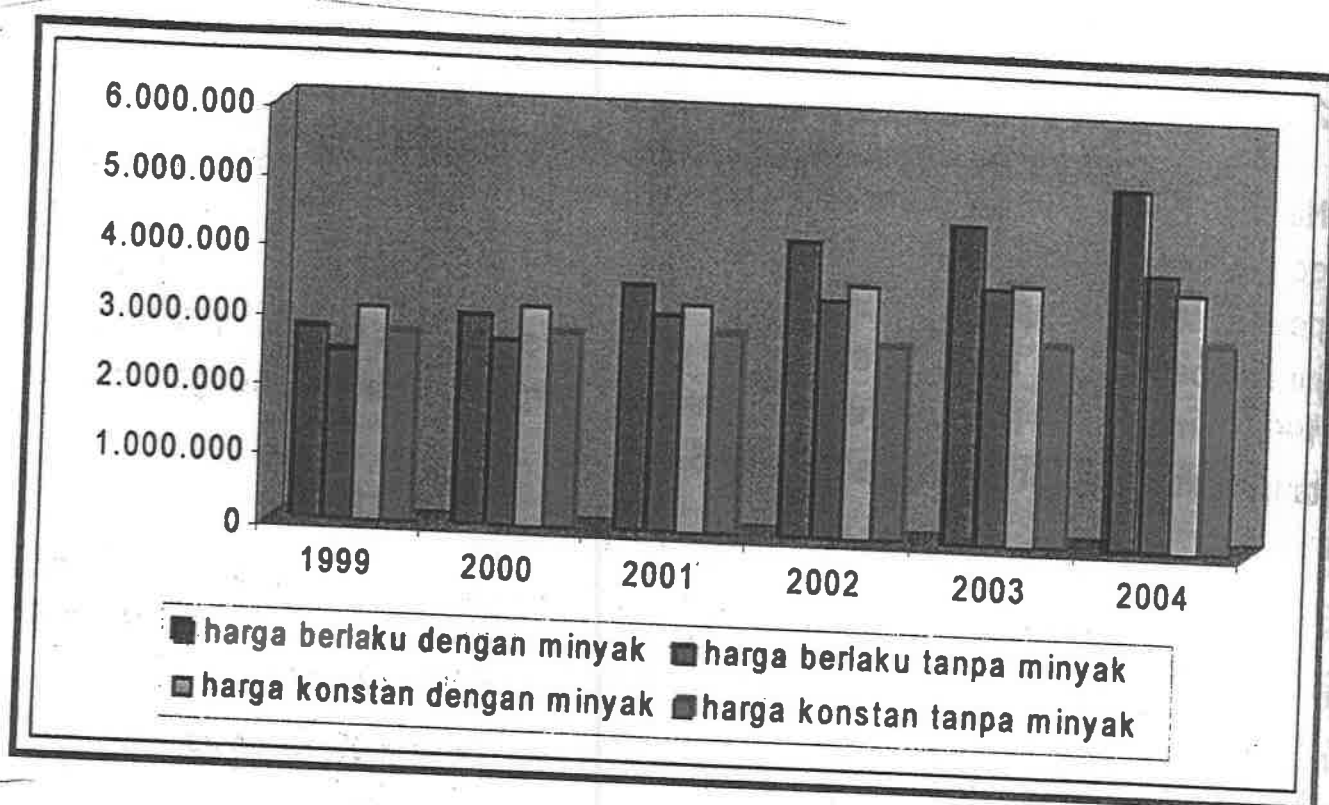
TABEL 5.
PENDAPATAN PERKAPITAN PENDUDUK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 1999 – 2004 ATAS HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN 2000
DENGAN DAN TANPA MINYAK BUMI (Rupiah)

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan 2000	
	dengan minyak	tanpa minyak	dengan minyak	tanpa Minyak
1999	2.642.440	2.315.812	2.975.704	2.630.492
2000	2.892.553	2.540.363	3.053.532	2.681.339
2001	3.406.902	3.015.330	3.182.725	2.772.475
2002	4.147.486	3.315.651	3.515.537	2.707.127
2003	4.495.952	3.575.164	3.645.372	2.773.229
2004	5.064.287	3.865.287	3.608.758	2.879.977

Sumber : PDRB Kabupaten Lampung Timur 1999 - 2004, BPS Kab. Lampung Timur

Selama kurun waktu 1999-2004, PDRB per kapita Kabupaten Lampung Timur baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan peningkatan. PDRB per kapita dengan minyak bumi atas dasar harga berlaku 1999 mencapai Rp 2.642.440,00 dan pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp 5.064.287,00. Sedangkan PDRB per kapita tanpa minyak bumi tahun 1999 sebesar Rp 2.315.812,00 dan pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp 3.865.287,00.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000, dengan minyak bumi terus meningkat, jika tahun 1999 PDRB per kapita sebesar Rp 2.975.704,00 dan pada tahun 2004 telah meningkat menjadi Rp 3.608.758,00 sedangkan PDRB per kapita tanpa minyak bumi meningkat dari Rp 2.630.492,00 pada tahun 1999 menjadi Rp 2.879.977,00 pada tahun 2004.



GAMBAR 1
GRAFIK PDRB PER KAPITA TAHUN 2002-2004 (Rp.)

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 menggambarkan peningkatan pendapatan per penduduk, dengan indikator ekonomi ini antara lain dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi oleh pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

2.3 Bidang Sosial Budaya Daerah

2.3.1 Kependudukan

Penduduk memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun nasional. Penduduk merupakan subjek sekaligus sebagai objek dalam pembangunan. Sebagai subjek pembangunan karena yang melaksanakan pembangunan adalah penduduk itu sendiri dan sebagai objek karena sesuatu yang dibangun berdampak pada penduduknya.

Kabupaten Lampung Timur mempunyai persebaran penduduk yang tidak merata secara geografis, hal tersebut menjadi ciri daerah kabupaten yang terletak di bagian timur Propinsi Lampung ini. Tingkat kemajuan di berbagai daerah tentu berkaitan

dengan aspek kultur, historis dan ekologis serta dukungan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Persebaran penduduk kabupaten Lampung Timur masih berorientasi pada potensi pertanian dan sedikit bergeser pada agro industri. Akibatnya terjadi pola pergeseran yang kurang ideal dengan kepadatan penduduk tertinggi pada daerah pusat industri dan akses yang baik.

Komposisi penduduk kabupaten Lampung Timur begitu heterogen. yang terdiri dari penduduk lama dan penduduk baru, hingga terjadi transformasi sosial antara keduanya yang menyebabkan timbulnya daya saing yang positif bagi penduduk lama untuk meningkatkan harkat hidupnya.

TABEL 6.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN
KECAMATAN TAHUN 2004 (jiwa)

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Metro Kibang	9.739	8.840	18.579
2.	Batanghari	26.003	24.195	50.198
3.	Sekampung	29.316	27.229	56.545
4.	Marga Tiga	22.650	20.606	43.256
5.	Sekampung Udik	34.029	31.150	65.179
6.	Jabung	36.897	33.983	70.880
7.	Pasir sakti	17.635	16.106	33.741
8.	Waway Karya	18.160	17.092	35.252
9.	Labuhan Maringgai	32.640	30.086	62.726
10.	Mataram Baru	13.541	12.406	25.947
11.	Bandar Sri Bhawono	21.903	19.472	41.375
12.	Melinting	13.133	11.830	24.963
13.	Gunung Pelindung	11.051	10.055	21.106
14.	Way Jepara	25.123	22.980	48.103
15.	Braja-Selebah	10.853	9.951	20.803
16.	Pelabuhan Ratu	20.473	18.442	38.915
17.	Sukadana	32.268	29.428	61.696
18.	Bumi Agung	8.544	7.916	16.460
19.	Batanghari Nuban	20.822	19.005	39.827
20.	Pekalongan	21.453	20.168	41.621
21.	Raman Utara	17.844	16.350	34.193
22.	Purbolinggo	19.261	18.137	37.398
23.	Way Bungur	10.779	9.840	20.619
Jumlah		474.123	435.266	909.389

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur

Pada Tahun 2004 jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur mencapai 909.38 jiwa (Berdasarkan LTDA 2004). Rata-rata kepadatan penduduk Lampung Timur sebesar 171 jiwa/km², dengan kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Pekalongan dan terendah di Kecamatan Way Bungur (Tabel 6).

Pada tahun 2004 jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Lampung Timur sebesar 558.395 jiwa atau 61,4 % dari jumlah penduduk, sedangkan usia tidak produktif berjumlah 350,994 jiwa atau 38,6 % dari jumlah penduduk (Tabel 7).

TABEL 7.
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2004 (jiwa)

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	00-04	39,218	37,172	76,390
2	05-09	53,237	41,905	95,142
3	10-14	47,609	50,884	98,493
4	15-19	48,581	38,835	87,416
5	20-24	45,179	37,914	83,093
6	24-29	40,063	39,321	79,384
7	30-34	40,728	34,511	75,239
8	35-39	25,685	32,106	57,791
9	40-44	30,622	32,439	63,061
10	45-49	24,099	19,750	43,849
11	50-54	24,969	19,187	44,156
12	55-59	12,510	11,896	24,406
13	60-64	11,640	16,117	27,757
14	65-69	10,054	9,363	19,417
15	70-74	11,896	7,854	19,750
16	75+	8,033	6,012	14,045
Jumlah		474,123	435,266	909,389

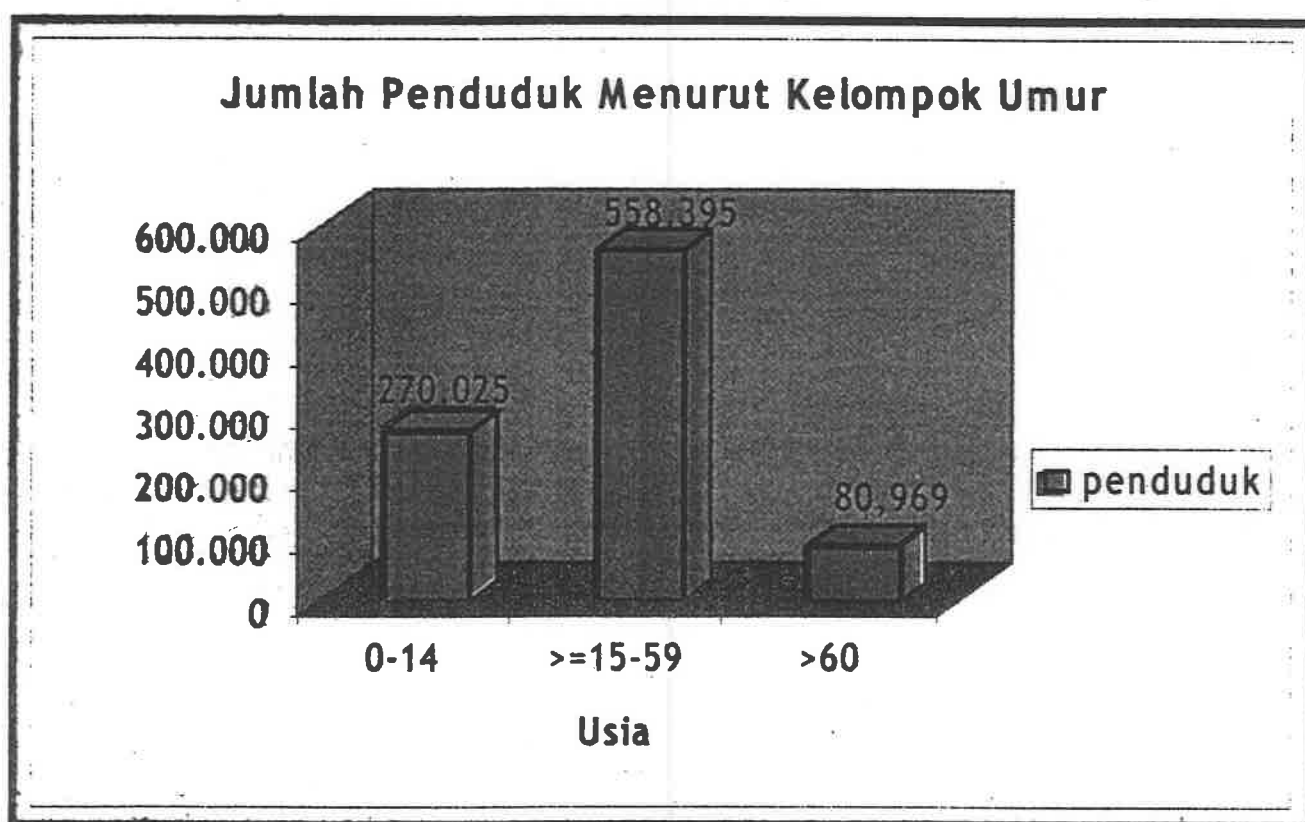
Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur

Secara lebih terperinci komposisi penduduk produktif dan tidak produktif dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini.

Distribusi persentase Penduduk Kabupaten Lampung Timur berdasarkan struktur umur dapat dilihat pada Gambar 2.

TABEL 8.
PERBANDINGAN PENDUDUK USIA PRODUKTIF DAN TIDAK PRODUKTIF
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2004 (jiwa)

No	Kelompok Umur	Jumlah		Keterangan
		Jiwa	Persentase (%)	
1	0-14	270,025	29.69	usia tidak produktif
2	15-59	558,395	61.40	usia produktif
3	>60	80,969	8.90	usia tidak produktif
Jumlah		909,389	100.00	



GAMBAR 2
DISTRIBUSI JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
MENURUT KELOMPOK UMUR, TAHUN 2004

Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2001 adalah sebesar 702.469 jiwa, tahun 2003 mencapai 747.025 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 6,34 % dan pada tahun 2004 sebesar 737.857 mengalami penurunan 1,24 %. Jumlah angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2003 mengalami kenaikan dari 413.600 jiwa pada tahun 2001 menjadi 460.736 jiwa pada tahun 2003 dan pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 419.046 jiwa.

2.3.2. Kondisi Kesehatan

Kualitas hidup suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Berdasarkan data Survei Sosial. Ekonomi Nasional tahun 2003 terdapat 83,86 persen penduduk yang melakukan upaya pengobatan sendiri. Upaya pengobatan sendiri lebih banyak dilakukan laki – laki (84,73 persen) dibanding perempuan (83,00 persen). Survei yang sama menunjukkan bahwa upaya berobat jalan dan rawat inap lebih banyak dilakukan perempuan (50,83 persen) dibanding laki – laki (49,17 persen).

Tiga jenis keluhan terbanyak yang dialami penduduk adalah pilek (14,94 persen), batuk (13,17 persen) dan panas (4,63 persen). Seperti terlihat pada Tabel 9 dan Gambar 3 berikut ini.

Selain itu, sektor kesehatan dalam pembangunan merupakan faktor pen-ting dalam keberhasilan pembangunan, pembangunan di bidang kesehat-an diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

TABEL 9.
PERSENTASE PENDUDUK MENURUT JENIS KELUHAN KESEHATAN
DALAM SEBULAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2003

No	Jenis Keluhan Kesehatan	L	P	L+P
1	Pilek	15.08	14.79	14.94
2	Batuk	13.35	12.98	13.17
3	Panas	4.32	4.95	4.63
4	Sakit Kepala Berulang	2.34	3.81	3.05
5	Diare	0.70	0.79	0.75
6	Asma	0.42	0.93	0.66
7	Napas Sesak	0.32	0.82	0.56
8	Sakit Gigi	0.26	0.72	0.48
9	Sakit Kuning	0.26	0.27	0.26
10	Campak	0.13	0.00	0.07
11	Lumpuh	0.06	0.14	0.10
12	Pikun	0.10	0.21	0.15
13	Telinga Berair	0.06	0.07	0.07
14	Kecelakaan	0.06	0.07	0.07
15	Lainnya	9.52	8.90	9.22
Jumlah		46.97	49.45	48.17

Sumber : SUSENAS

Diantara ukuran kesejahteraan adalah tingkat kesehatan masyarakat, semakin tinggi tingkat kesehatan mencerminkan tingkat pelayanan kesehatan yang semakin baik. Indikator kualitas sumber daya manusia adalah merupakan tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani. Tabel 10 menunjukkan Jumlah sarana dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 10 dan Gambar 3 menunjukkan presentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat maupun cara berobat. Praktek dokter dimanfaatkan oleh 23,46 % penduduk yang berobat jalan. Jumlah ini menurun 15,79 % dari keadaan tahun 2002 sedangkan puskesmas dan puskesmas pembantu dimanfaatkan oleh lebih dari ¼ penduduk yang berobat jalan, na-mun jumlah ini menurun 8,47 % dibandingkan keadaan pada tahun 2002.

TABEL 10.
BANYAKNYA FASILITAS DAN TENAGA KESEHATAN MENURUT JENISNYA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2001-2003

No	Fasilitas / Tenaga Kesehatan	2001	2002	2003
1.	Rumah Sakit Umum	0	1	1
2.	Puskesmas	115	119	118
3.	Dokter Umum	30	32	58
4.	Dokter Gigi	11	10	8
5.	Bidan Desa	147	183	214
6.	Perawat	165	194	190
7.	Apotek	1	1	1
8.	Toko Obat	8	11	10

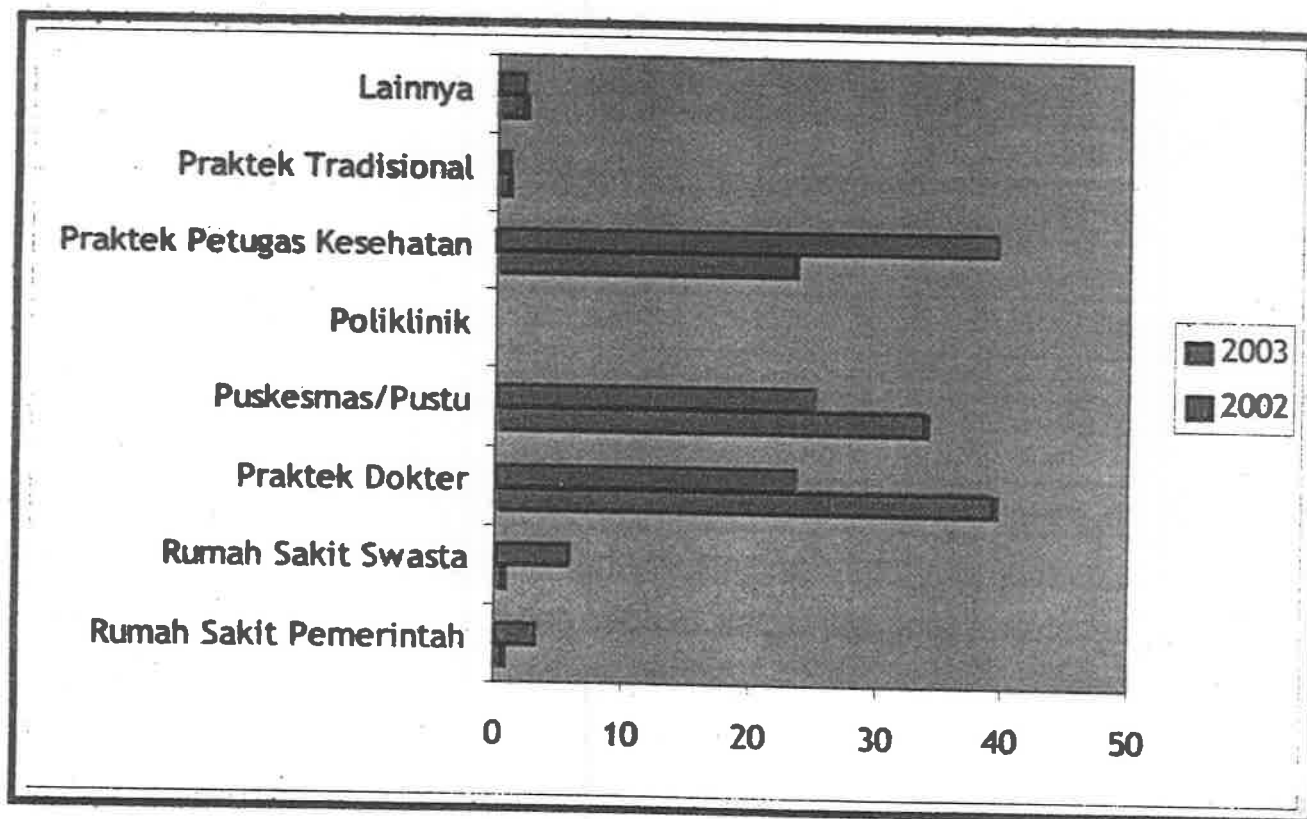
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur

Diperkirakan penduduk yang biasanya berobat jalan ke dokter dan puskesmas maupun puskesmas pembantu, selama setahun terakhir lebih memilih berobat jalan ke petugas kesehatan yang meningkat 16,46 % dari keadaan tahun 2002 dan Rumah Sakit Swasta yang meningkat 5,01 % dibandingkan keadaan tahun 2002 (Tabel 11). Faktor kemudahan mengakses fasilitas kesehatan, jumlah tenaga medis, efektivitas dan biaya untuk pengobatan menjadi alasan utama pemanfaatan fasilitas dan tenaga kesehatan.

TABEL 11.
PERSENTASE PENDUDUK YANG BEROBAT JALAN
MENURUT TEMPAT / CARA BEROBAT
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2002-2003

No	Tempat/Cara Berobat	2002	2003
1	Rumah Sakit Pemerintah	0.41	3.07
2	Rumah Sakit Swasta	0.59	5.6
3	Praktek Dokter	39.25	23.46
4	Puskesmas/Pustu	33.64	25.17
5	Poliklinik	0.15	0.00
6	Praktek Petugas Kesehatan	23.14	39.6
7	Praktek Tradisional	0.74	1.02
8	Lainnya	2.08	2.08
Jumlah		100.00	100.00

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur

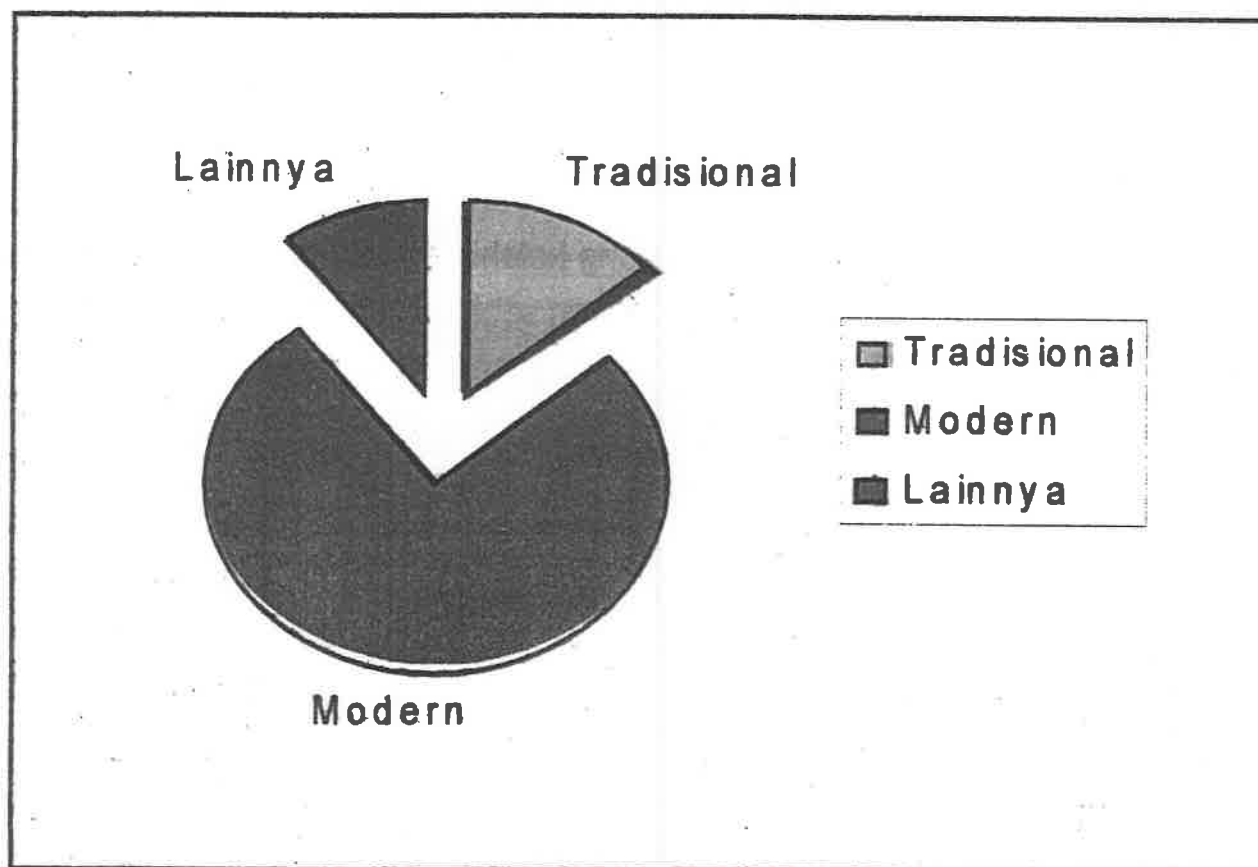


GAMBAR 3.
PERSENTASE PENDUDUK YANG BEROBAT JALAN MENURUT TEMPAT / CARA
BEROBAT DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2002-2003

TABEL 12.
PROPORSI PENDUDUK YANG MENGobati SENDIRI SELAMA SEBULAN
TERAKHIR MENURUT JENIS KELAMIN DAN JENIS OBAT YANG DIGUNAKAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2003

No	Jenis Obat	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tradisional	14.24	12.58	13.42
2	Modern	75.47	77.60	76.52
3	Lainnya	10.29	9.82	10.06
Jumlah		100.00	100.00	100.00

Sumber : SUSENAS



GAMBAR 4.
PROPORSI PENDUDUK YANG MENGobati SENDIRI SELAMA SEBULAN
TERAKHIR MENURUT JENIS KELAMIN DAN JENIS OBAT YANG DIGUNAKAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2003

Lebih dari $\frac{3}{4}$ jumlah penduduk yang mengobati sendiri menggunakan obat modern, sedangkan obat tradisional dan obat lainnya digunakan oleh kurang dari $\frac{1}{4}$ jumlah penduduk yang mengobati sendiri seperti pada Tabel 12 dan Gambar 4.

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, juga dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum.

Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dianggap lebih baik dibanding yang ditolong oleh dukun, famili atau lainnya. Jumlahnya sebagai penolong kelahiran pertama maupun terakhir lebih dari $\frac{3}{4}$ jumlah penolong kelahiran pertama atau terakhir. Dan sisanya kurang dari $\frac{1}{4}$ jumlah penolong kelahiran adalah dukun. Hal ini menunjukkan tingkat kesehatan ibu dan anak di kabupaten Lampung Timur sudah cukup baik.

Secara umum sebagian besar penolong kelahiran baik pertama maupun terakhir adalah Bidan, yaitu 71.38 % untuk penolong kelahiran pertama dan 70.98 % untuk penolong kelahiran terakhir. Begitu pula Dukun sebagai penolong kelahiran pertama sebanyak 23.87 % dan 23.48 % untuk penolong kelahiran terakhir.

Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan Balita yang kelahirannya mula-mula ditolong oleh Bidan/Dukun kemudian penanganan selanjutnya oleh dokter atau paramedis lain seperti terlihat pada Tabel 13 dan Gambar 6 bahwa Dokter atau Paramedis lain meningkat sekitar 0.4 % untuk penolong kelahiran terakhir.

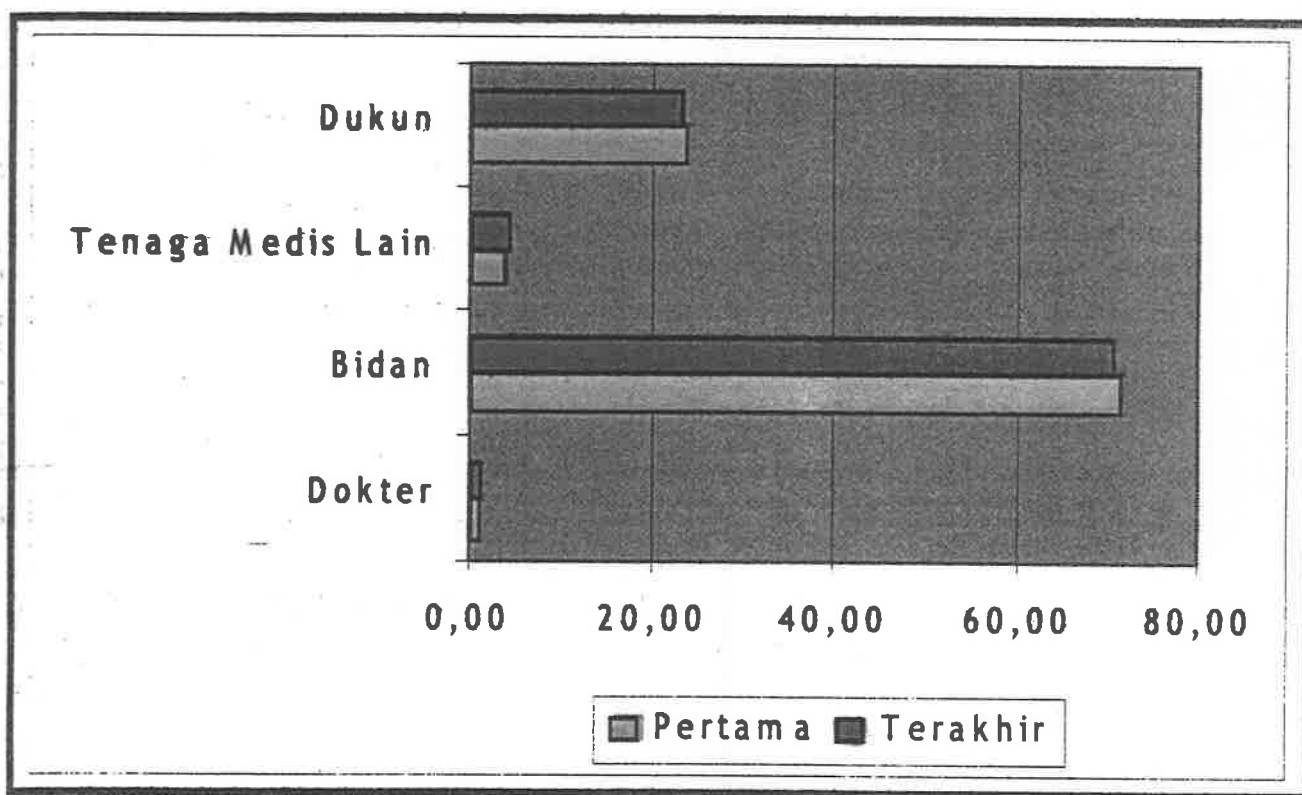
Salah satu faktor penting untuk perkembangan anak adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI). ASI merupakan zat yang sempurna untuk pertumbuhan bayi dan dapat mempercepat pertumbuhan berat badan. Selain itu ASI juga mengandung Zat Anti Body atau kekebalan tubuh alami sehingga dapat menolak/mencegah penyakit serta dapat memberi kepuasan dan mendekatkan hati ibu dan anak sebagai sarana menjalin hubungan kasih sayang. Banyak ibu yang telah menyadari pentingnya ASI bagi bayi serta menyadari bahwa salah satu kodratnya sebagai seorang Ibu adalah menyusui anaknya.

TABEL 13.
PERSENTASE BALITA MENURUT PENOLONG KELAHIRAN PERTAMA
DAN TERAKHIR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2003

No	Penolong Kelahiran	Pertama	Terakhir
1	Dokter	0.82	1.21
2	Bidan	71.38	70.98
3	Tenaga Medis Lain	3.93	4.33
4	Dukun	23.87	23.48
Jumlah		100.00	100.00

Sumber : SUSENAS

Rata-rata lama pemberian ASI kepada bayi atau anak-anak terlihat cukup tinggi. Dari balita berumur 2-4 tahun terlihat bahwa yang disusui = 24 bulan meningkat hampir 2.5 % dan Balita yang disusui <12 bulan menurun hampir 3% dibandingkan tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu-ibu di Kabupaten Lampung Timur semakin menyadari pentingnya ASI bagi Bayi seperti terlihat pada Tabel 14 dan Gambar 6 berikut ini.

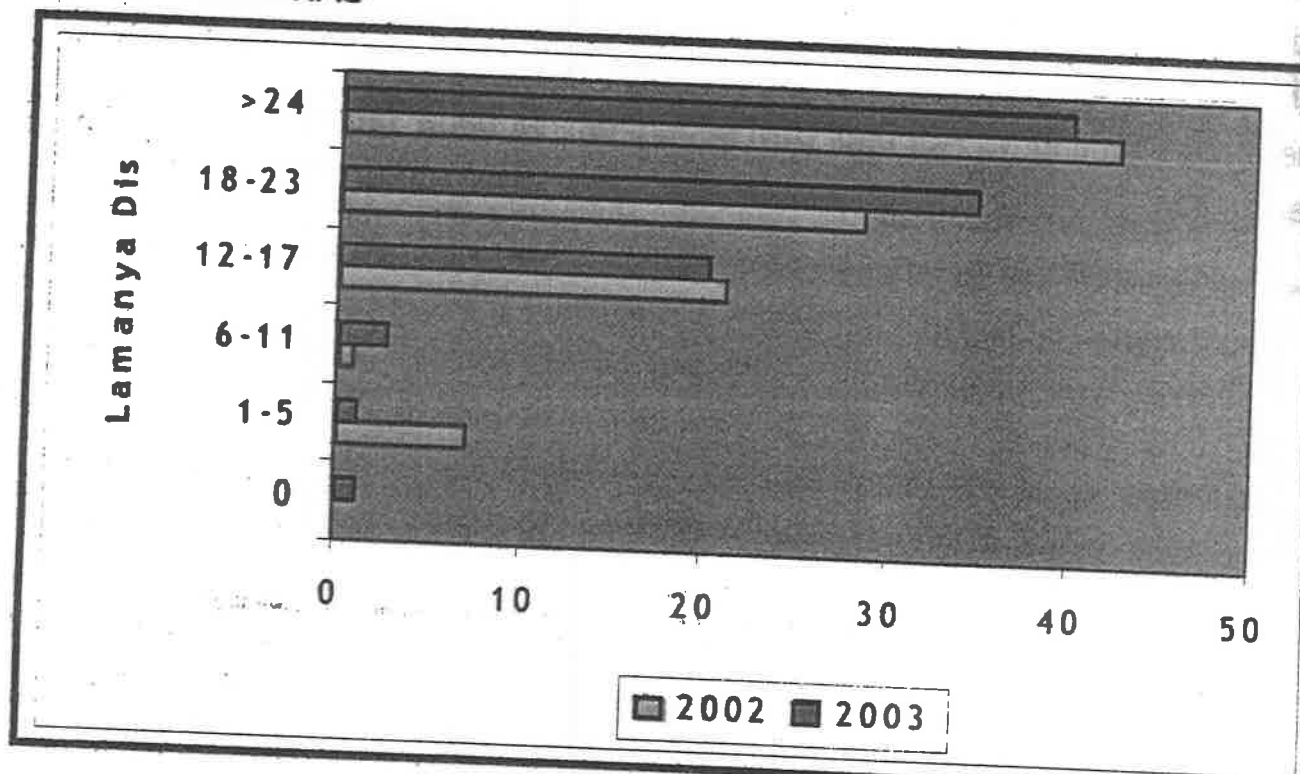


GAMBAR 5.
PERSENTASE BALITA MENURUT PENOLONG KELAHIRAN PERTAMA DAN
TERAKHIR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2003

TABEL 14.
PERSENTASE BALITA USIA 2-4 TAHUN YANG PERNAH DISUSUI
MENURUT LAMANYA DISUSUI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2002-2003

Lama Disusui (Bulan)	2002	2003
0	-	1.1
1-5	6.93	1.1
6-11	0.93	2.7
12-17	21.08	20.2
18-23	28.62	34.8
>24	42.44	39.9
Jumlah	100	100

Sumber : SUSENAS



GAMBAR 6.
PERSENTASE BALITA USIA 2-4 TAHUN YANG PERNAH DISUSUI MENURUT
LAMANYA DISUSUI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2002-2003

2.3.3. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas. Tingkat produktivitas dan kompetisi seseorang sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang cerdas dan trampil yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif. Berdasarkan

data BPS Kabupaten Lampung Timur 2003 / 2004, fasilitas pendidikan yang tersedia sebagai berikut : TK swasta 351 buah, SD negeri 540 buah, SD swasta 22 buah, SMP negeri 35 buah, SMP swasta 91 buah, SMU negeri 10 buah, SMU swasta 30 buah, SMK negeri 1 buah dan SMK swasta 21 buah.

TK swasta mampu menampung 12.317 murid, SD negeri mampu menampung 108.768 murid, SD swasta mampu menampung 2.413 murid, SMP negeri mampu menampung 14.264 murid, SMP swasta mampu menampung 17.874 murid, SMU negeri mampu menampung 4.670 murid, SMU swasta mampu menampung 5.852 murid, SMK negeri mampu menampung 75 murid dan SMK swasta mampu menampung 3980 murid (Tabel 15).

TABEL 15.
BANYAKNYA SEKOLAH, KELAS, GURU DAN MURID
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2003/2004

No	Jenis Sekolah	Sekolah	Kelas	Guru	Murid
1.	TK Negeri	-	-	-	-
2.	TK Swasta	351	606	1.331	12.317
3.	SD Negeri	540	4.066	5.739	108.768
4.	SD Swasta	22	121	153	2.413
5.	SMP Negeri	38	385	1.045	14.844
6.	SMP Swasta	91	668	1.537	17.874
7.	SMU Negeri	10	113	344	4.670
8.	SMU Swasta	30	155	532	5.852
9.	SMK Negeri	1	3	16	75
10.	SMK Swasta	21	134	381	3.980

Sumber : Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Timur, Dinas Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Tinggi Kabupaten Lampung Timur

Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Lampung Timur secara umum dapat diukur melalui indikator tertentu, salah satu diantaranya adalah angka melek huruf (Tabel 16).

TABEL 16.
ANGKA MELEK HURUF PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KEATAS
MENURUT JENIS KELAMIN,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2001-2003

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2001	73,19	67,19	70,30
2002	84,17	78,91	81,48
2003	92,49	85,58	89,06

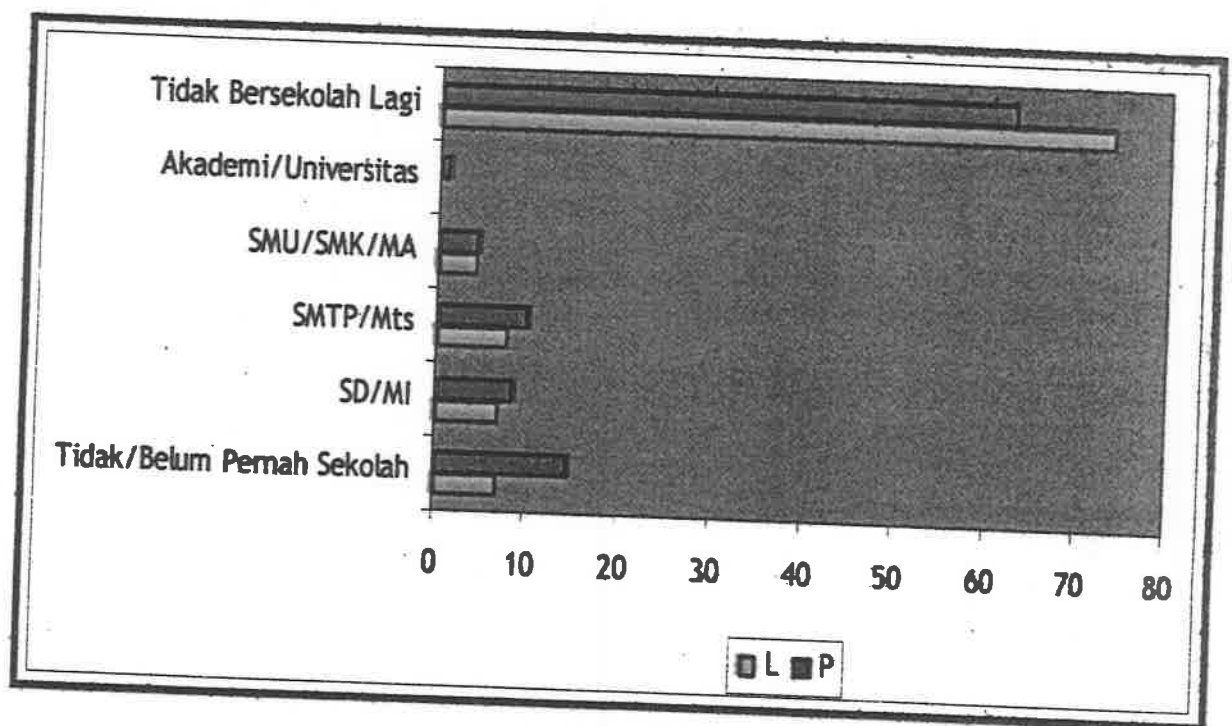
Sumber : SUSENAS

Tabel 17 dan Gambar 7 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk yang berumur 10 tahun keatas yang mampu baca tulis menurut jenis kelamin pada rentang 3 tahun terakhir. Presentase angka melek huruf laki-laki selalu lebih tinggi daripada persentase angka melek huruf perempuan selama jangka waktu tahun 2001 sampai akhir tahun 2003 dengan perbedaan yang lebih tinggi 1,65 % dari tahun sebelumnya yaitu 6,91 %.

TABEL 17.
PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KEATAS MENURUT
STATUS PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2003

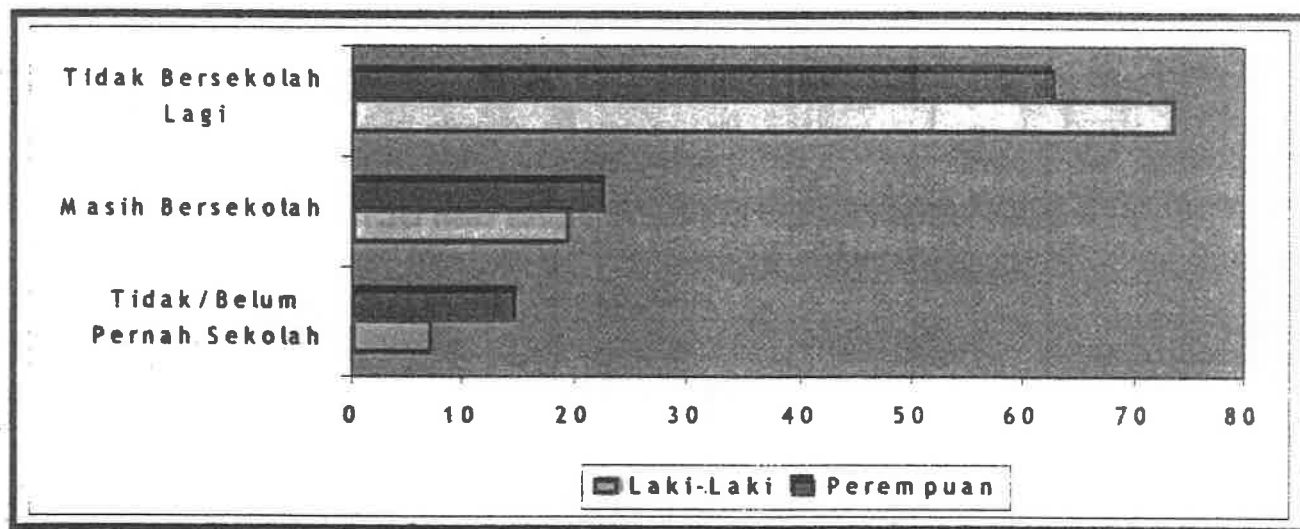
No	Status Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	7.07	14.58	10.80
2	Masih Bersekolah	19.31	22.69	20.99
	SD/MI	7.12	8.57	7.84
	SMTP/Mts	7.75	9.66	8.70
	SMU/SMK/MA	4.20	4.09	4.14
	Akademi/Universitas	0.24	0.37	0.31
3	Tidak Bersekolah Lagi	73.62	62.73	68.21
	Jumlah	100.00	100.00	100.00

Sumber : SUSENAS



GAMBAR 7.
PERSENTASE PENDUDUK YANG BERUMUR 10 TAHUN KEATAS
MENURUT STATUS PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN, KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2003

Penduduk di Kabupaten Lampung Timur yang berumur 10 tahun keatas yang tidak / belum pernah sekolah sekitar 10,80 % dengan perbedaan 7,51 % antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Sedangkan penduduk yang masih sekolah sekitar 20,99 % dengan perbedaan 3,38 % antara laki-laki dan perempuan. Lebih dari separuh jumlah penduduk yang berumur 10 tahun keatas pada akhir tahun 2003 sudah tidak bersekolah lagi dengan perbedaan yang lebih tinggi dari 10 % antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Sisanya lebih dari 1/5 jumlah penduduk yang berumur 10 tahun keatas masih bersekolah pada akhir tahun 2003 dengan perbedaan 3,38 % antara laki-laki dan perempuan (Gambar 8).



GAMBAR 8.
PERSENTASE PENDUDUK YANG BERUMUR 10 TAHUN KEATAS MENURUT STATUS PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2003

Salah satu indikator keberhasilan pendidikan dapat dilihat dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah pada kelompok usia sekolah. Angka partisipasi sekolah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Lampung Timur seperti terlihat pada Tabel 18.

TABEL 18.
PERSENTASE PENDUDUK YANG BERUMUR 10 TAHUN KEATAS MENURUT STATUS PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2003

Usia Sekolah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
7-12	96.59	95.95	96.25
13-15	85.04	91.54	88.32
16-18	48.35	63.81	55.08
19-24	6.96	5.74	6.39

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan Tabel 19 di atas, pada tahun 2003 tingkat partisipasi sekolah penduduk perempuan usia SLTP (13-15 tahun) dan SLTA (16-18 tahun) relatif lebih tinggi daripada penduduk laki-laki. Hanya untuk jenjang pendidikan SD (7-12 tahun) dan pendidikan tinggi (19-24 tahun), tingkat partisipasi sekolah penduduk perempuan lebih rendah daripada laki-laki yaitu 95,95 persen (SD) dan 5,74 persen (Pendidikan Tinggi) Untuk perempuan dan 96,59 persen (SD) dan 6,96 persen (Pendidikan Tinggi) untuk laki-laki.

Tingginya Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, terutama didukung oleh banyaknya fasilitas pendidikan yang tersedia dan mudah dicapai oleh penduduk seperti terlihat pada Tabel 19.

TABEL 19.
BANYAKNYA SD / MI, SLTP / Mts dan SLTA / MA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2003

No	Kecamatan	SD/MI	SLTP/MTS	SLTA/MA
1	Metro Kibang	17	5	1
2	Batanghari	43	7	3
3	Sekampung	42	14	5
4	Marga Tiga	32	9	6
5	Sekampung Udik	36	12	9
6	Jabung	55	15	4
7	Pasir sakti	19	6	1
8	Waway Karya	23	6	4
9	Labuhan Maringgai	36	15	4
10	Mataram Baru	16	4	1
11	Bandar Sri Bhawono	22	4	0
12	Melinting	18	7	2
13	Gunung Pelindung	16	11	9
14	Way Jepara	35	19	10
15	Braja Selehah	14	7	3
16	Pelabuhan Ratu	21	8	3
17	Sukadana	43	11	5
18	Bumi Agung	14	5	1
19	Batanghari Nuban	29	4	1
20	Pekalongan	32	8	4
21	Raman Utara	44	7	3
22	Purbolinggo	33	10	8
23	Way Bungur	19	6	1
Jumlah		659	200	88

Sumber : Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah,
Kejuruan dan Tinggi Kabupaten Lampung Timur

2.3.4. Kesejahteraan Sosial

Indikator kesejahteraan ditunjukkan oleh angka kemiskinan yang bersifat makro dan BPS atau angka kesejahteraan keluarga menurut BKKBN. Angka kemiskinan secara mikro di Daerah Kabupaten Lampung Timur menurut BPS sangat terbatas sekali.

Pada tahun 2002 jumlah keluarga prasejahtera alasan ekonomi (KPS Ekonomi) di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 56.874 dan mengalami peningkatan pada tahun 2003 menjadi 58.638. Secara proporsional laju pertumbuhan KPS Ekonomi pada tahun 2001 naik sebesar 3,01%.

Disamping itu jumlah KPS Non Ekonomi. KS 1 Ekonomi dan KS 1 Non Ekonomi pada tahun 2002 masing-masing 19.432 untuk KPS Non Ekonomi, 28.659 untuk KS 1 Ekonomi. dan 29.040 untuk KS 1 Non Ekonomi Pada tahun 2003 mengalami peningkatan masing-masing 20.462 untuk KPS Non Ekonomi, 31.335 untuk KS 1 Ekonomi. dan 30.950 untuk KS 1 Non Ekonomi. Perkembangan jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera di Kabupaten Lampung Timur tahun 2000 - 2003 dapat dilihat pada Tabel 20.

TABEL 20.
JUMLAH KK, KPS. DAN KSI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2000 – 2003

No	Keterangan	2000	2001	2002 [*]	2003 ^{**}
1	TOTAL KK	216.229	221.750	223.988	223.824
	<i>Pertumbuhan (%)</i>		2,55	1,01	-0,07
2	KPS Ekonomi	50.696	58.041	56.874	58.638
	<i>% terhadap KK</i>	0,23	0,26	0,25	0,26
3	KPS Non-Ekonomi	19.266	19.748	19.432	20.462
	<i>% terhadap KK</i>	0,09	0,09	0,09	0,09
4	KS 1 Ekonomi	33.557	28.618	28.659	31.335
	<i>% terhadap KK</i>	0,16	0,13	0,13	0,14
5	KS 1 Non Ekonomi	28.173	30.045	29.040	30.950
	<i>% terhadap KK</i>	0,13	0,14	0,13	0,14

Sumber: BKKBN Lampung Timur

Tabel 20 menunjukkan bahwa jumlah KPS baik alasan ekonomi maupun non-ekonomi memiliki kecenderungan meningkat pada periode 2002-2003. Oleh karena itu pada masa yang akan datang program pengurangan masyarakat miskin perlu mendapatkan prioritas yang penting dalam pembangunan Kabupaten Lampung Timur.

2.3.5. Agama

Secara umum, kehidupan keagamaan masyarakat Kabupaten Lampung Timur sudah sangat kondusif. Secara kuantitas, jumlah tempat peribadah-an sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan hari-hari besar agama juga dapat berjalan baik. Secara kualitas, kehidupan keagamaan juga mencerminkan perkembangan yang semakin baik. Tingkat religiusitas masyarakat tetap terjaga, kerukunan antar umat beragama juga relatif baik yang tercermin dari rendahnya intensitas maupun frekuensi kejadian konflik yang berlatar belakang agama.

Agama Islam merupakan agama yang dominan dipeluk oleh masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Pada tahun 2003 jumlah pemeluk agama Islam sejumlah 873.230 orang dengan proporsi sebesar 95,88 persen. Di posisi kedua yaitu pemeluk agama Hindu pemeluknya sebanyak 15.781 orang dengan proporsi sebesar 1,73 persen. Sedangkan yang menempati posisi selanjutnya adalah Agama Kristen Protestan sebanyak 11.194 orang (proporsi sebesar 1,23 persen); Agama Kristen Katolik sebanyak 8.132 orang (proporsi sebesar 0,89 persen); Agama Budha sebanyak 2.254 orang (proporsi sebesar 0,25 persen) dan Lainnya sebanyak 187 orang (proporsi sebesar 0,02 persen).

2.3.6. Kebudayaan

Kebudayaan Lampung sebagai unsur pendukung dan memperkaya pembangunan watak bangsa (national character building). Kebudayaan nasional merupakan puncak dari kebudayaan daerah sehingga pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah dapat dipandang sebagai upaya melestarikan aset nasional.

Secara umum masyarakat adat Lampung Timur adalah masyarakat adat pepadun yang terkenal dengan istilah Abung Siwo Mego dan Pubian Telu Suku, walaupun ada masyarakat adat Peminggir hanya beberapa desa / kampung saja. Upacara-upacara adat pada umumnya nampak/terlihat pada acara-acara perkawinan/pernikahan, dimana perkawinan/pernikahan tersebut dilakukan menurut tata cara adat tradisional disamping kewajiban memenuhi hukum agama Islam.

Tata cara dan upacara perkawinan adat Pepadun pada umumnya menurut garis keturunan Patrilineal dari adanya "Jujur" yakni berupa pemberian sejumlah uang dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita, dan adanya "Sesan" yakni berupa alat-alat rumah tangga komplit sebagai bawaan mempelai perempuan untuk menuju hidup baru bersama suaminya, "Sesan" tersebut akan diserahkan pihak keluarga mempelai wanita kepada pihak keluarga mempelai laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung dan sekaligus sebagai penyerahan formal (secara adat) mempelai wanita dari keluarganya kepada pihak keluarga mempelai pria. Dengan demikian secara hukum adat maka putus pula hubungan secara adat (bukan secara kekeluargaan) antara mempelai wanita dari adat keluarganya.

2.4. Bidang Prasarana dan Sarana Daerah

2.4.1 Bidang Sarana Prasarana

Pengelolaan jaringan jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Timur. Secara operasional pengelolaan jalan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan dan secara teknis didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 77/Kpts/DB/1990 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten/Kota.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundangan tersebut; maka yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah jaringan jalan dengan status jalan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/186/B.VI/HK/2000 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten/Kota dalam Propinsi Lampung.

Panjang jaringan jalan bernomor ruas yang ada di wilayah Kabupaten adalah 1.576,25 km, terdiri dari jalan berstatus nasional sepanjang 117,05 km, jalan provinsi sepanjang 227,36 km, jalan kabupaten sepanjang 1.231,84 km dan jalan kabupaten tidak bernomor ruas sepanjang 431,93 km berstatus jalan.

Kebijakan di bidang kebinamargaan selama periode 2000 - 2004 secara konsisten diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan jalan sebagai prioritas utama dalam pengembangan kehidupan masyarakat, pendukung pertumbuhan perekonomian dan sebagai salah satu faktor penyeimbang pembangunan antar wilayah yaitu melalui :

- 1) Mempertahankan fungsi jaringan jalan
- 2) Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan
- 3) Membangun jaringan jalan untuk pengembangan jaringan jalan
- 4) Meningkatkan aksesibilitas untuk kelancaran arus transportasi
- 5) Membuka isolasi daerah dan mempersingkat dan mempercepat jarak tempuh dan waktu antar desa, antar desa dengan kecamatan, antar ibukota kecamatan serta antar ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten.

Penanganan jaringan jalan secara teknis operasional. dikelompokkan dalam tiga program penanganan jalan yaitu:

- 1) Pembangunan jalan yang diarahkan untuk membuka daerah yang terisolir, atau jalan tersebut baru pertama ditangani secara teknis yaitu dari kondisi tanah ditangani dengan onderlaag (batu) atau timbunan pilihan (sub base)
- 2) Peningkatan jalan yang diarahkan pada jalan kabupaten dan perkotaan (ibukota kecamatan) secara struktur dengan meningkatkan kapasitas, kualitas maupun daya dukung jalan dalam melayani arus lalu lintas.
- 3) Pemeliharaan jalan, adalah mempertahankan fungsi jalan dalam melayani arus lalu lintas dilihat dari penanganannya pemeliharaan jalan terdiri dari pemeliharaan secara periodik dan secara rutin dimana perbedaannya adalah :
 - a) Pemeliharaan periodik, adalah diarahkan pada jalan kabupaten dan perkotaan yang mengalami kerusakan berat.
 - b) Pemeliharaan rutin adalah diarahkan pada jalan kabupaten dan perkotaan yang mengalami kerusakan ringan sampai sedang.

Penanganan jembatan meliputi :

- 1) Pembangunan jembatan : pembangunan jembatan pada ruas jalan kabupaten yang belum pernah ditangani sebelumnya,
- 2) Penggantian jembatan : penanganan jembatan pada ruas jalan kabupaten dan perkotaan yang sudah ada jembatannya namun perlu penggantian jembatan lebih permanen atau lebih lebar.
- 3) Pemeliharaan jembatan adalah penanganan jembatan untuk mempertahankan atau memperpanjang umur dan fungsi jembatan agar tidak terjadi kerusakan yang fatal.

Kegiatan penanganan jalan yang dilaksanakan selama tahun 2000 - 2004 meliputi pembangunan jalan (onderlaag) sepanjang 70,99 km, peningkatan jalan sepanjang 133,572 km yang terdiri penanganan dengan lapisan penetrasi sepanjang 48,24 km

dan hotmik sepanjang 86,362 km sedangkan pemeliharaan periodik sepanjang 56,60 km serta pembangunan jembatan sebanyak 6 unit.

Pencapaian penanganan jalan di wilayah kabupaten Lampung Timur sampai pada akhir tahun 2004 sangat dipengaruhi oleh program penanganan jalan dan jembatan, maupun pendanaan, hal ini yang menyebabkan banyaknya usulan masyarakat yang belum dapat ditangani baik jalan kabupaten jalan perkotaan maupun jalan desa, sehingga penanganan jalan secara prioritas dan melihat aspek pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan yang ada di Lampung Timur.

Pada akhir tahun 2004 hasil dari penanganan jalan secara jenis permukaan jalan dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 21.
PENANGANAN JALAN SECARA JENIS PERMUKAAN JALAN
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SELAMA TAHUN 2000 – 2004

No	Jenis Penanganan	Tahun				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	Jalan Tanah	322.348	318.257	312.547	270.636	233.707
2	Jalan Onderlaagh	388.938	201.728	149.895	98.498	100.868
3	Jalan Lapen	505.615	706.720	725.434	790.001	810.900
4	Jalan Hotmix	2.605.	5.135	44.055	72.705	86.365

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Timur

Dengan telah dilaksanakannya penanganan jalan tersebut maka panjang jalan tanah tahun 2004 sepanjang 233.707 km, jalan onderlaagh sepanjang 100.868 km, jalan lapen sepanjang 810.900 km dan jalan hotmik sepanjang 86.365 km.

Dengan pelaksanaan berbagai program yang menghasilkan beberapa jenis penanganan jalan yang akan berdampak pada kelancaran pelayanan arus lalu lintas pada beberapa wilayah, yaitu :

1. Terbukanya akses pada daerah terisolir, daerah pertumbuhan ekonomi lokal, seperti pasar dan mendukung akses jalan menuju kawasan pendidikan.
2. Mendorong pemerataan pembangunan pada wilayah kecamatan baik antar kecamatan maupun akses jalan menuju kantor kecamatan.
3. Mempercepat pergerakan arus lalu lintas pada wilayah strategis, seperti dari ibukota kabupaten ke ibukota kecamatan, daerah potensial lain, antar wilayah dengan kabupaten lain seperti perbatasan kota Metro dan Sukadana (Lampung Timur) menuju Bandar Lampung.

Disamping keberhasilan yang telah dicapai selama ini namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi baik mulai dari perencanaan program sampai dengan pasca pembangunan jalan, yaitu :

1. Pendataan jaringan jalan yang belum akurat dan konsisten baik untuk perencanaan program maupun untuk pelayanan publik.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan masih sering dijumpai kurangnya dukungan dan peran masyarakat terutama masalah lahan.
3. Tidak adanya asset peralatan (seperti Wales, Dump Truck Grader) untuk penanganan jalan terutama untuk pemeliharaan rutin maupun untuk hal-hal yang mendesak, sehingga penanganan pelayanan kurang memuaskan atau lambat.
4. Di era otonomi ini, masih adanya jalan lokal yang dikelola propinsi belum diserahkan ke kabupaten, namun dalam kenyataannya setiap tahunnya tidak ditangani oleh Propinsi sehingga kondisinya rusak parah, sedangkan jalan tersebut bagi kabupaten merupakan jalan strategis.

A. Pengairan

Air irigasi merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan di bidang pembangunan pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman padi menuju swasembada beras, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam rangka itu pengelolaan irigasi merupakan faktor penting yang cukup berpengaruh memberikan peran dalam mencapai tujuan tersebut. Pengaturan air lintas kabupaten/kota tingkat saluran utama primer dan penetapan pola tanam serta tata tanam detail musim tanam I (rendengan) dan musim tanam II (gaduk/kemarau) diatur dan ditetapkan oleh Panitia Irigasi Tingkat Propinsi Lampung dengan Surat Keputusan Gubernur atas dasar usulan Komisi Irigasi Tingkat Kabupaten/Kota.

Mekanisme sistem pemberian air dan pengelolaan air irigasi terbagi atas 3 (tiga) periode meliputi:

1. Periode pertama, Musim Tanam I dimulai dari bulan Nopember dan berakhir pada pertengahan bulan April saat musim penghujan.
2. Periode kedua, Musim Tanam II dimulai pada pertengahan bulan Mei sampai akhir bulan Agustus (dan musim penghujan ke musim kemarau).
3. Periode ketiga, Musim Tanam III merupakan musim tanam kemarau dan bulan September hingga Oktober, lahan sawah diperuntukkan untuk menanam khusus palawija.

4. Pada bulan September s/d Oktober air irigasi dimatikan secara total dalam rangka pemeliharaan DAM atau rehabilitasi saluran saluran dan prasarana lainnya.

Pengelolaan jaringan irigasi tidak terlepas dari pemeliharaan sarana prasarana pendukungnya. Operasional dan pemeliharaan saluran dan prasarana pendukungnya merupakan program yang terus dilakukan dalam rangka kelangsungan/kelestarian jaringan irigasi melalui kegiatan normalisasi saluran induk dan sekunder, perbaikan, penggantian pintu air yang rusak, perbaikan bangunan bagi/Sadap, Bangunan pelengkap dan operasional pintu air dalam rangka pembagian air irigasi.

Sesuai dengan potensi yang ada, maka kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengairan selama tahun 2000 - 2004 adalah sebagai berikut

- 1) Mengadakan usaha perlindungan sumber air dengan titik berat pada normalisasi alur sungai dan anak sungai.
- 2) Mengalokasikan air antar sektor dan antar wilayah secara adil dan efisien.
- 3) Membangun dan merehabilitasi prasarana pengairan seperti bendung, bangunan bagi/sadap, bangunan pelengkap dan saluran irigasi.
- 4) Meningkatkan pengelolaan sungai dan sumber air lainnya dalam rangka terjaminnya ketersediaan air secara berkesinambungan.
- 5) Penyuluhan tata guna air dalam rangka pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) dalam pengelolaan jaringan irigasi.
- 6) Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa.

Kegiatan pembangunan pengairan yang dilaksanakan selama kurun waktu 2000 - 2004 adalah sebagai berikut:

- a) Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa seluas = 24.808 Ha meliputi :
 1. Pembabatan Rumput = 583.596 m
 2. Pengecatan Pintu Air = 656 Bh
 3. Pembuatan Ulir Pintu Air = 656 Bh
 4. Pemeliharaan Bangunan Bagi/Sadap = 436 unit
- b) Rehabilitasi jaringan irigasi dan Rawa tahun 2000 - 2004 yang meliputi:
 - 1) Saluran tersier sepanjang 25.665,8 m
 - 2) Peninggian Tanggul banjir sepanjang 11 km
 - 3) Rehabilitasi jembatan sebanyak 1 unit

- c) Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) yang meliputi
- 1) Pembentukan P3A sebanyak 18 kelompok
 - 2) Pembentukan GP3A sebanyak 2 kelompok

Secara keseluruhan dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2004 memberikan hasil sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa telah memperlancar pemberian air irigasi wilayah kepada para petani petak-petak sawahnya pada 4 wilayah cabang Dinas Pengairan Lampung Timur
- 2) Kondisi Saluran irigasi setelah dilakukan penanganan selama 2000 - 2004 menghasilkan Daerah Irigasi dalam kondisi stabil = 583.596 m.
- 3) Debit air yang diperlukan untuk mengairi sawah telah kembali normal sehingga tidak mengganggu pola dan masa tanam.
- 4) Tingkat kecukupan penyediaan air irigasi menghasilkan total luas daerah irigasi 24.808 ha dengan debit 3.08 lliter/detik.
- 5) Meningkatnya kemampuan petani yang tergabung dalam kelompok Petani Pemakai Air (P3A) dalam pengelolaan Jaringan irigasi baik dalam pengorganisasiannya, aspek teknis serta pengelolaan keuangannya, serta meningkatnya komunikasi antar kelompok P3A yang tergabung dalam Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A).

Dinas Pekerjaan Umum meliputi 3 Dinas yaitu Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga dan Dinas Pengairan. Pembentukan dinas tersebut di atas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. Cipta Karya

Pelaksanaan pembangunan keciptakaryaan di Dinas Cipta Karya Kabupaten Lampung Timur yang meliputi 3 lingkup program yaitu penataan bangunan perumahan dan permukiman serta penyehatan lingkungan permukiman.

Secara operasional, pembangunan keciptakaryaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah, sedangkan secara teknis diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 648-384 Tahun 1992, 739/Kpts/1992, 091/Kpts/1 1992 tanggal 16 November 1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengaturan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Tinggal di Wilayah Perkotaan.

Kebijaksanaan Pembangunan keciptakaryaannya pada lingkup penataan bangunan dan tercapainya tertib bangunan serta pembinaan, pengendalian dan penataan bangunan, terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan aman, tertib dan berwawasan serta meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman. Dengan demikian maka program-program pembangunan keciptakaryaannya diarahkan kepada:

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintah, pendidikan dan kesehatan serta pembinaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
- 2) Perbaikan lingkungan perumahan dan permukiman di wilayah Kabupaten Lampung Timur serta pembinaan dan pengendalian pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pengembang maupun perorangan
- 3) Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman baik skala pelayanan wilayah maupun skala pelayanan lingkungan.
- 4) Penyuluhan kepada masyarakat sebagai upaya tercapainya pembangunan perumahan dan permukiman yang bertumpu kepada masyarakat dan berkesinambungan.

2.4.2 Bidang Perhubungan

Pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan di Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Secara operasional kegiatan angkutan bidang perhubungan di Propinsi Lampung diatur berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 13 Tahun 1995 tentang Penetapan Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di Wilayah Propinsi Lampung, Keputusan Bersama Bupati Lampung Tengah, Bupati Lampung Timur dan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 2002, Nomor 12 Tahun 2002, Nomor

28A Tahun 2002 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Perbatasan dan Trayek Perkotaan antara Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.

Kebijakan pembangunan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan peranan sistem transportasi dalam memenuhi mobilitas manusia, barang dan jasa. Petaksanaan kebijakan operasional, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dititikberatkan pada lalu lintas angkutan jalan khususnya angkutan penumpang orang dan barang di jalan raya.

Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang mendukung perekonomian dalam segala bidang maka program bidang perhubungan selama tahun 2000 - 2004 diarahkan kepada:

1. Pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas
2. Pembinaan angkutan dan terminal
3. Pembinaan keselamatan lalu lintas angkutan jalan

Pelaksanaan kegiatan selama 2000 - 2005 yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas yang meliputi:
 1. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas berupa rambu petunjuk, perintah dan larangan sebanyak 590 unit.
 2. Pengadaan dan pemasangan rambu pendahutu petunjuk jalan berupa papan petunjuk jurusan sebanyak 39 unit.
 3. Pembangunan marka jalan seluas 2.366 m²
 4. Pemasangan Pagar Pengaman Jalan = 226 m
 5. Pemasangan Papan Nama Jalan = 43 bh
- b) Kegiatan pembinaan angkutan dan terminal yang meliputi :
 1. Pembangunan terminal penumpang type C di 2 terminal yaitu Terminal Sukadana dan Terminal Mataram Baru
 2. Pengelolaan trayek angkutan umum sebanyak 21 trayek.
- c) Kegiatan pembinaan keselamatan lalu lintas angkutan jalan yang meliputi :
 1. Pengujian kendaraan bermotor yang meliputi mobil barang, mobil bus dan mikrolet untuk mempertahankan kondisi layak jalan yang mulai dilaksanakan

pada tahun 2003 bagi sebanyak 2.307 kendaraan dan sebanyak 3.584 kendaraan pada tahun 2004.

2. Penertiban kelaikan Angkutan Barang & Penumpang Umum.

Hasil yang diperoleh dengan terlaksananya kegiatan bidang perhubungan selama 2000 -2005 antara lain adalah:

- a. Terlaksananya pengaturan pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan umum serta pengaturan perparkiran.
- b. Terwujudnya kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan berlalu lintas.
- c. Terlayannya kebutuhan masyarakat akan angkutan melalui penyediaan trayek dan terminal.
- d. Lancarnya pergerakan orang dan barang yang menunjang pertumbuhan ekonomi.

Jenis Kendaraan Roda Empat yang ada di Kabupaten Lampung timur diantaranya Truk, Pick Up, Bus, Angkutan Desa dan Kendaraan Tak Umum. Pada tahun 2004 jumlah Truk sebanyak 939 buah dengan proporsi sebesar 33,97 persen, Pick Up sebanyak 803 buah dengan proporsi sebesar 29,05 persen, Bus sebanyak 461 buah dengan proporsi sebesar 16,68 persen, Angkutan Desa sebanyak 140 buah dengan proporsi sebesar 5,07 persen, dan Kendaraan Tak Umum sebanyak 421 buah dengan proporsi sebesar 15,23 persen.

Selain itu transportasi laut dilayani oleh keberadaan Pelabuhan Laut Labuhan Maringgai, Pelabuhan Laut Kuala Penet.

2.5 Pemerintahan Umum

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang peresmianya dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 April 1999. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada mulanya dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 40 dan 41 Tahun 2000, yang terdiri dari : 16 Dinas Otonom Daerah; 10 Bagian Sekretariat Daerah; 4 Badan; 1 Rumah Sakit Daerah dan 5 Kantor., secara lengkap tertera pada Tabel 22. berikut :

TABEL 22.
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2004

No	Perangkat Daerah	Jumlah (Satuan Kerja)
1.	Sekretaris Daerah	1
2.	Sekretariat DPRD	1
3.	Dinas Daerah	16
4.	Lembaga Teknis Daerah	
	a. Badan	4
	b. Rumah Sakit Daerah	1
	c. Kantor	5
5.	Kecamatan	24*)

Sumber : Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab Lampung Timur

*) Semula 23 Kecamatan ditambah 1 (satu) kecamatan (Marga Sekampung disyahkan tanggal 12 Desember 2005)

Susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur secara rinci adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat Daerah, terdiri dari:

1. Asisten I / Bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan
 - b. Bagian Hukum dan Organisasi
2. Asisten II / Bidang Ekonomi dan Pembangunan, meliputi:
 - a. Bagian Perekonomian
 - b. Bagian Pembangunan
 - c. Bagian Sosial
3. Asisten III / Bidang Administrasi, meliputi
 - a. Bagian Keuangan
 - b. Bagian Kepegawaian
4. Asisten IV / Bidang Umum, meliputi
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Perlengkapan
 - c. Bagian Humas

B. Sekretariat DPRD, terdiri dari:

1. Bagian Persidangan dan Risalah
2. Bagian Protokol, Perpustakaan dan Dokumentasi
3. Bagian Umum

C. Dinas Daerah, terdiri dari:

1. Dinas Bina Marga
2. Dinas Cipta Karya
3. Dinas Pengairan
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pendidikan Dasar
6. Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan dan Tinggi
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8. Dinas Perhubungan
9. Perikanan dan Kelautan
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
13. Dinas Pertambangan dan Energi
14. Dinas Perkebunan dan Kebutanan
15. Dinas Pendapatan Daerah
16. Dinas Peternakan

D. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:

1. Badan, meliputi:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Badan Pengawasan Daerah
 - c. Badan Promosi Investasi Daerah
 - d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
2. Rumah Sakit Daerah Sukadana
3. Kantor, terdiri dari :
 - a. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - b. Kantor Pengelolaan Pasar
 - c. Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan KB
 - d. Kantor Kesbang, Linmas dan Politik
 - e. Kantor Polisi Pamong Praja

E. Kecamatan, terdiri dari:

1. Metro Kibang
2. Batanghari
3. Sekampung
4. Marga Tiga

5. Sekampung Udik
6. Jabung
7. Pasir sakti
8. Waway Karya
9. Labuhan Maringgai
10. Mataram Baru
11. Bandar Sri Bhawono
12. Melinting
13. Gunung Pelindung
14. Way Jepara
15. Braja Selebah
16. Labuhan Ratu
17. Sukadana
18. Bumi Agung
19. Batanghari Nuban
20. Pekalongan
21. Raman Utara
22. Purbolinggo
23. Way Bungur
24. Marga Sekampung

Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 mencakup pelaksanaan administrasi kepegawaian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kota, sehingga program yang dilaksanakan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian di Kabupaten Lampung Timur masih banyak melibatkan program/kegiatan dari Pemerintah Propinsi Lampung maupun dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Kegiatan penyelenggaraan/pengelolaan administrasi kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Program dan kegiatan kepegawaian yang ada pada Tahun Anggaran 2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2004 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengadaan Pegawai

Penyusunan formasi pegawai (PNS) pada Tahun Anggaran 2000 dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dengan memperhatikan rasionalitas mutu, jumlah dan susunan kepangkatan PNS yang dibutuhkan, untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas sesuai beban kerjanya berdasarkan usulan yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Propinsi Lampung.

Demikian pula dari Tahun Anggaran 2002 sampai dengan Tahun Anggaran 2004 telah dilaksanakan pengisian formasi pegawai yang dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia untuk Kabupaten Lampung Timur.

Pada tahun 2001 jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berjumlah 9.365 orang. Jumlah pegawai pada tahun 2002 menurun menjadi 8.636 orang. Selanjutnya pada tahun 2003 jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tercatat sebanyak 9.395 orang. Kemudian pada tahun 2004 jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tercatat sebanyak 9.481 orang.

TABEL 23.
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR
SELAMA TAHUN ANGGARAN 2001 – 2004

Uraian	Tahun			
	2001	2002	2003	2004
Jumlah PNS (orang)	9.365	8.636	9.395	9.481

Sumber : Bagian Kepegawaian Pemda, Dinas Dikdas, dan Dinas Dikmenjurti Lampung Timur

Rincian jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

- 1) Golongan I = 97 orang
- 2) Golongan II = 1.624 orang
- 3) Golongan III = 6.698 orang
- 4) Golongan IV = 1.062 orang

Adapun komposisi PNS dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur sampai tahun 2005 berjumlah 640 dengan rincian sebagai berikut :

1) Eselon II / a	= 0
2) Eselon II/ b	= 26
3) Eselon III / a	= 105
4) Eselon III/ b	= 23
5) Eselon IV / a	= 467
6) Eselon IV / b	= 19

1. Mutasi

Kenaikan pangkat merupakan penghargaan terhadap PNS yang telah mengabdikan pada negara selama periode waktu tertentu. Kenaikan pangkat ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi, prestasi dan dedikasi PNS yang bersangkutan sehingga mampu bekerja lebih baik. Selama pertengahan tahun 2000 sampai dengan 2001 yang merupakan masa transisi petaksanaan otonomi daerah pembinaan dalam bidang kepegawalan tetap dilaksanakan melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, proses kenaikan pangkat PNS Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan atas kerja sama dengan Kantor Regional (Kanreg) V Badan Kepegawalan Negara (BKN) dan telah menghasilkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai yang tepat waktu, tepat orang dan tepat gaji.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, periode kenaikan pangkat PNS menjadi dua kali dalam satu tahun sedangkan untuk kenaikan pangkat pilihan terdapat perubahan persyaratan antara lain harus berada satu tahun dalam jabatan dan satu tahun dalam pangkat, sehingga pada tahun 2002 volume kegiatan kenaikan pangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menurun. Pada tahun 2001, proses penerbitan Keputusan Pensiun khususnya untuk Golongan/Ruang IV b ke atas masih dilaksanakan oleh pusat sehingga sering terjadi keterlambatan/tidak tepat waktu pada penerbitannya. Setelah kewenangan pensiun menjadi kewenangan penuh daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 proses pensiun dilakukan hanya melalui dua tahapan yaitu pertimbangan teknis untuk Batas Usia Pensiun (BUP) oleh Kanreg V BKN dan Keputusan Pensiun oleh Bupati Lampung Timur termasuk Pensiun atas Permohonan Sendiri (APS) 3.

sehingga dihasilkan pemensiunan pegawai yang tepat waktu, tepat orang dan tepat pembayaran.

2. Pengembangan Pegawai

Pengembangan PNS di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur didasarkan kepada perpaduan antara sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang yang sama bagi PNS yang berprestasi untuk meningkatkan kemampuan secara profesional dan berkompetisi secara sehat, baik dalam menduduki jabatan struktural maupun fungsional. Kebijakan pengembangan pegawai dilakukan secara objektif dan selektif sehingga menumbuhkan kegairahan untuk berkompetisi bagi seluruh PNS dalam meningkatkan kemampuan profesionalismenya.

Pengembangan karir pegawai dilakukan melalui kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat. Pada tahun 2000 pelaksanaannya masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dengan diberlakukannya otonomi daerah maka penyelenggaraannya seleksi tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur, dilaksanakan pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian integral dan sistem pembinaan dan pengembangan karir, sehingga dapat terwujud PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan maupun tuntutan kebutuhan organisasi.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dilakukan seleksi. Pada tahun 2000 kewenangan penyelenggaraan seleksi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, namun dengan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah kewenangan tersebut beralih ke daerah.

Pada prinsipnya kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Bandiklatda), tetapi untuk beberapa jenis dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara dan lembaga diklat lainnya, seperti Pusbindiklatren Bappenas di Jakarta.

Kesejahteraan Pegawai

Kebijakan pembinaan aparatur dalam bidang kesejahteraan pegawai diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang undang Nomor 43 Tahun 1999 yang mengatur bahwa pemberian kesejahteraan pegawai harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan pegawai. Peningkatan pembinaan kesejahteraan pegawai dilakukan melalui diversifikasi kegiatan yang secara kumulatif dapat meningkatkan motivasi, kualitas dan kinerja pegawai ke arah yang lebih baik.

Kesejahteraan pegawai meliputi pengadaan Karpeg/Karis/Karsu dan Taspen serta pemberian penghargaan bagi PNS Purna Bakti.

BAB III

ARAH DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PEREKONOMIAN DAERAH

3.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Salah satu faktor utama penentu keberhasilan pembangunan adalah aspek pembiayaan. Secara garis besar sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, terdiri dari: pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Beberapa jenis sumber pembiayaan tersebut, dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan terbesar.

Sumber utama penerimaan PAD Kabupaten Lampung Timur berasal dari pajak, retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lain sumber PAD yang sah. Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Lampung Timur dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 PAD Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 2,903,890,000.00; tahun 2002 sebesar Rp. 3,466,500,000.00; tahun 2003 sebesar Rp. 5,822,500,000.00 dan tahun 2004 sebesar Rp 10,000,000,000.00 .

Sumber utama penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Lampung Timur berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA. Pada tahun 2001 Dana Perimbangan Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp.198,421,087,331.31; tahun 2002 sebesar Rp. 261,585,369,950.00; tahun 2003 sebesar Rp. 312,215,465,583.00 dan pada tahun 2004 sebesar Rp. 330,685,465,583.00

Sumber utama penerimaan lainnya di Kabupaten Lampung adalah Lain-lain Pendapatan Yang Sah, pada tahun 2001 Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 7,511,344,000.00; tahun 2002 sebesar Rp. 8,100,000,000.00; tahun 2003 sebesar Rp. 22,407,211,023.00 dan pada tahun 2004 sebesar Rp. 17,483,454,000.00.

Apabila dianalisis lebih lanjut, komponen penyusun pendapatan dari masing masing PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagaimana pada Tabel 24.

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengelolaan PAD tidak terlepas dan pengaruh perubahan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Demikian juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 telah diubah pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

TABEL 24.
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, TAHUN 2004 (DALAM RIBU RP)

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI	PANGSA (%)
I	PENDAPATAN	370.761.920	362.714.419	97,83	100,00
	1.1 Pendapatan Asli Daerah	10.000.000	8.068.242	80,68	2,22
	1.2 Dana Perimbangan	343.278.466	337.284.190	98,25	92,99
	1.3 Lain-lain pendapatan yang sah	17.483.454	17.361.988	99,31	4,79
II	BELANJA				
	2.1 Belanja Aparatur Daerah	95.690.648	91.065.102	95,17	24,52
	2.1.1 Belanja Administrasi Umum	75.992.282	72.525.105	95,44	19,53
	2.1.2 Belanja Operasional dan Pemeliharaan	19.698.365	18.539.997	94,12	4,99
	2.1.3 Belanja Modal	5.257.534	4.748.761	90,32	1,28
	2.2 Belanja Publik	301.143.048	280.268.659	93,07	75,48
	2.2.1 Belanja Administrasi Umum	157.584.633	149.864.262	95,10	40,36
	2.2.2 Belanja Operasional dan Pemeliharaan	38.448.321	37.702.556	98,06	10,15
	2.2.3 Belanja Modal	68.085.745	56.211.402	82,58	15,14
	2.2.4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	37.024.350	36.485.331	98,54	9,83
	2.2.5 Belanja Tidak Tersangka	1.000.000	740.000	74,00	0,20
	JUMLAH BELANJA	396.833.696	371.333.761	93,57	100,00
	JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT)	-26.071.776	-8.619.342		
III	Pembiayaan				
	3.1 Penerimaan Daerah	28.421.776	28.421.776	100,00	
	3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	28.421.776	28.421.776	100,00	
	3.2 Pengeluaran Daerah	2.350.000	2.350.000	100,00	
	3.2.1 Penyertaan Modal	2.350.000	2.350.000	100,00	
	3.2.2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Berjalan	-	-	-	
	3.2.3 Pinjaman Lunak / Bergullir	-	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENAMBAHAN)	26.071.776	26.071.776	100,00	
	JUMLAH NET SURPLUS / (DEFISIT)	0	17.452.435		

Peraturan perundang-undangan yang baru tersebut memberi keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota untuk menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, tidak terjadi pungutan ganda (termasuk dengan pungutan Pemerintah Pusat maupun Propinsi), memperhatikan rasa keadilan masyarakat, pelayanan yang diberikan merupakan kewenangan daerah serta potensinya memang ada di daerah yang bersangkutan.

Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah; Retribusi Daerah, Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lain-lain Pendapatan PAD yang sah. Pada tahun 2004, kontribusi dari masing-masing komponen PAD sebagai berikut:

- (1) Realisasi komponen Pajak Daerah telah memberikan kontribusi terhadap total PAD Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 3,522,250,000.00
- (2) Realisasi komponen Retribusi Daerah telah memberikan kontribusi terhadap total PAD Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 3,755,000,000.00
- (3) Realisasi komponen Bagian Laba BUMD memberikan kontribusi terhadap total PAD sebesar Rp. 300,000,000.00.
- (4) Realisasi komponen Lain-lain PAD yang Sah telah memberikan kontribusi terhadap total PAD Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 2,422,750,000.00

Jadi, berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa komponen Retribusi Daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap total PAD, kemudian diikuti oleh Pajak Daerah, komponen Lain-lain Penerimaan PAD yang Sah dan terakhir Bagian Laba BUMD.

b) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Kontribusi dan masing-masing komponen Dana Perimbangan pada tahun 2004 adalah:

- (1) Realisasi Bagi Hasil Pajak telah memberikan kontribusi terhadap total Dana Perimbangan sebesar Rp. 21,397,473,583.00

- (2) Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak telah memberikan kontribusi terhadap total Dana Perimbangan sebesar Rp. 39,797,992,000.00
- (3) Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) telah memberikan kontribusi terhadap total Dana Perimbangan sebesar Rp. 257,030,000,000.00
- (4) Realisasi Dana Alokasi Khusus telah memberikan kontribusi terhadap total Dana Perimbangan sebesar Rp. 12,460,000,000.00

Jadi berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa komponen Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi terbesar terhadap Dana Perimbangan, kemudian diikuti oleh komponen Bagi Hasil Bukan Pajak, Bagi Hasil Pajak, dan terakhir Dana Alokasi Khusus.

Dalam lima tahun ke depan pendapatan asli daerah (PAD) dari masing-masing sektor terus meningkat terutama untuk retribusi daerah dan pajak daerah. Begitu juga untuk komponen bagi hasil pajak, DAU dan DAK sehingga secara keseluruhan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur diharapkan meningkat dari Rp 400.717.603.300,00 tahun 2005 menjadi Rp 658.530.500.000,00 pada tahun 2010 dengan peningkatan sebesar 2% sampai 44% per tahun selama periode 2006 sampai 2010 (Tabel 25). Peningkatan terbesar pada tahun 2006 terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang besarnya sekitar 153,15 %/tahun. Untuk tahun 2007 peningkatan terbesar diperoleh dari Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu sebesar 54,67 %/tahun. Peningkatan terbesar pada Tahun 2008, 2009 dan 2010 diperkirakan terjadi pada Lain-Lain Pendapatan Yang Sah masing-masing memberikan kontribusi sebesar 25,00 %/tahun, 40,00 %/tahun dan sebesar 14,29 %/tahun.

Jumlah pendapatan daerah yang terus meningkat tersebut merupakan sumber dana untuk pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Timur. Alokasi dana untuk masing-masing sektor dan subsektor pembangunan tentunya disesuaikan dengan titik berat Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur yang merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan segenap stake holdernya.

3.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Selama periode Tahun Anggaran 2000 - 2003, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Belanja Rutin umumnya dialokasikan untuk membiayai pos-pos belanja yang sifatnya sudah tetap dan tidak dapat dihindari untuk kelangsungan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, sedangkan

Belanja Pembangunan ditujukan untuk membiayai masalah pembangunan dan memenuhi kebutuhan pembangunan dan masyarakat yang kesemuanya bermuara kepada kesejahteraan rakyat.

Selama tahun 2000 - 2003, rencana alokasi Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan mengikuti prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis, maksudnya adalah bahwa rencana alokasi Belanja Daerah (Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan) harus sama nilainya dengan rencana Pendapatan Daerah untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Hanya saja, terdapat perbedaan prinsip dan norma dalam pengelolaan dan rencana penggunaannya, dimana Belanja Daerah merupakan alokasi atau plafon tertinggi untuk setiap jenis dan pos belanja, sedangkan Pendapatan Daerah merupakan perkiraan jumlah minimal yang terukur secara rasional dan jumlahnya diprediksi akan tercapai pada akhir tahun anggaran untuk setiap bagian/pos pendapatan yang telah ditetapkan.

TABEL 25.
 ARAH PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2006 – 2010
 (DALAM RIBU RUPIAH)

URAIAN	2005	2006	r (%)	2007	r (%)	2008	r (%)	2009	r (%)	2010	r (%)
I. PENDAPATAN											
A PAD	10.000.000.000	8.352.655.940	-16,47	9.762.655.940	16,88	10.422.893.640	6,76	11.502.890.200	10,36	11.960.000.000	3,89
1. Pajak Daerah	4.222.250.000	3.342.250.000	-20,84	4.542.250.000	35,90	4.842.250.000	6,60	5.300.250.000	9,46	5.500.000.000	3,77
2. Retribusi Daerah	3.719.000.000	2.941.655.940	-20,90	2.941.655.940	0,00	3.141.655.940	6,80	3.541.655.000	12,73	3.680.000.000	3,91
3. Laba Usaha Daerah	100.000.000	100.000.000	0,00	110.000.000	10,00	130.000.000	18,18	150.000.000	15,38	170.000.000	13,33
4. Lain-lain PAD yang Syah	1.958.750.000	1.968.750.000	0,51	2.168.750.000	10,16	2.308.987.700	6,47	2.510.984.200	8,75	2.600.000.000	3,55
B. Dana Perimbangan	364.047.603.300	550.034.293.016	51,09	573.410.862.225	4,25	595.569.290.949	3,86	609.127.549.000	2,28	626.580.500.000	2,87
1. Bagi hasil Pajak	17.947.611.300	19.111.301.016	6,48	20.531.298.716	7,43	21.571.890.949	5,07	23.098.099.000	7,07	26.350.000.000	14,08
a. PBB	1.929.691.583	3.093.381.299	60,30	3.103.381.299	0,32	3.133.384.200	0,97	3.209.800.000	2,44	3.350.000.000	4,37
b. PBB Pertambangan / Migas	11.979.450.417	11.979.450.417	0,00	13.079.450.417	9,18	14.000.950.417	7,05	16.000.800.000	14,28	18.000.000.000	12,49
c. PBB Pembagian dari Pusat 10 %	1.601.569.759	1.601.569.759	0,00	1.701.569.759	6,24	1.750.099.000	2,85	1.800.060.000	2,85	2.000.000.000	11,11
d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah	1.338.423.132	1.338.423.132	0,00	1.358.420.832	1,49	1.368.980.832	0,78	1.409.900.000	2,99	1.500.000.000	6,39
e. Pajak Penghasilan Orang Pribadi	1.098.476.409	1.098.476.409	0,00	1.288.476.409	17,30	1.318.476.500	2,33	1.400.000.000	6,18	1.500.000.000	7,14
2. Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	40.272.992.000	41.272.992.000	2,48	45.279.553.509	9,71	49.297.400.000	8,87	51.329.450.000	4,12	56.430.500.000	9,94
a. Iuran MPH	305.180.000	305.180.000	0,00	306.098.700	0,30	307.000.000	0,29	309.000.000	0,65	310.000.000	0,32
b. Iuran Eksploitasi & Eksplorasi Pertambangan Umum	366.000	366.000	0,00	366.809	0,22	400.000	9,05	450.000	12,50	500.000	11,11
c. Pen. Pungutan. Peng. Perikanan	947.446.000	947.446.000	0,00	953.098.000	0,60	970.000.000	1,77	1.000.000.000	3,09	1.100.000.000	10,00
d. Penerimaan & Sek. Pertambangan	39.000.000.000	40.000.000.000	2,56	44.000.000.000	10,00	48.000.000.000	9,09	50.000.000.000	4,17	55.000.000.000	10,00
e. Pemberian Hak Atas Tanah	20.000.000	20.000.000	0,00	20.000.000	0,00	20.000.000	0,00	20.000.000	0,00	20.000.000	0,00

LANJUTAN TABEL 25

3. DAU	282.847.000.000	445.000.000.000	57,33	458.000.000.000	2,92	465.000.000.000	1,53	474.000.000.000	1,94	480.000.000.000	1,27
4. DAK	14.280.000.000	36.150.000.000	153,15	41.000.000.000	13,42	51.000.000.000	24,39	52.000.000.000	1,96	55.000.000.000	5,77
5. Dana Perimbangan Dari Propinsi	8.700.000.000	8.500.000.000	-2,30	8.600.000.000	1,18	8.700.000.000	1,16	8.700.000.000	0,00	8.800.000.000	1,15
C. Lain-lain Pendapatan Yang Syah	13.170.000.000	4.990.000.000	-62,11	4.000.000.000	-19,84	5.000.000.000	25,00	7.000.000.000	40,00	8.000.000.000	14,29
Jumlah Pendapatan	387.217.803.300	563.378.948.956	45,48	587.173.518.165	4,22	610.992.184.589	4,06	627.630.439.200	2,72	646.530.500.000	3,01
II. PEMBIAYAAN											
Penerimaan Daerah	15.000.000.000	17.000.000.000	13,33	16.600.000.000	-2,35	14.000.000.000	-15,66	14.000.000.000	0,00	10.000.000.000	-28,57
1. Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	15.000.000.000	7.500.000.000	-50,00	11.600.000.000	54,67	11.000.000.000	-5,17	12.000.000.000	9,09	10.000.000.000	-16,67
2. Pinjaman Daerah	0	9.500.000.000	100,00	5.000.000.000	-47,37	3.000.000.000	-40,00	2.000.000.000	-33,33	0	0,00
Pengeluaran Daerah	1.500.000.000	2.000.000.000	33,33	2.000.000.000	0,00	2.000.000.000	0,00	2.000.000.000	0,00	2.000.000.000	0,00
1. Transfer Ke Dana Cadangan	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0			
2. Penyertaan Modal	1.500.000.000	2.000.000.000	33,33	2.000.000.000	0,00	2.000.000.000	0,00	2.000.000.000	0,00	2.000.000.000	0,00
Jumlah Pembiayaan	13.500.000.000	15.000.000.000	11,11	13.600.000.000	-9,33	13.000.000.000	-4,41	14.000.000.000	7,69	12.000.000.000	-14,29
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	400.717.803.300	578.378.948.956	44,34	600.773.518.165	3,87	623.992.184.589	3,86	641.630.439.200	2,83	658.530.500.000	2,63

Sumber : Bagian Keuangan (Data diolah)

Rencana Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Belanja Rutin berada pada kisaran antara 58,80% sampai dengan 87,45% atau rata-rata sebesar 67,16% selama tahun 2000 - 2003, sedangkan alokasi Belanja Pembangunan berada pada kisaran antara 12,55% sampai dengan 41,20% atau rata-rata sebesar 32,84%. Jadi rencana Belanja Daerah selama tahun 2000 - 2003 memperlihatkan bahwa alokasi untuk memenuhi kebutuhan Belanja Rutin masih jauh lebih besar daripada kebutuhan untuk Belanja Pembangunan.

Khusus untuk tahun anggaran 2004 pos pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Timur mengalami perubahan, adapun target dan realisasi pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004 tertera pada Tabel 26.

Tabel 26. menunjukkan bahwa tingkat realisasi pendapatan dan pembelanjaan daerah Kabupaten sangat tinggi hampir 100% yang berarti bahwa target yang ditetapkan cukup rasional.

Dari sudut pandang alokasi sumber pendapatan dan alokasi pembelanjaan daerah tampak bahwa dana perimbangan merupakan sumber utama pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2004 yang besarnya mencapai Rp 337 milyar atau 93% dari total pendapatan. Dari sisi pembelanjaan, belanja publik memiliki porsi terbesar yakni 75% atau Rp 280 milyar. Dari jumlah tersebut sebagian besar untuk belanja administrasi umum yakni sebesar 40% sedangkan untuk belanja modal hanya 15%. Oleh karena itu alokasi dana pembelanjaan daerah pada masa yang akan datang sebaiknya lebih diarahkan pada belanja modal dan belanja operasional dan pemeliharaan agar sustainability pembangunan lebih terjamin dan secara efektif mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

TABEL 26.
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2004

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI	PANGSA (%)
I	PENDAPATAN	370.761.920	362.714.419	97,83	100,00
	1.1 Pendapatan Asli Daerah	10.000.000	8.068.242	80,68	2,22
	1.2 Dana Perimbangan	343.278.466	337.284.190	98,25	92,99
	1.3 Lain-lain pendapatan yang sah	17.483.454	17.361.988	99,31	4,79
II	BELANJA				
	2.1 Belanja Aparatur Daerah	95.690.648	91.065.102	95,17	24,52
	2.1.1 Belanja Administrasi Umum	75.992.282	72.525.105	95,44	19,53
	2.1.2 Belanja Operasional dan Pemeliharaan	19.698.365	18.539.997	94,12	4,99
	2.1.3 Belanja Modal	5.257.534	4.748.761	90,32	1,28
	2.2 Belanja Publik	301.143.048	280.268.659	93,07	75,48
	2.2.1 Belanja Administrasi Umum	157.584.633	149.864.262	95,10	40,36
	2.2.2 Belanja Operasional dan Pemeliharaan	38.448.321	37.702.556	98,06	10,15
	2.2.3 Belanja Modal	68.085.745	56.211.402	82,56	15,14
	2.2.4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	37.024.350	36.485.331	98,54	9,83
	2.2.5 Belanja Tidak Tersangka	1.000.000	740.000	74,00	0,20
	JUMLAH BELANJA	396.833.696	371.333.761	93,57	100,00
	JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT)	-26.071.776	-8.619.342		
III	Pembiayaan				
	3.1 Penerimaan Daerah	28.421.776	28.421.776	100,00	
	3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	28.421.776	28.421.776	100,00	
	3.2 Pengeluaran Daerah	2.350.000	2.350.000	100,00	
	3.2.1 Penyertaan Modal	2.350.000	2.350.000	100,00	
	3.2.2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Berjalan	-	-	-	
	3.2.3 Pinjaman Lunak / Bergulir	-	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (PENAMBAHAN)	26.071.776	26.071.776	100,00	
	JUMLAH NET SURPLUS / (DEFISIT)	0	17.452.435		

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, 2005

3.3 Kebijakan Umum Anggaran

Pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur selama tahun 2000 - 2004 berdasarkan kepada kebijakan dan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

Pertama, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah maka kebijakannya berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku secara efektif hingga tahun 1999. Kemudian memasuki tahap transisi hingga tahun 2000 dan tahun berikutnya mulai diberlakukan secara efektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu tepatnya pada bulan Januari tahun 2001 sampai dengan bulan Oktober tahun 2004. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti menyusul diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sejak bulan Oktober 2004.

Kedua, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah maka untuk Tahun Anggaran 2001-2005 kebijakan pembangunan didasarkan kepada sejumlah dokumen perencanaan daerah dan Rencana Strategis Kabupaten Lampung Timur 2001-2005 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2002. Sementara itu, dalam rangka penyusunan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2004 acuannya secara teknis didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, disertai dengan dokumen Arah dan Kebijakan Umum (AKU) serta Strategi dan Prioritas APBD Kabupaten Lampung Timur yang menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dan perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.

Kabupaten Lampung Timur yang lahir di tengah situasi dan kondisi krisis, di satu sisi dihadapkan pada upaya penyelamatan (*rescue*) dan pemulihan (*recovery*) perekonomian daerah, sementara di sisi lain dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya dan permasalahan yang cukup kompleks dalam rangka pemantapan atau stabilisasi untuk kembali ke keadaan normal pasca krisis.

Oleh karena itu, kebijakan untuk Tahun Anggaran 2000 masih mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya, diantaranya kebijakan Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan dalam Ketetapan MPR-RI Nomor

IX/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk melaksanakan kewenangan daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, baik kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota maupun kewenangan bidang lainnya yang menjadi tugas pembantuan (*medebewind*) dan pemerintah pusat.

Sementara itu, mulai Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam penyusunan anggarannya mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sistem anggaran ini merupakan sistem anggaran baru yang berbasis kinerja dimana sistem anggaran ini mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dan perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.

Dari pendekatan ini APBD Kabupaten Lampung Timur disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Tindak lanjut dengan dikeluarkannya Kepmendagri tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kemudian menetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang pengurusan, pertanggungjawaban, pengawasan dan penatausahaan keuangan daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Oleh karena itu kebijakan umum anggaran mulai tahun 2005 dan seterusnya selama periode perencanaan jangka menengah di Kabupaten Lampung Timur tetap berpedoman kepada peraturan yang berlaku pada beberapa tahun terakhir ini.

3.4. Skenario Perekonomian Daerah 2005 – 2010

Skenario perencanaan perekonomian Kabupaten Lampung Timur tahun 2005 – 2010 diarahkan untuk memanfaatkan potensi ekonomi daerah yang berbasis pertanian sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan membuka peluang lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran yang

cukup tinggi serta meningkatkan daya beli masyarakat pada semua lapisan.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi dibutuhkan investasi yang cukup besar dimasa mendatang. Hal itu dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dengan memberikan porsi investasi swasta berperan cukup besar.

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Timur tahun 2005-2010 disusun dengan 2 (dua) skenario yaitu skenario realistis dan skenario optimis. Skenario realistis diprediksi pertumbuhan rata-rata pertahun 6,4 % dan Skenario Optimis diprediksi pertumbuhan rata-rata pertahun 6,7 %. Skenario perekonomian tersebut disusun berdasarkan indikator makro ekonomi mengikuti pertumbuhan alamiah yang diproyeksikan dari tahun 1999 – 2004 dimana dengan angka pertumbuhan tersebut disusun indikator makro ekonomi tahun 2005.

Sedangkan skenario optimis disusun dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional dan kemungkinan tumbuhnya iklim investasi yang semakin kondusif 5 tahun mendatang. Perkembangan beberapa pembangunan nasional seperti yang diuraikan pada issue-issue strategis pada bab sebelumnya diperkirakan akan menarik investasi swasta dan masyarakat yang cukup besar. Dengan demikian maka secara optimis ditetapkan skenario pembangunan tersebut untuk mengantisipasi peluang-peluang yang investasi tersebut dalam suatu perencanaan makro ekonomi daerah.

Skenario Pertumbuhan ekonomi secara Realistis merencanakan pertumbuhan ekonomi tahun 2005 sebesar 5,0 %, tahun 2006 sebesar 6,0 %, tahun 2007 sebesar 6,2 % tahun 2008 sebesar 6,4 % tahun 2009 sebesar 6,6 % dan tahun 2010 meningkat menjadi 6,8 % pertahun. Untuk mendukung skenario tersebut inflasi diperkirakan 7,0 % tahun 2005, tahun 2006 meningkat menjadi 9,2 % namun diharapkan menurun kembali menjadi 6,5 % tahun 2010 atau dengan rata-rata sebesar 7,3 % per tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk diperkirakan antara 1,30 – 1,34 % pertahun. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut dibutuhkan investasi pembangunan tahun 2005 sebesar Rp. 600,85 milyar dengan komposisi Rp. 300,35 milyar atau 49,98 % bersumber dari dana pemerintah dan Rp. 300,50 milyar atau 50,02 % bersumber dari masyarakat secara bertahap meningkat tahun 2006 meningkat menjadi Rp. 802,09 milyar dengan komposisi Rp. 544,97 milyar atau 67,94 % bersumber dari dana pemerintah dan Rp. 257,12 milyar atau 32,06 % bersumber dari masyarakat dan tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 1.002,04 milyar dengan komposisi Rp. 649,32 milyar atau 64,80 % bersumber dari dana pemerintah

dan Rp. 352,72 milyar atau 35,20 % bersumber dari masyarakat .

Skenario Pertumbuhan ekonomi secara Optimis merencanakan pertumbuhan ekonomi tahun 2005 sebesar 5,6 %, tahun 2006 sebesar 6,3 %, tahun 2007 sebesar 6,5 % tahun 2008 sebesar 6,7 % tahun 2009 sebesar 6,9 % dan tahun 2010 meningkat menjadi 7,10 % pertahun. Untuk mendukung skenario tersebut inflasi diperkirakan tahun 2005 7,50 %, tahun 2006 meningkat menjadi 9,7 % namun diharapkan menurun kembali menjadi 6,8 % tahun 2010 atau dengan rata-rata sebesar 7,62 % per tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk diperkirakan antara 1,32 – 1,34 % pertahun.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut dibutuhkan investasi pembangunan tahun 2005 sebesar Rp. 655,39 milyar dengan komposisi Rp. 314,74 milyar atau 48,02 % bersumber dari dana pemerintah dan Rp. 340,65 milyar atau 51,98 % bersumber dari masyarakat secara bertahap meningkat tahun 2006 meningkat menjadi Rp. 843,28 milyar dengan komposisi Rp. 560,11 milyar atau 66,42 % bersumber dari dana pemerintah dan Rp. 283,17 milyar atau 33,58 % bersumber dari masyarakat dan tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 1.062,20 milyar dengan komposisi Rp. 682,18 milyar atau 64,22 % bersumber dari dana pemerintah dan Rp. 380.02,72 milyar atau 35,78 % bersumber dari masyarakat .

Skenario pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2005 – 2010 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 27 sebagai berikut :

TABEL 27.
PROYEKSI SKENARIO PEMBANGUNAN KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2005 - 2010 TANPA MINYAK BUMI

Nb	INDIKATOR MAKRO EKONOMI	2005 (I)	2005 (II)	2006 (I)	2006 (II)	2007 (I)	2007 (II)	2008 (I)	2008 (II)	2009 (I)	2009 (II)	2010 (I)	2010 (II)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,0	5,60	6,0	6,3	6,20	6,50	6,40	6,70	6,60	6,90	6,80	7,10
2	Inflasi (IHK 1999 – 2003)	7,0	7,5	9,2	9,7	7,3	7,5	7,0	7,2	6,8	7,0	6,5	6,8
3	Pertumbuhan Penduduk	1,34	1,34	1,34	1,34	1,30	1,32	1,30	1,32	1,30	1,32	1,30	1,32
4	Kebuthaan Inv. Total *)	600,85 100%	655,39 100%	802,09 100%	843,28 100%	928,54 100%	998,84 100%	960,78 100%	1.023,54 100%	983,22 100%	1.054,12 100%	1.002,04 100%	1.062,20 100%
5	Investasi Pemerintah*)	300,35 49,98	314,74 48,02%	544,97 67,94%	560,11 66,42%	592,55 63,82%	650,49 65,12%	612,47 63,75%	671,95 65,65	630,23 64,61%	680,24 64,53%	649,32 64,80%	682,18 64,22%
6	Investasi Swasta dan Masy. *)	300,50 50,02	340,65 51,98%	257,12 32,06%	283,17 33,58%	339,99 36,18%	348,35 34,88%	348,31 36,25%	351,159 34,35%	352,99 35,90%	373,88 35,47%	352,72 35,20%	380,02 35,78%

Sumber : Data diolah, 2005

Catatan : (I) : Skenario Realistis

(II) : Skenario Optimis

*) Dalam Milyar Rupiah)

Perkembangan ekonomi Kabupaten Lampung Timur tahun 2005 diprediksikan akan mengalami pertumbuhan semakin membaik mencapai sebesar 5,60 % dengan total PDRB atas harga konstan tahun 2000.

Jika melihat komposisi investasi tersebut tergambar dominasi investasi Pemerintah, swasta dan masyarakat pada pembangunan daerah, oleh karenanya diperlukan dukungan iklim investasi dan kemudahan lainnya yang dapat menarik investasi masuk ke Lampung Timur. Sebagai Kabupaten yang baru perlu ditingkatkan dukungan berbagai infratraktur yang menunjang investasi juga disebabkan karena iklim investasi terhambat karena tingginya angka kriminalitas sehingga menjadi daerah yang kurang menarik bagi investasi.

Asumsi dasar lainnya yang menjadi dasar perencanaan tersebut adalah inflasi yang diukur dari Indeks Harga Konsumen 1999 – 2004 sebesar 7,5 %, sehingga angka tersebut ditetapkan sebagai asumsi dasar tahun 2005 secara alamiah. Selain itu pertumbuhan penduduk diperkirakan akan tumbuh secara alamiah sebesar 1,34 % per tahun.

Hal ini memerlukan kebijakan khusus untuk menarik investasi tersebut dengan didukung penyediaan infrastruktur penunjang yang memadai, sehingga Lampung Timur akan semakin menarik.

Dalam skenario Realistis berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata tahun 2005 – 2010 sebesar 6,40 % maka pada tahun 2005 pertumbuhan diprediksi mencapai 5,0 %, dengan total PDRB mencapai sebesar Rp. 2,98 triliun. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan penduduk 1,30 % atau jumlah penduduk tengah tahun mencapai 908.277 jiwa maka diperhitungkan pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan mencapai Rp. 3.277.003,00.

Demikian pula pada tahun 2006 diprediksi pertumbuhan ekonomi diprediksi sebesar 5,60 % dan total PDRB tahun tersebut mencapai Rp. 3,12 triliun, dengan asumsi jumlah penduduk 1,34 % maka penduduk tengah tahun mencapai 917.632 jiwa maka pendapatan perkapita penduduk berdasarkan harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 3.440.173,00.

Keadaan tersebut terus meningkat sehingga diperkirakan tahun 2010 tingkat pertumbuhan ekonomi diprediksi mencapai 6,80 % dengan total PDRB Rp. 4,14 triliun dan pertumbuhan penduduk diperhitungkan 1,30 % atau dengan jumlah penduduk tengah tahun sebesar 956.027 jiwa maka pendapatan perkapita penduduk mencapai Rp. 4.328.419,00

Secara lengkap komposisi PDRB Kabupaten Lampung Timur atas harga konstan tahun 2000 berdasarkan Skenario Realistis dapat dilihat pada Tabel 28. sebagai berikut :

Tabel 28.
**PREDIKSI PDRB KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2005- 2010
ATAS HARGA KONSTAN 2000 - TANPA MINYAK BUMI
MENURUT LAPANGAN USAHA - SKENARIO REALISTIS
(Dalam Juta Rupiah)**

No.	LAPANGAN USAHA	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian	1,711,147	1,797,490	1,905,482	2,017,499	2,148,191	2,278,429
2	Pertambangan dan Penggalian	35,122	37,566	40,306	43,048	46,533	50,485
3	Industri	205,671	222,240	237,136	256,133	275,734	298,356
4	Listrik, Gas dan Air Minum	6,250	6,945	7,389	8,251	8,845	9,931
5	Konstruksi	161,620	174,256	188,096	202,683	219,203	240,423
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	521,767	558,125	594,518	639,257	688,759	753,959
7	Pengangkutan dan Komunikasi	70,541	75,132	80,613	88,965	97,680	113,384
8	Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	108,342	116,486	124,950	137,035	149,597	162,213
9	Jasa-Jasa	155,965	168,574	180,371	194,432	211,127	230,905
	Jumlah	2,978,426	3,156,814	3,358,862	3,587,302	3,845,669	4,138,084
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.00	6.00	6.20	6.40	6.60	6.80
	Pertumb. Ekonomi Rata-rata (%)						6.4
	Jumlah Penduduk Tengah Tahun (Jiwa)	908,277	917,632	927,084	936,633	946,280	956,027
	Pendapatan Perkapita (Rp.)	3,277,003	3,440,173	3,623,040	3,829,999	4,063,986	4,328,419

Sumber : Hasil Perhitungan.

Dalam skenario Optimis berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata tahu 2005 – 2010 sebesar 6,70 % maka pada tahun 2005 pertumbuhan diprediksi mencapai 5,60 %, dengan total PDRB mencapai sebesar Rp. 3,12 triliun. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan penduduk 1,30 % atau jumlah penduduk tengah tahun mencapai 917.632 jiwa maka diperhitungkan pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan mencapai Rp. 3.440.173,00.

Demikian pula pada tahun 2006 diprediksi pertumbuhan ekonomi diprediksi sebesar 6,30 % dan total PDRB tahun tersebut mencapai Rp. 3,17 triliun, dengan asumsi jumlah penduduk 1,34 % maka penduduk tengah tahun mencapai 917.632 jiwa maka pendapatan perkapita penduduk berdasarkan harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 3.449.910,00.

Keadaan tersebut terus meningkat sehingga diperkirakan tahun 2010 tingkat pertumbuhan ekonomi diprediksi mencapai 7,10 % dengan total PDRB Rp. 4,20 triliun dan pertumbuhsn penduduk diperhitungkan 1,32 % atau dengan jumlah penduduk tengah tahun sebesar 956.027 jiwa maka pendapatan perkapita penduduk mencapai Rp. 4.389.554,00

Secara lengkap komposisi PDRB Kabupaten Lampung Timur berdasarkan skenario optimis atas harga konstan tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 29. sebagai berikut :

Tabel 29.
PREDIKSI PDRB KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2005- 2010
ATAS HARGA KONSTAN 2000 - TANPA MINYAK BUMI
MENURUT LAPANGAN USAHA - SKENARIO OPTIMIS (Dalam Juta Rupiah)

No.	LAPANGAN USAHA	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian	1,712,125	1,802,577	1,916,263	2,034,612	2,172,475	2,310,610
2	Pertambangan dan Penggalian	35,142	37,672	40,534	43,413	47,059	51,198
3	Industri	205,789	222,869	238,477	258,306	278,852	302,570
4	Listrik. Gas dan Air Minum	6,254	6,965	7,431	8,321	8,945	10,072
5	Konstruksi	161,712	174,749	189,160	204,402	221,681	243,818
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	522,065	559,704	597,882	644,680	696,545	764,608
7	Pengangkutan dan Komunikasi	70,582	75,345	81,069	89,720	98,784	114,985
8	Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	108,388	116,816	125,657	138,197	151,288	164,504
9	Jasa-Jasa	178,108	169,051	181,391	196,081	213,514	234,166
	Jumlah	2,978,126	3,165,748	3,377,865	3,617,731	3,889,143	4,196,531
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.60	6.30	6.50	6.70	6.90	7.10
	Pertumb.Ekonomi Rata-rata (%)						6.70
	Jumlah Penduduk Tengah Tahun (Jiwa)	908,277	917,632	927,084	936,633	946,280	956,027
	Pertumbuhan Penduduk (%)						1.30
	Pendptan Perkapita (Rp.)	3,278,874	3,449,910	3,643,538	3,862,487	4,109,928	4,389,554

Sumber : Hasil Perhitungan.

Dari kedua Skenario pembangunan ekonomi Kabupaten Lampung Timur tahun 2005-2010 baik berdasarkan Skenario Realistis dengan rata-rata 6,4 % pertahun maupun dengan Skenario Optimis dengan pertumbuhan rata-rata 6,70 % pertahun menunjukkan bahwa sumbangan sektor yang terbesar adalah Sektor Pertanian yang sangat dominan dalam perekonomian Kabupaten Lampung Timur; dengan demikian dapat dikatakan perekonomian Lampung Timur berbasis Sektor Pertanian.

Sumbangan sektor pertanian tahun 2005 berdasarkan harga konstan tahun 2000 mencapai 57,49 % dan tahun 2006 menurun sedikit menjadi 56,94 % dan diperkirakan terus menurun menjadi 55,06 % tahun 2010. Penurunan sumbangan ini disebabkan karena faktor teknis dan produktivitas sektor pertanian lebih rendah dari sektor-sektor skunder dan sektor skunder atau sektor industri dan sektor tersier atau sektor jasa.

Sektor yang memberikan sumbangan yang cukup besar setelah sektor pertanian tahun 2005 -2010 berdasarkan harga konstan tahun 2000 adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sumbangan sektor ini tahun 2005 sebesar 17,53 % meningkat sedikit tahun 2006 menjadi 17,68 % dan terus meningkat menjadi 18,22 % tahun 2010. Peningkatan tersebut diperkirakan disebabkan faktor berkembangnya pembangunan Jalan Lintas Pantai Timur Lampung dan dari jasa perdagangan hasil pertanian.

Sektor terbesar ketiga adalah sektor industri; sektor ini memberikan sumbangan sebesar 6,91 % tahun 2005 dan meningkat sedikit menjadi 7,04 % tahun 2006 serta diprediksi akan memberikan sumbangan 7,21 % pada tahun 2010. Sumbangan ini diprediksi akibat tumbuhnya industri pengolahan hasil pertanian baik skala kecil maupun menengah.

Sektor-sektor lainnya memberikan sumbangan yang relatif kecil dibawah 6 % dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Timur.

Secara lengkap Sumbangan Sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Timur tahun 2005 -2010 atas harga konstan tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 30 sebagai berikut :

Tabel 30.
PREDIKSI SUMBANGAN SEKTOR PDRB KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2005- 2010
ATAS HARGA KONSTAN 2000 - TANPA MINYAK BUMI
MENURUT LAPANGAN USAHA (DALAM %)

No.	LAPANGAN USAHA	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian	57.49	56.94	56.73	56.24	55.86	55.06
2	Pertambangan dan Penggalian	1.18	1.19	1.20	1.20	1.21	1.22
3	Industri	6.91	7.04	7.06	7.14	7.17	7.21
4	Listrik. Gas dan Air Minum	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.24
5	Konstruksi	5.43	5.52	5.60	5.65	5.70	5.81
6	Perdagangan. Hotel dan Restoran	17.53	17.68	17.70	17.82	17.91	18.22
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.37	2.38	2.40	2.48	2.54	2.74
8	Keuangan. Sewa dan Jasa Perusahaan	3.64	3.69	3.72	3.82	3.89	3.92
9	Jasa-Jasa	5.24	5.34	5.37	5.42	5.49	5.58
	Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

BAB IV

ANALISIS ISU STRATEGIS

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera tersebut terlebih dahulu seluruh kebutuhan dasar penduduk seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi dengan baik. Jika kebutuhan dasar penduduk tersebut telah terpenuhi maka pada tahap selanjutnya adalah membangun daya saing masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya upaya peningkatan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi rakyat disertai dengan meningkatkan stabilitas keamanan bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka isu strategis Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

4.1 Isu Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk

Isu pemenuhan kebutuhan dasar penduduk sangat berhubungan dengan upaya peningkatan pendapatan penduduk. Telah diketahui bahwa sebagian besar penduduk Lampung Timur bekerja di Sektor Pertanian dan bertani atau buruh tani sebagai pekerjaan utama dan sumber utama pendapatan keluarga. Rendahnya harga produk pertanian yang diterima petani dan tingginya biaya produksi serta iklim dan cuaca yang tidak baik menyebabkan rendahnya produksi dan pendapatan keluarga petani akibatnya petani sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi keluarganya. Sementara itu lahan pertanian yang potensial masih cukup banyak yang belum terolah. Kondisi ini ditunjukkan oleh fakta masih cukup banyaknya jumlah penduduk miskin di Lampung Timur baik karena alasan ekonomi maupun alasan non-ekonomi. Jumlah KK PS alasan ekonomi terus meningkat dari 50.696 KK (23%) pada tahun 2001 menjadi 58.638 KK (26%) tahun 2004 adapun KK PS alasan non-ekonomi meningkat dari 19.266 KK (9%) tahun 2001 menjadi 76.306 KK (34%). Sebagian besar dari jumlah tersebut berdomisili di daerah pedesaan.

Oleh karena itu pembangunan pertanian dan pemberdayaan masyarakat desa sangat diperlukan. Pembangunan pertanian tersebut harus berwawasan agribisnis dan agroindustri yakni dengan memperhatikan kecenderungan permintaan pasar atas produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh para petani. Pengembangan sentra produksi menurut potensi wilayah setempat perlu dilakukan agar mampu

meningkatkan produksi dan sekaligus pemasaran. Petani memproduksi komoditas yang dibutuhkan oleh pasar secara efisien sehingga menguntungkan dan mampu meningkatkan pendapatan petani.

Jaminan pasokan sarana produksi pertanian dengan harga yang terjangkau dan wajar serta tepat waktu sangat diperlukan, peningkatan teknik budidaya dan pasca panenpun perlu dilakukan disertai dengan pengembangan pasar yang efisien bagi komoditas pertanian sehingga petani memperoleh harga yang menguntungkan. Pemberdayaan kelembagaan petani dan koperasi pertanian perlu ditingkatkan lagi. Begitu juga dengan pengembangan infrastruktur pedesaan dan pembangunan sub-terminal agribisnis di pusat-pusat produksi serta terminal agribisnis di pusat-pusat pasar.

4.2 Isu Daya Saing di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan IPTEK

Pada tahun 2010 Indonesia akan memasuki era perdagangan bebas. Pada era tersebut pengusaha yang efisienlah yang akan memenangkan persaingan. Kunci efisiensi adalah adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus menerus disertai dengan pengembangan daya adaptasi dan inovasi para petani dan pelaku bisnis. Melalui upaya tersebut diharapkan produktivitas usahatani meningkat dan daya saing produk juga meningkat. Di samping itu pengembangan teknologi pengolahan hasil pertanian (agroindustri) merupakan salah satu upaya yang sangat penting guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Dengan dukungan pemasaran hasil yang efisien diharapkan peningkatan produksi pertanian akan diikuti dengan peningkatan pendapatan dan keuntungan petani.

Beberapa tahun terakhir ini volume ekspor produk pertanian Lampung menunjukkan gejala yang cenderung menurun meski dalam kondisi nilai rupiah terdepresiasi. Seharusnya pada kondisi tersebut volume dan nilai ekspor cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa produk pertanian dan produk ekspor kita masih memiliki daya saing yang lemah.

Lemahnya daya saing produk pertanian ini disebabkan oleh sulitnya para petani memperoleh benih atau bibit unggul bersertifikat dengan harga yang wajar, ketersediaan sarana produksi pupuk dan obat-obatan selalu terlambat dan harganya mahal, ketersediaan air irigasi relatif terbatas dan fluktuasi debit antar musim sangat tinggi, akibatnya pertumbuhan tanaman tidak optimal sehingga produktivitas rendah. Pada saat panen petani dihadapkan pada harga yang rendah sehingga petani

kerugian yang besar. Kurang efektifnya kebijakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah membuat harapan keuntungan yang besar dari setiap komoditi yang diusahakan menjadi sirna. Kondisi ini terjadi karena sistem pemasaran produk pertanian bekerja tidak efisien. Peran kelompok tani dan koperasi pertanian dalam bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil sangat lemah sehingga posisi tawar petani yang sesungguhnya pemilik hasil pertanian justru sangat lemah dihadapan para pedagang.

Oleh karena itu pada masa mendatang program peningkatan daya saing ekonomi nasional mutlak diperlukan. Daya saing nasional tersebut hanya dimungkinkan terwujud manakala kita mampu meningkatkan daya saing lokal dan regional. Fakta ini menunjukkan bahwa peningkatan daya saing ekonomi Lampung Timur pada lima tahun mendatang merupakan isu yang sangat strategis yang perlu segera diatasi. Daya saing sosial budaya perlu ditingkatkan dengan mengembangkan kearifan budaya masyarakat melalui penggalian dan pengembangan. Disamping itu perlu dikembangkan budaya yang mampu menjadi ciri khas Lampung Timur yang dapat dikembangkan dan menjadi daya tarik dan pengembangan produktivitas.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat menjadi pemacu untuk pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilakukan mulai dari tingkat pendidikan dasar dengan mengembangkan kurikulum dan pelatihan secara terprogram yang mampu memberikan landasan penguasaan iptek.

4.3 Isu Kesehatan

Produktivitas dan pendapatan tenaga kerja sangat ditentukan oleh derajat kesehatan pekerja tersebut. Hal ini berarti juga bahwa produktivitas masyarakat sangat ditentukan oleh derajat kesehatan masyarakatnya. Upaya peningkatan akses masyarakat miskin dan para petani pada pelayanan kesehatan yang prima perlu dilakukan terutama pada tingkat PUSKESMAS. Hal ini dilakukan melalui peningkatan fasilitas peralatan medis dan rontgen terutama bagi masyarakat miskin yang tidak mampu menuju rumah sakit kabupaten.

4.4 Infrastruktur pedesaan sangat lemah

Jalan-jalan kolektor primer, skunder dan tersier ke sentra-sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan sangat buruk. Kondisi ini menyebabkan biaya

pemasaran sarana produksi dan hasil produksi pertanian sangat mahal. Akibatnya sedikit sekali insentif yang tersedia bagi petani dalam upaya mengembangkan usahatani. Sarana pasar desa sangat terbatas dan kurang lengkap begitu juga sarana informasi pasar bagi para petani. Informasi pasar lebih banyak dikuasai oleh para pedagang sedangkan para petani kurang mendapatkan informasi tersebut.

Fasilitas sumber energi listrik juga terbatas sehingga kurang menarik minat para investor dalam menanamkan modal di Lampung Timur. Jika infrastruktur pedesaan ini dikembangkan maka nilai tambah pertanian akan semakin tinggi lagi.

4.5 Isu Ketertiban dan Ketentraman

Masalah kriminalitas merupakan persoalan utama bagi terciptanya masyarakat yang aman tentram dan damai. Meningkatnya kriminalitas di Kabupaten Lampung Timur seperti pembegalan dan pencurian sepeda motor cukup mengganggu bagi tidak hanya bagi masyarakat tapi juga bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Lampung Timur.

Persoalan gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Lampung Timur cukup kompleks, tidak hanya disebabkan oleh terbatasnya jumlah aparat keamanan tapi juga terkait dengan persoalan kemiskinan, pengangguran dan konflik etnis. Data gangguan kantibmas tahun 2001 sampai tahun 2004 menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan data terakhir pada tahun 2004 terjadi 542 kasus kejahatan dengan kasus yang paling banyak yaitu pencurian berat, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, pemerasan dan penganiayaan berat. Gangguan kantibmas yang lain yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur yaitu perjudian, pencurian kayu, narkoba dan obat-obatan dan pembunuhan.

Di samping itu, Kabupaten Lampung Timur memiliki wilayah laut yang posisinya sangat strategis, jika tidak dijaga akan memberikan ruang terjadinya pencurian kekayaan laut. Juga permasalahan eksplorasi laut oleh masyarakat nelayan merupakan permasalahan tersendiri yang harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Masalah gangguan kantibmas di Kabupaten Lampung Timur, memerlukan penanganan serius oleh pemerintah Kabupaten Lampung Timur, melalui-melalui berbagai kebijakan dan program pada setiap tahun anggaran. Kebijakan Kabupaten Lampung Timur dalam menangani masalah gangguan Kantibmas dengan masyarakat

memfasilitasi pembentukan kapolsek di Kecamatan-Kecamatan cukup membantu dalam mengurangi jumlah gangguan Kantibmas.

Kebijakan dan program lima tahun ke depan di bidang kantibmas secara kuantitatif gangguan kantibmas harus bisa menurun jumlahnya dengan kebijakan melanjutkan berbagai program yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan menangani gangguan kantibmas dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

4.6 Isu Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah

Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, merupakan gejala yang hampir menyeluruh di semua pemerintah daerah. Isu ini kerap kali muncul karena pemerintah gagal dalam memenuhi kepuasan publik atas pelayanan yang diberikannya, bahkan dalam praktek pelayanan publik, negara melalui organisasi dan pejabat pemerintah atau orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan publik seringkali dianggap telah melakukan bentuk-bentuk *maladmisitration*. Berbagai gejala rendahnya mutu Pelayanan Publik antara lain disebabkan oleh (a) Tingkat kepedulian (*responsiveness*) aparatur pemerintah dalam menangani berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan kurang optimal; (b) Belum dikembangkan penerapan standar prosedur pelayanan yang baku; (c) Terbatasnya penyelenggaraan diklat-teknis fungsional di bidang pelayanan, sehingga cenderung disiplin, profesionalisme dan etika pelayanan aparatur pemerintah belum memadai; (d) Belum adanya kebijakan sistem remunerasi yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik; (e) Pemanfaatan teknologi Informasi dalam pelayanan publik belum optimal; (f) Komitmen pimpinan untuk melakukan tindakan tegas dan konsisten terhadap pelaku KKN, termasuk pungli dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal.

Berbagai penyebab rendahnya kualitas pelayanan publik tersebut kemudian sejumlah alternatif pemecahan masalah juga dicoba diajukan mulai dari wacana perubahan orientasi birokrasi dari model Weberian ke Modelnya Osborne dan Gaebler, perlunya peningkatan SDM dengan menyekolahkan birokrat-birokrat ke jenjang pendidikan S2, sampai pada alternatif meningkatkan retribusi dengan alasan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan biaya operasional.

Perlunya peningkatan pelayanan publik karena hakekat pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan dilakukan dengan lebih mendekatkan fungsi pemerintahan kepada

Peran Pemerintah Daerah bertambah seiring dengan penyerahan sebagian besar kewenangan yang selama ini dimiliki Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Sangat disadari bahwa tingkat kemampuan aparat daerah sangat berbeda-beda dalam merespon peningkatan tanggung jawab tersebut. Sebagian besar Pemerintah Daerah masih kebingungan menghadapi perubahan drastis yang terjadi.

Sekarang di era otonomi daerah tuntutan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kian meningkat. Alasan yang paling sederhana, karena pemerintah daerah diberikan kewenangan dan kekurangan yang cukup memadai untuk bisa memberikan pelayanan pada masyarakat. Dari aspek struktur organisasi birokrasi pemerintah daerah pun sekarang relatif lebih otonom dan tidak terlalu hirarkis.

Pada tingkat pelaksanaan program, untuk meningkatkan pelayanan perlu ada Standar pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah penentuan bentuk, ukuran dan/atau pedoman penyelenggaraan pelayanan umum minimal yang didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan pembiayannya. Sejauh ini belum semua dinas memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga penentuan pelayanan publik belum terukur dan belum memiliki bobot akuntabilitas, serta standar pengawasan belum terukur.

BAB V

VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

5.1 Visi

"Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar (*Basic Need*) Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur, Serta Memiliki Daya Saing Yang Tinggi Dibidang Ekonomi, Sosial Budaya, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi".

Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2010 Ini mengandung pengertian bahwa dalam kurun 5 tahun mendatang Kabupaten Lampung Timur diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat secara menyeluruh dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya baik jasmani maupun rohani, makhluk pribadi maupun sosial dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga masyarakat akan mampu bersaing di segala bidang.

5.2 Misi

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui penetapan Misi Pembangunan. Adapun misinya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Dan Meningkatkan Program Pembangunan Pertanian Di Pedesaan Serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat.
Mewujudkan visi Kabupaten Lampung Timur agar Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar (*Basic Need*) Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur, Serta Memiliki Daya Saing Yang Tinggi Dibidang Ekonomi, Sosial Budaya, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi dicapai dengan dengan cara melaksanakan dan meningkatkan program pembangunan pertanian di Pedesaan serta pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat. Oleh karena itu disusun strategi pembangunan daerah sebagai berikut :
 - a. Optimalisasi anggaran pembangunan pedesaan.
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian pedesaan.
 - c. Peningkatan keterampilan dan penguasaan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan bagi masyarakat.

- d. Pengembangan manajemen di bidang Teknologi.
 - e. Pengembangan kawasan pedesaan secara terpadu.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing dibidang pendidikan masyarakat.
Mewujudkan visi Kabupaten Lampung Timur agar Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar (*Basic Need*) Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur, Serta Memiliki Daya Saing Yang Tinggi Dibidang Ekonomi, Sosial Budaya, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi dengan meningkatkan kualitas dan daya saing dibidang pendidikan masyarakat disusun strategi pembangunan daerah sebagai berikut:
- a. Pengembangan manajemen berbasis sekolah.
 - b. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik di semua tingkatan pendidikan.
 - c. Pengembangan program keterampilan/kejuruan untuk memenuhi tuntutan dunia usaha.
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang proses belajar mengajar di semua tingkatan.
 - e. Pengawasan yang ketat terhadap kualitas pendidikan.
 - f. Pengembangan dan pemantapan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah
 - g. Peningkatan dan pengembangan proses pembelajaran
3. Menumbuhkembangkan daya saing dan daya beli masyarakat pedesaan serta perbaikan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Mewujudkan visi Kabupaten Lampung Timur agar Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar (*Basic Need*) Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur, Serta Memiliki Daya Saing Yang Tinggi Dibidang Ekonomi, Sosial Budaya, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi dengan cara menumbuhkembangkan daya saing dan daya beli masyarakat pedesaan serta perbaikan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat disusun strategi pembangunan daerah sebagai berikut:
- a. Penguatan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat pedesaan.
 - b. Menciptakan instrumen peraturan yang dapat mewujudkan mekanisme pasar yang adil dan berpihak kepada masyarakat pedesaan.
 - c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di pedesaan.
 - d. Pengembangan kegiatan usaha pertanian (agribisnis) secara terpadu.

- e. Mendorong tumbuhkembangnya investasi di sektor agribisnis dan agroindustri yang memiliki hubungan fungsional dengan usaha para petani.
 - f. Program perbaikan gizi bagi masyarakat pedesaan.
 - g. Peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan.
 - h. Pembangunan infrastruktur penunjang pelayanan kesehatan masyarakat.
4. Berupaya menciptakan rasa aman dalam berusaha dan bekerja serta menumbuhkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lampung Timur.
- Mewujudkan visi Kabupaten Lampung Timur agar Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar (*Basic Need*) Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur, Serta Memiliki Daya Saing Yang Tinggi Dibidang Ekonomi, Sosial Budaya, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi dengan Berupaya menciptakan rasa aman dalam berusaha dan bekerja serta menumbuhkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lampung Timur disusun strategi pembangunan daerah sebagai berikut:
- a. Pembinaan Kamtibmas.
 - b. Pengembangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - c. Memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum dalam rangka menciptakan Kamtibmas.
 - d. Membangun komitmen dengan pelaku bisnis untuk berinvestasi.
 - e. Membantu penyediaan fasilitas program Kamtibmas.
5. Memperbaiki infrastuktur penunjang produktivitas ekonomi masyarakat.
- Mewujudkan visi Kabupaten Lampung Timur agar Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar (*Basic Need*) Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur, Serta Memiliki Daya Saing Yang Tinggi Dibidang Ekonomi, Sosial Budaya, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi disusun strategi pembangunan daerah sebagai berikut :
- a. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi.
 - b. Pembangunan sistem transportasi yang kompetitif.
 - c. Pengembangan jasa pelayanan transportasi.
 - d. Pengembangan sistem jaringan transportasi untuk membuka daerah terpencil.

- e. Pengembangan sub-terminal agribisnis di sentra-sentra produksi pertanian dan terminal agribisnis di sentra-sentra pasar konsumsi.
6. Meningkatkan kehidupan sosial budaya, pariwisata dan agama.
Mewujudkan visi Kabupaten Lampung Timur agar Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar (*Basic Need*) Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur, Serta Memiliki Daya Saing Yang Tinggi Dibidang Ekonomi, Sosial Budaya, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi disusun strategi pembangunan daerah sebagai berikut:
- a. Pemantapan kerukunan hidup antar dan inter umat beragama.
 - b. Peningkatan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan.
 - c. Pemanfaatan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral bagi pembangunan.
 - d. Membangun ketahanan sosial budaya masyarakat.
 - e. Pengembangan potensi budaya kesenian dan pariwisata.
 - f. Mengembangkan objek wisata daerah berbasis masyarakat.
7. Menciptakan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat oleh segenap aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
Mewujudkan visi Kabupaten Lampung Timur agar Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar (*Basic Need*) Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur, Serta Memiliki Daya Saing Yang Tinggi Dibidang Ekonomi, Sosial Budaya, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi dengan Menciptakan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat oleh segenap aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur disusun strategi pembangunan daerah sebagai berikut:
- a. Membangun sistem pelayanan prima di semua tingkatan pemerintahan.
 - b. Pengembangan pemerintah Desa menjadi Kelurahan.
 - c. Deregulasi dibidang perizinan.
 - d. Peningkatan kualitas aparatur Pemerintah Daerah.
 - e. Penegakan disiplin bagi aparatur Pemerintah Daerah.

5.3 Arah Kebijakan Umum

Tujuan pembangunan jangka menengah tahun 2005–2010 adalah mewujudkan visi Kabupaten Lampung Timur agar “Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar (*Basic Need*) Bagi Seluruh Lapisan

Masyarakat Kabupaten Lampung Timur, Serta Memiliki Daya Saing Yang Tinggi Dibidang Ekonomi, Sosial Budaya, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi". Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu dijabarkan dalam arah kebijakan umum.

- a) Fungsi Ekonomi, Sub Fungsi Transportasi dengan Kebijakan :
 - 1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik guna mendorong pemerataan pembangunan, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
 - 2. Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan secara efisiensi, handal, berkualitas dan aman.
- b) Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, Sub Fungsi Pembangunan Perumahan dengan Kebijakan:
 - 1. Meningkatkan sarana prasarana dasar permukiman.
- c) Fungsi Ekonomi, Sub Fungsi Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM dengan Kebijakan:
 - 1. Peningkatan dan pengembangan perkoperasian, UKM dan lembaga keuangan pedesaan.
 - 2. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan pengembangan ekspor dan penguatan institusi pasar.
 - 3. Pengembangan sarana dan prasaran pemasaran yang efisien
 - 4. Pengembangan iklim investasi pembukaan penanaman modal dan pengembangan perusahaan daerah.
- d) Fungsi Ekonomi, Sub Fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan dengan Kebijakan:
 - 1. Mengembangkan usaha pertanian dengan wawasan bisnis. menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian.
 - 2. Mengembangkan sistem ketahanan pangan dan gizi melalui peningkatan ketersediaan komoditas pangan dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai.
 - 3. Pengembangan desa mandiri pangan
 - 4. Meningkatkan kemampuan dan produktivitas usaha melalui optimalisasi sumberdaya pertanian, peternakan dan perikanan.
 - 5. Pengembangan kawasan sentra agribisnis dan agroindustri

- e.) Fungsi Ekonomi, Sub Fungsi Tenaga Kerja dengan Kebijakan:
1. Memperluas lapangan kerja bagi pencari kerja.
 2. Meningkatkan kualitas SDM pencari kerja.
 3. Meningkatkan mobilitas tenaga kerja.
- f) Fungsi Ekonomi, Sub Fungsi Industri dan Konstruksi dengan Kebijakan:
1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang didukung oleh pembangunan industri, peningkatan pemanfaatan dan penguasaan teknologi.
 2. Pengembangan penerapan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan.
- g) Fungsi Ekonomi, Sub Fungsi Bahan Bakar dan Energi dengan Kebijakan:
1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha di bidang energi
 2. Mendorong pengembangan energi alternatif secara berkelanjutan
- h) Fungsi Ekonomi, Sub Fungsi Pengairan dengan Kebijakan:
1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik guna mendorong pemerataan pembangunan, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, pelayanan kebutuhan masyarakat
- i) Fungsi Ekonomi, Sub Fungsi Telekomunikasi dan informatika dengan Kebijakan:
1. Mendayagunakan informasi dan komunikasi guna peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.
- j) Fungsi Pariwisata dan Budaya, Sub Fungsi Pengembangan Pariwisata dan Budaya dengan Kebijakan:
1. Mengembangkan industri pariwisata yang didukung pengembangan dan pengelolaan produk dan obyek wisata.
 2. Pengembangan kebudayaan dan kesenian secara profesional.
- k) Fungsi Kesehatan, Sub Fungsi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Kebijakan:
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui usaha — usaha pelayanan dan penyuluhan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
- l) Fungsi Kesehatan, Sub Fungsi Keluarga Berencana dengan Kebijakan:
1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk. peningkatan kualitas melalui keluarga berencana.
- m) Fungsi Perlindungan Sosial, Sub Fungsi Perlindungan Sosial Lainnya dengan Kebijakan :
1. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberikan bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- n) Fungsi Perlindungan Sosial, Sub Fungsi Pemberdayaan Perempuan dengan Kebijakan:
1. Meningkatkan kualitas SDM perempuan.
 2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan perlindungan terhadap perempuan.
- o) Fungsi Pendidikan, Sub Fungsi Pendidikan Usia Dini dengan Kebijakan:
1. Mengupayakan perluasan kesempatan belajar.
 2. Mendorong berkembangnya pendidikan kejuruan penyedia tenaga kerja siap pakai
- p) Fungsi Pendidikan, Sub Fungsi Pendidikan Dasar dengan Kebijakan:
1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan proses penyelenggaraan pendidikan.
 2. Pengembangan kurikulum lokal sesuai kebutuhan pembangunan daerah
- q) Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, Sub Fungsi Konservasi Sumber Daya Alam dengan Kebijakan:
1. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diimbangi dengan pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya alam.
 2. Pengembangan usaha masyarakat sekitar kawasan hutan berbasis masyarakat
- r) Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, Sub Fungsi Tata Ruang dan Pertanahan dengan Kebijakan :
1. Mendorong pengembangan wilayah.
 2. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan & penataan ruang wilayah.
- s) Fungsi Pelayanan Umum, Sub Fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan dengan Kebijakan:
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui penataan kelembagaan, manajemen publik dan peningkatan kapasitas SDM aparatur.
 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
 3. Memantapkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kebijakan desentralisasi keuangan.
 4. Meningkatkan mutu hasil penelitian dan pendataan guna menunjang perencanaan dan pengembangan pembangunan daerah.

5. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dengan penerapan Catur Tertib, antara lain :

- (a) Tertib aturan hukum dan kelembagaan;
 - (b) Tertib administrasi perkantoran;
 - (c) Tertib Pelayanan Publik; dan
 - (d) Tertib Penegakan disiplin pegawai dan penilaian kinerja aparatur.
- t) Fungsi Ketertiban dan Keamanan, Sub Fungsi Hukum, Ketertiban dan Keamanan lainnya.

Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB VI

MATRIKS INDIKASI RENCANA PROGRAM

Propinsi / Kabupaten / Kota
RPJM Daerah Periode
Visi

Lampung Timur
2005 – 2010

Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar (Basic Need) Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur, Serta Memiliki Daya Saing Yang Tinggi Dibidang Ekonomi, Sosial Budaya, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Misi

1. Melaksanakan dan meningkatkan program pembangunan pertanian di Pedesaan serta pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing dibidang pendidikan masyarakat.
3. Menumbuhkembangkan daya saing dan daya beli masyarakat pedesaan serta perbaikan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
4. Berupaya menciptakan rasa aman dalam berusaha dan bekerja serta menumbuhkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lampung Timur.
5. Memperbaiki infrastruktur penunjang produktivitas ekonomi masyarakat.
6. Meningkatkan kehidupan sosial budaya, pariwisata dan agama.
7. Menciptakan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat oleh segenap aparaturn Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi		KET.
					(Rp)	Sumber	
1. Mengembangkan usaha pertanian dengan wawasan bisnis menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian	1. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga pemasaran bagi produk-produk pertanian 2. Meningkatkan kualitas SDM pertanian di pedesaan melalui pendidikan dan pelatihan 3. Pemberdayaan kelembagaan ekonomi petani di pedesaan (kelompok tani, koperasi, dan lembaga kemitraan)	1. Berkembangnya Sistem Agribisnis komoditas pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan unggulan daerah 2. Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dalam arti luas	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dalam arti luas 2. Pengembangan Industri Perbenihan Pertanian 3. Pengoptimalan Pengendalian Hama terpadu (PHT) 4. Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian	Dinas Pertanian, Kehutanan & Perkebunan, Peternakan, Perikanan & Kelautan	1.904.740.500	APBD, APBN	
					168.249.900		
					1.999.891.584		

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (Rp)		KET.
						Sumber	
	4. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengolahan hasil pertanian 5. Mengembangkan sistem informasi pertanian 6. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga penyuluhan pertanian 7. Meningkatkan Produktivitas dan kualitas produk pertanian melalui penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi, efisien usaha tani, pelayanan Informasi Pasar (PIP) dan pengamanan produksi. 8. Meningkatkan pembinaan dan atau dukungan pelayanan/fasilitas agribisnis	3. Meningkatkan pendapatan usahatani dan petani	5. Pemberdayaan petani dalam Penerapan Teknologi anjuran dan Pemanfaatan Informasi Pertanian 6. Peningkatan Akses petani Dalam permodalan 7. Peningkatan Peran Kelembagaan Pertanian 8. Pengembangan kemitraan usaha tani 9. Pengembangan Partisipasi masyarakat 10. Pengembangan kawasan agropolitan 11. Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran produk pertanian 12. Pengembangan subterminal agribisnis dan terminal agribisnis 13. Pengembangan teknologi tepat guna dibidang produksi dan pemasaran hasil pertanian 14. Pengembangan teknologi budidaya ikan dan pengembangan alat tangkap ikan		60.000.000 986.700.000 78.000.000 120.000.000		

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (Rp)		KET.
						Sumber	
2. Mengembangkan sistem ketahanan pangan dan gizi melalui peningkatan ketersediaan komoditas pangan dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai	1. Peningkatan Ketahanan pangan dan Gizi keluarga 2. Pengembangan desa mandiri pangan	1. Meningkatnya Ketersediaan bahan Pangan Beras dan non Beras	15. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian berbasis masyarakat desa 1. Pengembangan Diversifikasi pangan dan gizi 2. Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan gizi	Dinas Pertanian, Kehutanan & Perkebunan	1.250.000.000 1.000.000.000	APBD	
3. Pengembangan sarana dan prasarana, ketersediaan sumber air dan kelembagaan pengelola sumberdaya pengairan	1. Peningkatan pelestarian, Pengelolaan Sumber Daya Air dan Lahan 2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Rawa dan pelimpahan tanggung jawab pengelolaan jaringan kepada P3A atau Gabungan P3A secara bertahap.	1. Berfungsinya sarana dan prasarana pengairan secara berkelanjutan 2. Meningkatnya areal tanam dan intensitas tanam 3. Terwujudnya kemandirian organisasi masyarakat pengelola air dalam pengelolaan jaringan irigasi 4. Meningkatnya kinerja Dewan air	1. Peningkatan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengairan 2. Pengembangan sarana irigasi air tanah 3. Pemberdayaan P3A 4. Penyerahan pengelolaan irigasi kepada P3A 5. Konservasi dan rehabilitasi sumber air baku dan air tanah 6. Pengendalian banjir pada kawasan pemukiman 7. Pengujian usahatani pada berbagai kelas irigasi	Pengairan	5.000.000.000 1.750.000.000 1.500.000.000 500.000.000 6.000.000.000 5.000.000.000 1.250.000.000	APBD, APBN	

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (Rp)		KET.
						Sumber	
	3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi untuk menunjang swasembada pangan. 4. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana air baku dan air tanah pada daerah - daerah rawan/rentan kekeringan 5. Peningkatan pengendalian banjir pada daerah pemukiman, areal pertanian dan pengendalian kerusakan pantai dan hutan serta pengatur struktur fisik bidang pengairan 6. Peningkatan Ketrampilan dan Kualitas SDM bidang pengairan	5. Meningkatnya pemanfaatan dan produktifitas sumber-sumber air 6. Meningkatnya kualitas swasembada pangan 7. Berfungsinya kelembagaan P3A 8. Berkurangnya bencana banjir 9. Kualitas aparatus dan SDM pengairan meningkat 10. Meningkatnya ketersediaan air untuk irigasi 11. Terjaganya fungsi ekosistem mangrove 12. Penyusunan Tata Ruang laut dan pesisir Timur Kabupaten Lampung Timur 13. Penegakan supremasi hukum di laut dan pesisir. 14. Reboisasi hutan dan rehabilitasi sumberdaya alam pantai	8. Pengembangan hutan mangrove	Dinas Perkebunan & Kehutanan	1.250.000.000	APBD	

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (Rp)		KET.
					(Rp)	Sumber	
4. Meningkatkan kemampuan dan produktivitas usaha melalui optimalisasi sumberdaya pertanian, kehutanan, Perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan	1. Pengembangan sumberdaya sarana dan prasarana pertanian, kehutanan, Perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan	1. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pertanian, kehutanan, Perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan	1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, kehutanan, Perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan	Distan, Disbunhut, Diskan	8.859.614.760	APBD, APBN	
	2. Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, kehutanan, Perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan	2. Peningkatan Keterampilan Petani dan penguasaan IPTEK Pertanian, kehutanan, Perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan	2. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pertanian, kehutanan, Perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan	Disbunhut, Diskan	634.584.000		
5. Mengupayakan perluasan kesempatan belajar	1. Penyempurnaan sistem serta pengelolaan pendidikan dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses perbaikan mutu pendidikan	1. Meningkatkan sistem pengelolaan pendidikan dan partisipasi warga dalam meningkatkan mutu pendidikan	1. Pengembangan sekolah PADU (Pendidikan Anak Usia Dini). 2. Memberikan Beasiswa Kursus 3. Pengelenggaraan program Life, Skill bagi remaja dan masyarakat	Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas)	500.000.000 550.000.000 320.000.000	APBD	

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi		KET.
					(Rp)	Sumber	
6. Meningkatkan kualitas pendidikan.	1. Meningkatkan pemerataan pendidikan Dasar Meningkatkan peran dan fungsi serta kualitas lembaga penyelenggaraan pendidikan dasar.	1. Meratanya penyelenggaraan pendidikan dasar di semua lapisan masyarakat. 2. Berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dasar sebagai penunjang mutu pendidikan yang lebih terarah.	1. Pemilihan guru berprestasi TK, SD dan SMP	Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas)	225.000.000	APBD, APBN	
			2. Bantuan pengadaan meubelair untuk TK, SD dan SMP		2.250.000.000		
			3. Rehabilitasi SD/MI		34.830.000.000		
			4. Bantuan alat permainan, alat peraga TK		320.000.000		
			5. Peningkatan mutu guru melalui KKG TK		230.000.000		
			6. Peningkatan mutu guru melalui KKGSD		240.000.000		
			7. Workshop kurikulum berbasis kompetensi-kompetensi KBK (TK, SD, SMP)		381.000.000		
			8. Uji mutu bahasa Lampung.		306.100.000		
7. Mengupayakan perluasan kesempatan belajar	1. Meningkatkan pemerataan pendidikan menengah	1. Meningkatkan perluasan pemerataan pendidikan menengah	1. Promosi kompetensi siswa SMK	Dikmenjurti	442.125.000	APBD	
			2. Perluasan akses		476.140.000		
			3. Badan Penyelenggaraan Olahraga Pelajar		374.110.000		

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi		KET.
					(Rp)	Sumber	
8. Mengupayakan perluasan kesempatan belajar	1. Meningkatkan pemerataan pendidikan Tinggi	1. Meningkatnya serta pemerataan pendidikan menengah	1. Bantuan Penelitian Perguruan Tinggi	Dikmenjurti	500.000.000	APBD	
9. Memperbaiki kurikulum pendidikan yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan.	1. Perbaikan kurikulum pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan nyata masyarakat.	1. Terciptanya sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan masyarakat.	1. Sosialisasi penyelenggaraan UNAS bagi peserta didik dan pengelola lembaga kursus. 2. Uji mutu pelajaran	Dikmenjurti	183.652.000 360.510.000	APBD	
10. Mengupayakan perbaikan sarana dan prasarana.	2. Dukungan pengadaan, peningkatan dan perluasan sarana prasarana pendidikan.	1. Terciptanya kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan.	1. Bantuan buku mata pelajaran SMA/SMK 2. Radio pendidikan 3. Bantuan alat Laboratorium IPA 4. Pembangunan dan Revitalisasi Gedung	Dikmenjurti	820.000.000 1.020.300.000 1.136.000.000 37.410.521.000	APBD, APBN	
11. Memperluas Lapangan Kerja bagi pencari kerja	1. Dukungan dan Pengembangan lembaga-lembaga ketenagakerjaan	1. Terciptanya lembaga Ketenagakerjaan yang dapat memperluas lapangan kerja	1. Sosialisasi UU Ketenagakerjaan dan Pengawasan Perusahaan 2. Pemberian bantuan peralatan dan permodalan	Sosnakertrans	312.888.000 7.822.200.000	APBD, APBN	

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (Rp)		KET.
						Sumber	
	2. Memperluas lapangan pekerjaan melalui peningkatan aktivitas perekonomian rakyat 3. Pelatihan dan ketrampilan bagi pencari kerja, pembinaan dan peningkatan produktifitas dan kesempatan kerja	2. Terciptanya lapangan pekerjaan	3. Pemberian bantuan bagi lembaga ketenagakerjaan dalam rangka kemudahan perijinan		646.182.000		
12. Meningkatkan kualitas SDM pencari kerja	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pencari kerja untuk mencapai tenaga kerja yang berkompetensi Tinggi	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Tenaga Kerja 2. Terciptanya pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan	1. Pelatihan bagi pencari kerja : • Menjahit • Elektronik • Perbengkelan • Kecantikan • Pembuatan Souvenir	Sosnakertrans	3.060.861.000	APBD	
13. Meningkatkan mobilitas tenaga kerja	1. Mengembangkan Pendidikan Pelatihan dan Pembinaan untuk membangun kemandirian berlawanan kewirausahaan 2. Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	1. Terciptanya kemandirian	1. Penyuluhan HIP bagi Tenaga kerja dan Pengusaha 2. Bimbingan Tenaga Kerja mandiri dan terdidik 3. Pembinaan Kewirausahaan	Sosnakertrans	374.105.000 301.300.000 360.510.000	APBD	

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi		KET.
					(Rp)	Sumber	
14. Peningkatan dan pengembangan perkoperasian, UKM	1. Penguatan kelembagaan dan usaha koperasi, LKM, LSM, dan UKM	1. Meningkatnya Jumlah Koperasi, LKM, LKS dan UKM	1. Penciptaan pelayanan perijinan	Dinas Perindagkop	350.000.000	APBD	
	2. Meningkatkan kualitas kewirausahaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi	2. Meningkatnya Jumlah Koperasi	2. Peningkatan kemampuan SDM dalam pengembangan usaha		1.391.421.000		
15. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan pengembangan ekonomi dan penguatan institusi pasar	3. Pengembangan dan peningkatan sumber daya koperasi, LKM, UKM.	3. Meningkatnya kualitas pengusaha kecil, menengah dan koperasi	3. Pemasyarakatan kewirausahaan	Dinas Perindagkop, Kantor Pasar, Setdakab	336.900.000		
	4. LKS dan lembaga usaha lainnya	4. Meningkatnya produktivitas dan daya saing PKM	4. Pengembangan kemitraan usaha koperasi dan PKM				
	5. Mendorong pengembangan agroindustri dan kerajinan rakyat	5. Meningkatnya agroindustri dan kerajinan rakyat	5. Pembinaan kepastian berusaha dan stimulan bagi pengrajin				
			6. Pengembangan jaringan informasi pasar				
	1. Mengembangkan pasar dengan membuka jaringan usaha lintas kawasan (daerah)	1. Terbukanya jaringan usaha lintas daerah	1. Penataan sistem informasi perdagangan		221.574.000	APBD	
	2. Menciptakan iklim usaha yang sehat (transparansi prosedur dan biaya, promosi investasi melalui dokumen kelayakan) dan peningkatan produksi peningkatan penyaluran kredit, perbaikan teknologi, informasi pasar	2. Meningkatnya perekonomian rakyat	2. Pengembangan jaringan informasi pasar, barang dan jasa				
		3. Meningkatkan daya saing UKM	3. Pengembangan dan peningkatan usaha daerah		210.000.000		
		4. Terkendalinya peredaran barang dan jasa	4. Pengembangan kemitraan usaha				
		5. Terkendalinya harga barang makanan dan kebutuhan pokok	5. Pemantapan lalu lintas perdagangan barang dan jasa		2.935.430.400		
			6. Penataan sistem informasi kelayakan harga				
					199.914.000		

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi		KET.
					(Rp)	Sumber	
	3. Meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan & peredaran barang & jasa 4. Dukungan pengendalian harga, bahan makanan dan kebutuhan pokok masyarakat 5. Peningkatan monitoring harga bahan pokok guna perlindungan terhadap konsumen	6. Meningkatnya pengawasan harga bahan pokok 7. Terlindunginya konsumen	7. Pengendalian dan pengawasan terhadap harga bahan pokok		84.078.000		
16. Pengembangan iklim investasi pembukaan peluang penanaman modal dan pengembangan perusahaan daerah	1. Pengembangan potensi dan investasi daerah terutama komoditi unggulan lokal 2. Memperluas lapangan pekerjaan melalui peningkatan aktivitas perekonomian rakyat dan investasi 3. Memperkuat bidang usaha terutama dalam pemanfaatan modal murah 4. Pemberdayaan dan penguatan permodalan bagi usaha kecil dan menengah	1. Meningkatnya produk-produk unggulan yang mempunyai keunggulan yang mempunyai keunggulan kompetitif 2. Terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya perekonomian rakyat 3. Berkembangnya usaha dalam pemanfaatan modal murah 4. Meningkatnya kegiatan bagi usaha kecil dan menengah	1. Pembinaan penerapan teknologi tepat guna bagi pengrajin. 2. Peningkatan promosi investasi perekonomian rakyat 3. Pemberian modal murah bagi pengusaha kecil menengah 4. Dukungan penguatan permodalan bagi usaha kecil menengah 5. Pembinaan permodalan, pemasaran manajemen bagi usaha kecil menengah 6. Diklat bagi wurausahawan baru	BPID, Distamben	325.000.000 1.393.986.00 400.000.000 360.000.000 359.628.000 235.000.000	APBD	

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi		KET.
					(Rp)	Sumber	
	5. Penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru 6. Promosi standarisasi produk 7. Peningkatan akses UKM pada sumberdaya produksi, permodalan dan pasar.	5. Terciptanya sistem perdagangan yang efisien	7. Berkembangnya jumlah dan kualitas UKM		300.000.000		
17. Meningkatkan derajat kesehatan derajat masyarakat melalui usaha-usaha pelayanan dan penyuluhan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	1. Peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kuantitas fasilitas kesehatan 2. meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan pola hidup sehat dan pendidikan kesehatan dasar 3. Perbaikan gizi masyarakat 4. Pencegahan dan pemberantasan penyakit serta peningkatan imunisasi	1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan 2. Terwujudnya pola hidup sehat 3. Meningkatnya prosentase keluarga sadar gizi	1. Peningkatan program PHBS 2. Penyebarluasan info kesehatan 3. Kelurahan percontohan PHBS 4. Pemberdayaan UKBM 5. Peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan 6. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPPG) 7. Peningkatan gizi 8. Rehab Puskesmas 9. Pengembangan unit dan instalasi	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah Sukadana	850.240.000 1.462.000.000 1.666.470.000 544.153.000 2.720.765.000 2.550.717.000 4.661.113.000 14.896.190.000 11.223.156.000	APBD, APBN	

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi		KET.
					(Rp)	Sumber	
18. Menciptakan kesehatan perorangan melalui budaya hidup sehat	1. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perilaku serta budaya hidup bersih dan sehat	1. Terciptanya masyarakat dan lingkungan yang bersih dan sehat	1. Pembinaan dan pengawasan sarana pelayanan kesehatan 2. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah Sukadana	632.578.000 843.438.000	APBD	
19. Mengendalikan pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas melalui keluarga berencana	1. Pengendalian peredaran obat serta penyediaan obat yang terjangkau masyarakat	1. Meningkatnya jumlah peserta KB mandiri	1. Pengendalian Keluarga sejahtera 2. Pengendalian Program KB 3. Orientasi kesehatan reproduksi remaja dan pembinaan PKM 4. pendataan keluarga	Dinas Kesehatan	530.550.000 1.020.287.000 816.230.000 2.040.574.000	APBD	
20. Meningkatkan program penelitian d'bidang kesehatan	1. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan 2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan penelitian	1. Tercapainya pembangunan kesehatan 2. Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan	1. Penelitian bidang kesehatan 2. Peningkatan jenjang pendidikan tenaga kesehatan 3. Peningkatan jenjang pendidikan dan magang tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah Sukadana	680.200.000 1.020.300.000 1.360.383.000	APBD, APBN	

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi		KET.
					(Rp)	Sumber	
21. Membangun ketahanan social yang mampu memberikan bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah social dalam rangka meningkatnya kesejahteraan social masyarakat	1. Mengembangkan sistem jaminan social 2. Meningkatkan Akses penduduk miskin terhadap fasilitas pelayanan public 3. Memberdayakan keluarga rawan social ekonomi dan keluarga miskin	1. Terwujudnya jaminan sosial bagi penyandang masalah sosial 2. Meningkatnya akses penduduk miskin untuk mendapatkan fasilitas pelayanan publik 3. Terwujudnya keluarga sejahtera	1. Terwujudnya bantuan rumah sehat bagi warga pra-KS 2. Bimbingan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi 3. Pendataan penyandang masalah sosial Ekonomi (PMKS) dan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) 4. Pemberdayaan keluarga fakir miskin 5. Bimbingan rehabilitasi sosial 6. Pemberdayaan usaha bagi penyandang cacat tubuh, 7. Bantuan kepada yayasan Yatim Platu 8. Bantuan dana untuk keluarga miskin	Sosnakertrans	3.060.861.000	APBD	
					210.300.000		
					816.230.000		
					1.700.478.000		
					205.000.000		
					1.020.290.000		
					680.200.000		
					2.380.700.000		
22. Pengembangan sumberdaya minyak dan gas bumi	1. Pendayagunaan aparatur pemerintah dan pelaksanaan pengawasan usaha pertambangan. 2. Melaksanakan Inventarisasi dan Eksplorasi bahan tambang dan energi secara terinci (detail).	1. Meningkatnya produksi dan nilai produksi dari pertambangan minyak dan gas bumi 2. Meningkatnya PAD dari pertambangan, minyak bumi dan gas 3. Terwujudnya pengelolaan minyak	1. Diklat aparatur bidang pertambangan, minyak bumi dan gas. 2. Inventarisasi dan Eksplorasi bahan tambang dan energi secara rinci 3. Pengelolaan usaha pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan	Distamben, Bapedalda	9.873.000.000	APBD, APBN	
					1.752.000.000		

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi		KET.
					(Rp)	Sumber	
	3. Perlindungan dan pemeliharaan terhadap usaha pertambangan dalam rangka pelayanan prima 4. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan dan energi	bumi dan gas serta tambang yang berawasan lingkungan	4. Pelaksanaan AMDAL dalam kegiatan usaha pertambangan dan energi		500.000.000		
23. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik guna mendorong pemerataan pembangunan, percepatan, pertumbuhan ekonomi daerah	1. Pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman, sarana perekonomian, terminal serta fasilitas umum lainnya 2. Pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas sosial 3. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan 4. Peningkatan dan penataan sarana prasama keindahan ibu kota kabupaten 5. Upaya dan dukungan pemenuhan kebutuhan listrik bagi warga masyarakat	1. Meningkatnya jumlah pemeliharaan taman dan sarana perekonomian 2. Meningkatnya perbaikan dan pemeliharaan fasilitas sosial 3. Meningkatnya jumlah prasarana yang terpelihara secara mantap dan berfungsi 4. Meningkatnya penataan sarana prasarana keindahan ibu kota kabupaten 5. Meningkatnya persentase kebutuhan listrik warga	1. Pembangunan taman, sarana perekonomian dan fasilitas umum lainnya 2. Penataan taman, sarana perekonomian dan fasilitas umum lainnya 3. Pemeliharaan taman, sarana perekonomian dan fasilitas umum lainnya 4. Pembangunan fasilitas sosial 5. Perbaikan fasilitas sosial 6. Pemeliharaan fasilitas sosial 7. Pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana persampahan	Cipta Karya, Bapedalda.	2.500.000.000 1.000.000.000 433.185.000 4.000.000.000 3.500.000.000 2.500.000.000 500.000.000	APBD, APBN	

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (Rp)		KET.
						Sumber	
24. Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan secara efisien, handal, berkualitas dan aman	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan, rehabilitasi dan pemerataan peningkatan infrastruktur jalan jembatan 2. Rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan 3. Pembangunan jalan dan jembatan 4. Peningkatan jalan dan jembatan 5. Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan fasilitas lalu lintas	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Meningkatnya persentase panjang jalan dan jumlah jembatan dalam kondisi baik dan sedang	8. Penataan sarana prasarana keindahan ibu kota kabupaten 9. Penataan jaringan listrik dan penerangan jalan umum	Bina Marga, Dinas Perhubungan	1.000.000.000		APBD, APBN
					5.000.000.000		
					15.000.000.000		
					50.000.000.000		
					80.000.000.000		
					50.000.000.000		

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi		KET.
					(Rp)	Sumber	
25. Meningkatkan Kerukunan antar Umat Beragama dan Lembaga agama	1. Membantu bagi peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa 2. Meningkatkan kualitas lembaga keagamaan 3. Membantu meningkatkan dan rehabilitasi fasilitas keagamaan	1. Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa 2. Meningkatnya mutu lembaga keagamaan 3. Membantu fasilitas keagamaan	1. Bantuan kegiatan lembaga/wadah/masjid dan agama 2. Pembinaan dan Pelatihan Guru ngaji/TPA 3. Bantuan kepada TPA 4. Pembinaan Kerukunan Hidup antar umat beragama bagi tokoh agama dan aliran kepercayaan 5. Bantuan untuk rumah ibadah 6. Pembentukan lembaga konsultasi umat beragama	Setdakab	50.000.000.000	APBD	
					1.500.000.000		
		3. Meningkatkan jumlah prasarana jalan dan jembatan 4. Meningkatnya kapasitas, frekuensi dan waktu pelayanan yang memadai 5. Meningkatnya kelancaran, keterlibatan, keamanan dan kenyamanan lalu lintas	5. Peningkatan jalan dan penggantian jembatan 6. Penyediaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas jalan 7. Penyediaan dan pengaturan lapangan parkir kendaraan 8. Penataan dan pemeliharaan terminal dan sub terminal 9. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang terminal dan sub terminal		2.000.000.000		
					11.000.000.000		
					1.000.000.000		
					350.000.000	APBD	
					136.040.000		
					175.000.000		
					136.000.000		
					1.361.000.000		
					205.000.000		

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi		KET.
					(Rp)	Sumber	
26. Mengembangkan industri pariwisata yang didukung pengembangan dan pengolahan produk dan objek wisata	1. Pengembangan potensi pariwisata daerah	1. Meningkatnya produk wisata dan objek wisata	1. Promosi kerajinan daerah Kabupaten Lampung Timur 2. Festival Kabupaten Lampung Timur 3. Pengadaan alat-alat promosi pariwisata 4. Studi kelayakan dalam rangka menumbuhkan potensi obyek wisata DAM Kawat	Disbudpar	204.100.000	APBD	
					408.115.000		
					170.000.000		
27. Pengembangan kebudayaan dan kesenian secara profesional	1. Dukungan peningkatan apresiasi seni dan budaya	1. Meningkatnya kesenian dan budaya Lampung	1. Pentas seni alam daerah Kabupaten Lampung Timur 2. Pameran Seni Rupa 3. Bantuan Kepada Sanggar Seni	Disbudpar	340.100.000	APBD	
					273.000.000		
					561.158.000		
28. Mengembangkan kreatifitas dibidang Kepemudaan dan Olahraga	1. Peningkatan kualitas, kompetensi, kemandirian dan jiwa kewirausahaan pemuda 2. Peningkatan prestasi olahraga daerah dan keagairahan olahraga 3. Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas olahraga	1. Meningkatnya kreatifitas pemuda dalam kewirausahaan 2. Meningkatnya jumlah olahragawan daerah	1. Peningkatan wawasan dan sikap mental pemuda dalam pembangunan 2. Pemasalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 3. Peningkatan pemanduan bakat dan pembibitan olah raga 4. Peningkatan prestasi olahraga	Setdakab	170.000.000	APBD	
					204.100.000		
					183.652.000		
					272.077.000		

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (Rp)		KET.
						Sumber	
29. Pengembangan peran serta generasi muda dalam pembangunan bangsa	1. Peningkatan peran generasi muda dalam pembangunan daerah.	1. Terciptanya peran serta generasi muda dalam pembangunan daerah	1. Pembekalan dan peningkatan, pengetahuan, ketrampilan dan kewirausahaan pemuda. 2. Pembinaan kepada OKP dan Karang Taruna sekabupaten Lampung Timur 3. Penyuluhan dan pemberantasan Narkoba dan AIDS bagi Pemuda	Setdakab	217.661.000	APBD	
					272.100.000		
					510.143.000		
30. Meningkatkan kualitas SDM Perempuan	1. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	1. Meningkatnya kualitas SDM Perempuan	1. Orientasi kelompok ekonomi produktif perempuan 2. Sosialisasi Undang-Undang No 23 Tahun 2004 (Penghapusan Tindak Kekerasan dalam rumah Tangga) 3. Pembentukan lembaga advokasi Penghapusan Tindak Kekerasan dalam rumah Tangga	Setdakab	170.100.000	APBD	
					204.058.000		
					680.200.000		

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (Rp)		KET.
					(Rp)	Sumber	
26. Mengembangkan industri pariwisata yang didukung pengembangan dan pengolahan produk dan objek wisata	1. Pengembangan potensi pariwisata daerah	1. Meningkatnya produk wisata dan objek wisata	1. Promosi kerajinan daerah Kabupaten Lampung Timur 2. Festival Kabupaten Lampung Timur 3. Pengadaan alat-alat promosi pariwisata 4. Studi kelayakan dalam rangka menumbuhkan potensi obyek wisata DAM Kawat	Disbudpar	204.100.000 408.115.000 170.000.000	APBD	
27. Pengembangan kebudayaan dan kesenian secara profesional	1. Dukungan peningkatan apresiasi seni dan budaya	1. Meningkatnya kesenian dan budaya Lampung	1. Pentas seni alam daerah Kabupaten Lampung Timur 2. Pameran Seni Rupa 3. Bantuan Kepada Sanggar Seni	Disbudpar	340.100.000 273.000.000 561.158.000	APBD	
28. Mengembangkan kreatifitas dibidang Kepemudaan dan Olahraga	1. Peningkatan kualitas, kompetensi, kemandirian dan jiwa kewirausahaan pemuda 2. Peningkatan prestasi olahraga daerah dan kegairahan olahraga 3. Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas olahraga	1. Meningkatnya kreatifitas pemuda dalam kewirausahaan 2. Meningkatnya jumlah olahragawan daerah	1. Peningkatan wawasan dan sikap mental pemuda dalam pembangunan 2. Pemasalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 3. Peningkatan pemanduan bakat dan pembibitan olah raga 4. Peningkatan prestasi olahraga	Setdakab	170.000.000 204.100.000 183.652.000 272.077.000	APBD	K.E

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi		KET.
					(Rp)	Sumber	
29. Pengembangan peran serta generasi muda dalam pembangunan bangsa	1. Peningkatan peran generasi muda dalam pembangunan daerah.	1. Terciptanya peran serta generasi muda dalam pembangunan daerah	1. Pembekalan dan peningkatan, pengetahuan, ketrampilan dan kewirausahaan pemuda. 2. Pembinaan kepada OKP dan Karang Taruna sekabupaten Lampung Timur 3. Penyuluhan dan pemberantasan Narkoba dan AIDS bagi Pemuda	Setdakab	217.661.000	APBD	
					272.100.000		
					510.143.000		
30. Meningkatkan kualitas SDM Perempuan	1. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	1. Meningkatnya kualitas SDM Perempuan	1. Orientasi kelompok ekonomi produktif perempuan 2. Sosialisasi Undang-Undang No 23 Tahun 2004 (Penghapusan Tindak Kekerasan dalam rumah Tangga) 3. Pembentukan lembaga advokasi Penghapusan Tindak Kekerasan dalam rumah Tangga	Setdakab	170.100.000	APBD	
					204.058.000		
					680.200.000		

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi		KET.
					(Rp)	Sumber	
31. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan perlindungan terhadap perempuan	1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam upaya peningkatan kualitas taraf hidup keluarga dan masyarakat 2. Penguatan dan pemantapan kelembagaan dengan mengutamakan Gender	1. Meningkatkan jumlah dan peranan lembaga yang memperjuangkan hidup dan hak-hak perempuan	1. Orientasi Pendidikan Keluarga Dalam Rangka Mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender 2. Pembuatan Media Informasi Gender (Leaflet, Brosur, dan Kalender)	Setdakab	272.100.000 476.134.000	APBD	
32. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui penataan kelembagaan, manajemen publik dan peningkatan kapasitas SDM aparatur; dan	1. Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur dan Pengembangan pola Pembinaan Karier Aparatur berdasarkan prestasi dan profesionalis	1. Tersedianya jumlah aparatur yang berkualitas yang mampu menjalankan tugas	1. Pemantapan penyelenggaraan tugas perangkat kelurahan	Setdakab	408.115.000	APBD	
33. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik	1. Penataan fungsi administrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Terlaksananya pelayanan publik yang prima melalui deregulasi dan debirokrasi pelayanan	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Setdakab	462.530.000	APBD	

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi		KET.
					(Rp)	Sumber	
34. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik	1. Penataan fungsi administrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Terlaksananya pelayanan publik yang prima melalui deregulasi dan debirokrasi pelayanan	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Setdakab	462.530.000	APBD	
35. Memantapkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kebijaksanaan desentralisasi keuangan	1. Mengembangkan Sistem Informasi manajemen Pemerintahan Daerah	1. Terwujudnya pengelolaan manajemen keuangan Daerah Secara akuntabel	1. Pencetakan buku Manual Administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Setdakab	544.153.000	APBD	
36. Meningkatkan mutu hasil penelitian dan pendataan guna menunjang perencanaan dan pengembangan pembangunan daerah	1. Mengembangkan jaringan teknologi informasi dan pengembangan data base pembangunan daerah	1. Tersedianya perencanaan strategis sebagai dasar pertanggungjawaban pembangunan	1. Leaflet penyelenggaraan Pemerintah 2. Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Setdakab	408.115.000	APBD	
37. Memantapkan pengelolaan keuangan daerah	1. Pengembangan dan peningkatan sumber keuangan daerah	1. Meningkatnya pendapatan asli daerah	1. Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan daerah 2. Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah Pengkajain penignkatan penerimaan daerah 3. Pengkajian peningkatan penerimaan daerah	Setdakab, Dispenda	420.000.000 500.000.000 300.000.000	APBD	

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi (Rp)		KET.
						Sumber	
	2. Pemantapan manajemen keuangan daerah	2. Terwujudnya pengelolaan manajemen keuangan daerah secara akuntabel	1. Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah 2. Pemantapan koordinasi perencanaan dan penyusunan APBD 3. Penataan manajemen keuangan daerah secara akuntabel 4. Penyusunan pertanggungjawaban Kepala Daerah	Setdakab, Bappeda	850.000.000 1.150.000.000 900.000.000 600.000.000		
38. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik	1. Peningkatan kapasitas administrasi publik 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan publik	1. Terwujudnya penyederhanaan dan kualitas pelayanan perizinan di semua barang 2. Terlaksananya pelayanan publik yang prima melalui deregulasi dan debirokratisasi pelayanan	1. Peningkatan pelayanan birokrasi publik 2. Pengembangan sistem informasi manajemen dalam pelayanan publik 3. Pelaksanaan sistem pelayanan publik yang prima.	Setdakab,	480.000.000 300.000.000 350.000.000	APBD	

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi		KET.
					(Rp)	Sumber	
39. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat	1. Peningkatan Kesadaran masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menciptakan iklim kehidupan demokrasi dengan melibatkan peran serta masyarakat 2. Memberikan bantuan dan fasilitas kepada instansi penegakan hukum dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat	1. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka mensukseskan demokrasi 2. Meningkatnya kemampuan aparat dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat	1. Penyuluhan dan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kamtibmas 3. Peningkatan dan pengembangan sarana kamtibmas 4. Dukungan sarana penunjang kamtibmas	Kesbang, Kantor Pol PP	340.100.000	APBD	
					326.500.000		
					680.200.000		
					544.153.000		
40. Meningkatkan sarana prasarana permukiman	1. Penyehatan lingkungan permukiman 2. Peningkatan pelayanan dan pemenuhan sarana prasarana perumahan 3. Perbaikan lingkungan permukiman 4. Pengendalian banjir dan daerah genangan air 5. Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan,	1. Meningkatnya jumlah cakupan kesehatan lingkungan 2. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana perumahan 3. Meningkatnya jumlah lingkungan perumahan yang terpelihara secara mantap dan berfungsi 4. Terwujudnya sistem pengendalian banjir	1. Pembangunan saluran drainase 2. Pembangunan gorong-gorong 3. Penataan bangunan 4. Pembangunan jalan onderlaag 5. Pembangunan jalan setapak/paving blok 6. Peningkatan jalan penetrasi 7. peningkatan jalan sampai dengan hotmik	Cipta Karya	14.274.000.000	APBD, APBN	
					24.984.000.000		
					65.074.000.000		
					3.685.000.000		
					96.636.000.000		
					500.000.000		

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi		KET.
					(Rp)	Sumber	
41. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan yang diimbangi dengan pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya alam	rehabilitasi dan pemerataan peningkatan infrastruktur permukiman	dan penanganan daerah genangan air	8. Perencanaan sistem drainase	Bapedalda	356.000.000	APBD, APBN	
	6. Penyediaan dan pengelolaan sarana air bersih	5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan dan rehabilitasi permukiman	9. Pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan dan rehabilitasi permukiman		100.000.000		
		6. Tersedianya pelayanan air bersih	10. Perbaikan dan optimalisasi PDAM		45.000.000.000		
	1. Melibatkan elemen masyarakat dalam upaya pemanfaatan potensi pemabangunan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dlm pengelolaan SDA & pelestarian LH	1. Pengembangan pola kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup		150.000.000		
	2. Penataan pembangunan yang berbasis lingkungan hidup	2. Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup	2. Pemasarakan pembangunan berwawasan lingkungan		150.000.000		
	3. Peningkatan kualitas dan pengamanan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	3. Meningkatnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup	3. Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati		150.000.000		
	4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup	4. Meningkatnya pembinaan, pengawasan & pengendalian lingkungan hidup	4. Pengkajian terhadap pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup		250.000.000		
	5. Meningkatkan mutu hutan, tanah, air bawah tanah dan sungai	5. Meningkatnya kualitas hutan, tanah, air bawah tanah & sungai	5. Penataan dan pemeliharaan hutan, tanah, air bawah tanah, dan sungai		200.000.000		
			6. Penataan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup		500.000.000		
			7. Pengawasan Limbah cair Industri		500.000.000		

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi.		KET.
					(Rp)	Sumber	
	6. Pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan	6. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup					
42. Mendorong pengembangan wilayah	1. Penataan kembali Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang berbasis lingkungan 2. Optimalisasi dan peningkatan kinerja lembaga yang terlibat dalam penanganan infrastruktur 3. Menciptakan mekanisme penjangkasan aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur	1. Terwujudnya penataan ruang wilayah yang berkelanjutan 2. Meningkatkan kinerja lembaga penanganan infrastruktur 3. Terwujudnya mekanisme dalam penjangkasan aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur	1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Wilayah 2. Optimalisasi Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 3. Penerapan disiplin pegawai 4. Perencanaan pembangunan yang partisipatif 5. Optimalisasi musrenbang	Bappeda, Setdakab, Pol PP, Kecamatan	3.000.000.000 250.000.000 300.000.000 1.080.000.000	APBD	

Kebijakan	Program	Indikator Keluaran	Indikasi Kegiatan	SKPD	Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi		KET.
					(Rp)	Sumber	
43. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan dan penataan ruang daerah	1. Memperluas kegiatan penataan dan pembangunan daerah 2. Peninjauan ulang kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan	1. Terwujudnya penataan dan pembangunan daerah 2. Terciptanya kebijakan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan	1. Penataan Wajah Kabupaten Lampung Timur 2. Pembangunan Wajah Kabupaten Lampung Timur 3. Penataan, pemeliharaan, dan rehabilitasi wilayah rawan kerusakan lingkungan 4. Pembangunan Daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Bappeda	250.000.000	APBD	
					250.000.000		
					200.000.000		
					350.000.000		

BAB VII

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

7.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2010 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung tahun 2005.

Mengingat masa bhakti Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur berakhir pada tahun 2010 dan akan mengundurkan diri pada bulan Agustus 2010, serta waktu yang sangat sempit bagi Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 nanti untuk menyusun RPJM Tahun 2010-2015 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011, maka dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menjembatani kekosongan rencana pembangunan Daerah tahun 2011 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011, dilakukan penyusunan rencana indikatif program tahun 2011 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011.

Selanjutnya Bupati/Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan rencana indikatif program tahun 2011 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 untuk pelaksanaan pembangunan Daerah yang lebih baik.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2010 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Lampung Timur berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2010 dengan sebaik-baiknya;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2010, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); .
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2010 merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui rangkaian forum perencanaan partisipatif;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2010 dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2010 merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005 – 2010 merupakan dokumen perencanaan, sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lampung Timur 5 tahun ke depan. Implementasi RPJMD dalam pembangunan daerah dilaksanakan secara berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan akan sangat tergantung pada komitmen dan peran serta aktif stakeholders pembangunan Kabupaten Lampung Timur guna menjamin terwujudnya visi dan misi Kabupaten Lampung Timur yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan bersama. Hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.